PERUBAHAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

KABUPATEN SARMI 2025

BAPPEDA
KABUPATEN SARMI

BUPATI SARMI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SARMI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN SARMI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SARMI,

Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan/ keadaan dalam tahun berjalan antara lain berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, pembangunan, prioritas darah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1516);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan; Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

41. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomo 9);

42. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2013 Nomor 2);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2016 Nomor 4);

45. Peraturan Bupati Sarmi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarmi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai:

a. Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan

b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2B

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang Menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Triwulan I Tahun 2025;

c. Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;

d. Bab VI : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

f. Bab VI ; Penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarmi.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal, 19 Agustus 2025

BUPATI SARMI,
C A P / T T D
DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.KES

Diundangkan di Sarmi
pada tanggal, 21 Agustus 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
C A P / T T D

EDUWARD P. DIMOMONMAU, ST., M.Kp
Pembina Tk I
NIP. 197602071996101001

BERITA DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SARMI
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL I. AYEMI, SH

Salinan. Peraturan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
8. Direktur PT. Bank Papua Cabang Sarmi di Sarmi;

Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025. Dokumen ini menjadi instrumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan tetap memperhatikan dinamika pembangunan daerah, perkembangan kebijakan nasional, serta kapasitas fiskal daerah yang mengalami penyesuaian.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dilakukan sebagai respons atas beberapa faktor penting, antara lain:

- Adanya Bupati Definitif Kabupaten Sarmi, yang membawa arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta penajaman program sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk lebih cermat, hemat, dan tepat sasaran dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja, yang berdampak langsung pada struktur pendapatan daerah Kabupaten Sarmi, sehingga diperlukan penyesuaian alokasi belanja dalam dokumen perencanaan.

Dengan latar belakang tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun secara cermat dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan semester pertama tahun 2025. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program prioritas, kegiatan strategis, serta indikator kinerja pembangunan yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sarmi.

Pemerintah Kabupaten Sarmi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah, para pemangku kepentingan, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan RKPD ini. Kolaborasi, masukan, dan komitmen bersama menjadi fondasi penting bagi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhirnya, besar harapan kami agar dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada sisa tahun anggaran 2025, serta menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan Kabupaten Sarmi yang Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Sarmi, Agustus 2025

BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.KES

Daftar isi

Halaman sampul ---------- **i**

Rancangan Peraturan Bupati ---------- **ii**

Kata Pengantar ---------- **viii**

Daftar Isi ---------- **ix**

BAB I PENDAHULUAN ---------- **I-1**

1.1 Latar Belakang ---------- I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ---------- I-2

1.3 Hubungan antar Dokumen ---------- I-6

1.4 Maksud dan Tujuan ---------- I-7

1.5 Sistematika Penulisan ---------- I-8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TRIWULAN KEDUA TAHUN ANGGARAN 2025 ---------- 1-73

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ---------- III-2

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ---------- III-20

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ---------- **IV-1**

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ---------- **V-1**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH ---------- **VI-1**

BAB VII PENUTUP ---------- **VII-1**

BAB 1
Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran umum penyusunan dokumen, dan memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan P-RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025.

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta sinkron dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. RKPD berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Namun dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, seringkali terjadi perubahan kondisi strategis baik pada aspek regulasi, kebijakan nasional, maupun fiskal daerah, yang mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RKPD. Penyesuaian ini penting agar arah pembangunan daerah tetap relevan, konsisten, dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan terkini.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 menjadi sebuah keharusan yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting, yaitu:

1. Penetapan Bupati Definitif Kabupaten Sarmi Tahun 2025.
   Dengan telah ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Definitif, diperlukan adanya penyesuaian arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan daerah agar selaras dengan visi, misi, dan agenda kerja Kepala Daerah terpilih. Hal ini merupakan bagian dari konsolidasi kebijakan pembangunan daerah agar pelaksanaannya memiliki kesinambungan dengan RPJMD dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sarmi.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

   Instruksi Presiden ini menekankan perlunya pengendalian belanja pemerintah dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sarmi, dituntut untuk melakukan penyesuaian belanja dengan cara mengurangi belanja yang tidak produktif, memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal yang ada.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

   Keputusan Menteri Keuangan ini memberikan konsekuensi langsung terhadap kemampuan fiskal daerah, khususnya Kabupaten Sarmi, karena adanya penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Penyesuaian tersebut menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan rekalkulasi, realokasi, dan refocusing anggaran, sehingga program dan kegiatan pembangunan tetap dapat berjalan dengan optimal meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 merupakan langkah strategis dan krusial untuk:

- Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Definitif.
- Menindaklanjuti kebijakan nasional terkait efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
- Mengakomodasi penyesuaian fiskal akibat adanya perubahan alokasi Transfer ke Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2025 diharapkan mampu menjaga konsistensi perencanaan pembangunan, memastikan alokasi anggaran lebih efektif, serta menjawab kebutuhan prioritas masyarakat Kabupaten Sarmi secara tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1104 ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 52);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
28. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembar negara Republik Indoensia tahun 2021 Nomor 172);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
31. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
32. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat;

33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1045);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 630);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarmi tahun 2013-2033, (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2013 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sarmi (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2016 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2018 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2023 Nomor 5);
46. Peraturan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026, (Berita Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2022 Nomor 12).

1.3 Hubungan Antar Dokumen Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan hierarkis dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, antara lain:

- **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)**: Perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan arah dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun [Sebutkan Tahun RPJPN].
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**: Perubahan RKPD Tahun 2025 selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional yang relevan dengan konteks pembangunan daerah.
- **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua**: Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua.
- **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2023-2026:** Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan penyesuaian dan penjabaran lebih lanjut dari strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023-2026 untuk tahun 2025. Perubahan ini tetap berada dalam koridor pencapaian Agenda pembangunan dalam RPD.

- **Rencana Strategis (Renstra) SKPD:** Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi acuan bagi SKPD dalam melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) SKPD masing-masing untuk tahun 2025, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh SKPD sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah disesuaikan.

- **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**: Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Menyesuaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan: Melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 agar lebih selaras dengan perkembangan kebijakan nasional dan provinsi, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.
2. Menyempurnakan Target dan Indikator Kinerja: Melakukan penajaman target kinerja dan indikator keberhasilan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025 agar lebih realistis, terukur, dan dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tantangan yang dihadapi.
3. Mengoptimalkan Alokasi Sumber Daya: Melakukan penyesuaian dalam alokasi sumber daya daerah, baik anggaran maupun sumber daya lainnya, agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang telah disesuaikan.
4. Meningkatkan Sinergi dan Koordinasi Antar SKPD: Memperkuat sinergi dan koordinasi antar SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah disesuaikan dalam RKPD Tahun 2025.
5. Menghasilkan Dokumen Perencanaan yang Lebih Responsif: Menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang lebih responsif terhadap dinamika perubahan dan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Sarmi.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan terkini.
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil.
3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya daerah dalam mencapai prioritas pembangunan.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan RKPD Tahun 2025.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.
1.3 Hubungan Antar Dokumen Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.
1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Sarmi Triwulan II Tahun 2025

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN FISKAL

3.1 Proyeksi Kerangka Ekonomi Daerah
3.2 Kebijakan Pendapatan Daerah
3.3 Kebijakan Belanja Daerah
3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Hasil Penyesuaian)
4.2 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Hasil Penyesuaian)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD, LOKASI, DAN ANGGARAN

5.1 Matriks Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 (Hasil Perubahan)

5.2 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

5.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan

BAB VI INDIKATOR KINERJA DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 (Hasil Perubahan)

6.2 Target Kinerja Program dan Kegiatan

BAB VII PENUTUP

BAB 2
Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025

Bab II memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sarmi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, yang mencakup capaian realisasi fisik dan keuangan, telaah kualitatif terhadap faktor pendukung dan penghambat, serta pengaruh dinamika kebijakan nasional maupun daerah pada tahun berjalan. Evaluasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat ketercapaian target pembangunan sekaligus menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan, perbaikan perencanaan, dan penguatan strategi pembangunan pada periode berikutnya.

2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 merupakan tahapan penting dalam memastikan sejauh mana target pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara terukur. Evaluasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menilai capaian kinerja secara kuantitatif melalui realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga untuk menelaah secara kualitatif berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperhatikan dinamika kebijakan nasional maupun daerah yang muncul pada tahun berjalan.

Sampai dengan pertengahan tahun 2025, implementasi RKPD Kabupaten Sarmi menunjukkan capaian yang bervariasi antar perangkat daerah dan sektor pembangunan. Beberapa indikator strategis, seperti pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar, memperlihatkan kemajuan yang cukup baik dengan tingkat realisasi mendekati target triwulanan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah program yang realisasinya relatif rendah akibat keterlambatan proses administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dinamika regulasi, serta kondisi geografis Kabupaten Sarmi yang menantang sehingga berdampak pada kecepatan distribusi pelayanan maupun penyerapan anggaran.

Dinamika pembangunan Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 dipengaruhi juga oleh beberapa faktor penting, antara lain:

1. Penetapan Bupati Definitif Kabupaten Sarmi Tahun 2025, yang membawa arah kepemimpinan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini berimplikasi pada penyesuaian kebijakan, penajaman program prioritas, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang menuntut adanya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Konsekuensinya, beberapa program harus dilakukan penyesuaian kembali agar sesuai dengan kebijakan nasional dalam pengendalian belanja.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Sarmi.

Ketiga dinamika tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 berada dalam situasi yang penuh tantangan sekaligus peluang. Kehadiran Bupati definitif membuka ruang untuk memperkuat kepemimpinan dan arah pembangunan daerah, sementara kebijakan nasional terkait efisiensi belanja dan penyesuaian alokasi transfer mendorong pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanakan program. Dalam konteks inilah, terdapat sejumlah faktor pendukung yang berperan penting dalam menjaga agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada pada jalur pencapaian target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain:

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Komitmen Pemerintah Daerah: Dukungan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati definitif serta koordinasi lintas perangkat daerah yang semakin intensif dalam mengawal prioritas pembangunan.
- Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan dan pengawasan pembangunan memberikan masukan yang relevan terhadap kebutuhan riil di lapangan.
- Dukungan Kebijakan Nasional dan Provinsi: Sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah yang mendorong percepatan capaian pembangunan, terutama di bidang stunting, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Sistem informasi perencanaan dan pelaporan mulai dioptimalkan sehingga membantu efisiensi proses monitoring dan evaluasi pembangunan.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Keterbatasan SDM dan Kapasitas Teknis: Jumlah dan kemampuan aparatur di beberapa perangkat daerah masih terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan sering terlambat.
- Kondisi Geografis dan Infrastruktur: Luas wilayah, keterisolasian beberapa daerah, serta terbatasnya infrastruktur dasar menghambat kelancaran distribusi pelayanan publik.
- Proses Administrasi dan Regulasi: Prosedur pengadaan barang/jasa dan mekanisme pengelolaan anggaran yang panjang sering menyebabkan penundaan pelaksanaan program.
- Keterlambatan Transfer Dana: Penyesuaian alokasi transfer pusat sebagaimana tertuang dalam KMK Nomor 29 Tahun 2025 menyebabkan beberapa kegiatan harus dijadwal ulang.
- Faktor Eksternal: Dinamika harga barang, kondisi cuaca, keterbatasan pasokan listrik di beberapa distrik, serta adanya praktik palang memalang oleh sebagian masyarakat turut memberikan pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional, penetapan kepemimpinan daerah yang baru, serta kondisi pelaksanaan pembangunan di lapangan, evaluasi RKPD Kabupaten Sarmi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai capaian, kendala, dan tantangan pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi sekaligus acuan untuk melakukan penyesuaian kebijakan, percepatan program prioritas, dan perbaikan kualitas perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Data evaluasi dan monitoring tersebut bersumber dari aplikasi SA'KOMPAK (Sarmi Komitmen Pantau Kinerja), yaitu sistem informasi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk memantau realisasi program dan kegiatan perangkat daerah secara berkala. Melalui aplikasi ini, penyajian data menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, capaian evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025
KABUPATEN SARMI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja RPJMD pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1(%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Semua Bidang																	
	1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		85.671.492.983		27.192.546.470		31,74%		27.192.546.470		0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		82.384.526.782		26.948.246.470				26.948.246.470				
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	520,00	82.064.527.292	130,00	26.948.246.470	25%	32,84%	130,00	26.948.246.470	0%	0,00%		
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	169.999.745	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	149.999.745	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			-		-		199.994.723		-				-				
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	199.994.723	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		554.445.305		-				-				
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	84.652.745	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	469.792.560	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		1.491.178.993		-				-				
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	24.919.500	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	39.949.285	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	38,00	449.962.500	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	30,00	19.999.708	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	15,00	165.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	56,00	419.348.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	372.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		846.471.625		244.300.000				244.300.000				
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	36.472.625	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	173.999.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	16,64	636.000.000	71,28	244.300.000	428%	38,41%	71,28	244.300.000	0%	0,00%		
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		194.875.555		-				-				
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	29.755.555	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	165.120.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		3.646.904.503		937.605.111		25,71%		937.605.111		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.182.290.084		895.105.111				895.105.111				
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	24,00	3.182.290.084	16,00	895.105.111	67%	28,13%	16,00	895.105.111	0%	0,00%		
	2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		146.264.172		-				-				
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	12.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	9.999.172	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	124.265.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		52.500.000		-				-				
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	52.500.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		252.857.500		42.500.000				42.500.000				
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	11.610.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	241.247.500	2,00	42.500.000	50%	17,62%	2,00	42.500.000	0%	0,00%		
	2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		12.992.747		-				-				
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	12.992.747	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		7.701.253.118		3.108.096.978		40,36%		3.108.096.978		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		147.411.105		-				-				
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	147.411.105	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.543.481.213		625.696.978				625.696.978				
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	28,00	3.543.481.213	18,67	625.696.978	67%	17,66%	18,67	625.696.978	0%	0,00%		
	2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		207.860.800		-				-				
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	79.682.800	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	128.178.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		3.802.500.000		2.482.400.000				2.482.400.000				

	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	4.500.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	30.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	3.768.000.000	2,67	2.482.400.000	67%	65,88%	2,67	2.482.400.000	0%	0,00%		
	2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		4.387.748.526		2.098.404.027		47,82%		2.098.404.027		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-			-		15.000.000		-				-				
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	15.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		3.608.843.704		1.746.204.027				1.746.204.027				
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	29,00	3.608.843.704	19,33	1.746.204.027	67%	48,39%	19,33	1.746.204.027	0%	0,00%		
	2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		133.720.000		10.000.000				10.000.000				
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	33.630.000	0,33	10.000.000	33%	29,74%	0,33	10.000.000	0%	0,00%		
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	100.090.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		595.184.822		327.200.000				327.200.000				
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	50.000.000	0,33	20.000.000	33%	40,00%	0,33	20.000.000	0%	0,00%		

	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	545.184.822	0,67	307.200.000	67%	56,35%	0,67	307.200.000	0%	0,00%		
	2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		35.000.000		15.000.000				15.000.000				
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	35.000.000	0,33	15.000.000	33%	42,86%	0,33	15.000.000	0%	0,00%		
	2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		5.195.167.151		2.187.056.214		42,10%		2.187.056.214		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-			-		29.976.615		-				-				
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	29.976.615	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		4.011.139.526		1.745.056.214				1.745.056.214				
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	34,00	4.011.139.526	22,67	1.745.056.214	67%	43,51%	22,67	1.745.056.214	0%	0,00%		
	2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		681.236.000		250.000.000				250.000.000				
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	100,00	681.236.000	25,00	250.000.000	25%	36,70%	25,00	250.000.000	0%	0,00%		
	2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		472.815.010		192.000.000				192.000.000				
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	13,00	472.815.010	5,00	192.000.000	38%	40,61%	5,00	192.000.000	0%	0,00%		
	2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		3.366.184.562		1.648.212.231		48,96%		1.648.212.231		0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

	2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		30.000.000		-					-				
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	3.600.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	13.200.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	13.200.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		2.321.495.699		1.120.212.231				1.120.212.231					
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	19,00	2.321.495.699	6,33	1.120.212.231	33%	48,25%	6,33	1.120.212.231	0%	0,00%			
	2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		79.824.000		10.000.000				10.000.000					
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	15.620.000	1,00	10.000.000	50%	64,02%	1,00	10.000.000	0%	0,00%			
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	64.204.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		934.864.863		518.000.000				518.000.000					
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	4.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%			
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	20.000.000	0,33	15.000.000	33%	75,00%	0,33	15.000.000	0%	0,00%			

	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	910.864.863	0,33	503.000.000	33%	55,22%	0,33	503.000.000	0%	0,00%		
	2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		5.895.577.223		2.530.805.204		42,93%		2.530.805.204		0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		4.207.432.978		1.715.756.584				1.715.756.584				
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	35,00	4.132.442.772	11,67	1.715.756.584	33%	41,52%	11,67	1.715.756.584	0%	0,00%		
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	74.990.206	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		515.744.245		131.148.620				131.148.620				
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	215.844.245	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	35,00	299.900.000	20,00	131.148.620	57%	43,73%	20,00	131.148.620	0%	0,00%		
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		1.172.400.000		683.900.000				683.900.000				
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	51,00	1.172.400.000	30,00	683.900.000	59%	58,33%	30,00	683.900.000	0%	0,00%		
	2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		5.750.054.984		2.105.814.014		36,62%		2.105.814.014		0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.199.674.174		1.348.214.014				1.348.214.014				
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	350,00	3.199.674.174	233,33	1.348.214.014	67%	42,14%	233,33	1.348.214.014	0%	0,00%		
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		1.208.739.000		-				-				

	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.013.900.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	7.210.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	187.629.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		1.341.641.810		757.600.000				757.600.000				
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	6.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	60.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.275.641.810	0,67	757.600.000	67%	59,39%	0,67	757.600.000	0%	0,00%		
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		4.145.407.775		932.447.489		22,49%		932.447.489		0,00%	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
	2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		14.966.000		-				-				
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	14.966.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		2.882.137.592		818.247.489				818.247.489				
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	25,00	2.882.137.592	8,33	818.247.489	33%	28,39%	8,33	818.247.489	0%	0,00%		
	2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		59.844.057		-				-				

	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	70,00	59.844.057	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		429.828.159		-				-				
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	49.931.469	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	50.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	29.968.690	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	299.928.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		758.631.967		114.200.000				114.200.000				
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	19.995.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	29.955.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	99.977.632	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	8,00	608.704.335	2,67	114.200.000	33%	18,76%	2,67	114.200.000	0%	0,00%		
	2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		4.021.332.184		1.242.362.037		30,89%		1.242.362.037		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.436.019.082		960.862.037				960.862.037				

	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00		-	- ,00		-	32,00	3.418.144.957	10,67	960.862.037	33%	28,11%	10,67	960.862.037	0%	0,00%		
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	- ,00		-	- ,00		-	4,00	17.874.125	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		9.900.000			-							
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00		-	- ,00		-	1,00	9.900.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-			-		94.500.000		94.500.000				94.500.000				
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00		-	- ,00		-	2,00	94.500.000	2,00	94.500.000	100%	100,00%	2,00	94.500.000	0%	0,00%		
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		480.913.102		187.000.000				187.000.000				
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00		-	- ,00		-	1,00	3.375.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00		-	- ,00		-	1,00	15.000.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00		-	- ,00		-	4,00	462.538.102	1,33	187.000.000	33%	40,43%	1,33	187.000.000	0%	0,00%		
	2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		3.083.428.927		667.466.302		21,65%		667.466.302		0,00%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

	2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		10.000.000		-				-				
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	10.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		2.762.063.678		606.966.302				606.966.302				
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	22,00	2.762.063.678	14,67	606.966.302	67%	21,98%	14,67	606.966.302	0%	0,00%		
	2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		74.965.249		-				-				
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	25.465.249	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	49.500.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		236.400.000		60.500.000				60.500.000				
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	236.400.000	0,67	60.500.000	67%	25,59%	0,67	60.500.000	0%	0,00%		
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		9.431.706.509		2.535.226.000		26,88%		2.535.226.000		0,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		505.000.600		133.226.000				133.226.000				
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	9.977.100	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	90.000.000	- ,00	40.000.000	0%	44,44%	- ,00	40.000.000	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	199.990.000	- ,00	46.000.000	0%	23,00%	- ,00	46.000.000	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	20.986.500	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	59.415.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	124.632.000	- ,00	47.226.000	0%	37,89%	- ,00	47.226.000	0%	0,00%		
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		104.951.125		-				-				
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	104.951.125	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		8.653.798.975		2.392.000.000				2.392.000.000				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	9.990.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	268.500.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	8.375.308.975	3,00	2.392.000.000	25%	28,56%	3,00	2.392.000.000	0%	0,00%		
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		167.955.809		10.000.000				10.000.000				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	6,00	69.981.000	- ,00	10.000.000	0%	14,29%	- ,00	10.000.000	0%	0,00%		

	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	97.974.809	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-		-		2.882.357.369		755.547.821		26,21%		755.547.821		0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-		-		25.000.000		-				-				
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	15.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	10.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-		-		2.362.910.323		651.547.821				651.547.821					
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	20,00	2.362.910.323	6,67		651.547.821	33%	27,57%	6,67	651.547.821	0%	0,00%		
	2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-		-		19.417.500		-				-				
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	19.417.500	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-		-		73.485.000		-				-				
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	30.015.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	43.470.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.24.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-		-		39.029.562		-				-				
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		-		39.029.562		-		0,00%		-		0,00%		
	2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-		-		292.532.845		104.000.000				104.000.000				

	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	24.996.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	267.536.845	0,33	104.000.000	33%	38,87%	0,33	104.000.000	0%	0,00%		
	2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		69.982.139		-				-				
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	29.989.150	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	39.992.989	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		9.106.557.717		1.700.946.087		18,68%		1.700.946.087		0,00%	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-			-		18.900.000		-				-				
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	18.900.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		4.408.831.294		1.275.456.087				1.275.456.087				
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	40,00	4.388.832.044	13,33	1.275.456.087	33%	29,06%	13,33	1.275.456.087	0%	0,00%		
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	19.999.250	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	3.25.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			-		-		18.807.000		-				-				
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	18.807.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		403.752.761		169.555.838				169.555.838				
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	88.900.761	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	45.000.000	0,33	90.000.000	33%	200,00%	0,33	90.000.000	0%	0,00%		
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	20.000.000	0,33	11.045.838	33%	55,23%	0,33	11.045.838	0%	0,00%		
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	249.852.000	0,33	68.510.000	33%	27,42%	0,33	68.510.000	0%	0,00%		
	3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		3.290.256.937		-				-				
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	290.256.937	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	3.000.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		918.159.725		239.934.162				239.934.162				
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	19.995.000	1,00	20.000.000	100%	100,03%	1,00	20.000.000	0%	0,00%		
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	50.590.000	1,00	5.934.162	100%	11,73%	1,00	5.934.162	0%	0,00%		

	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	847.574.725	1,33	214.000.000	33%	25,25%	1,33	214.000.000	0%	0,00%		
	3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		47.850.000		16.000.000				16.000.000				
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	47.850.000	0,33	16.000.000	33%	33,44%	0,33	16.000.000	0%	0,00%		
	3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		4.426.525.329		852.008.969		19,25%		852.008.969		0,00%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-			-		19.400.000		-				-				
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	19.400.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%	
	3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		3.171.072.426		852.008.969				852.008.969				
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	28,00	3.151.672.426	18,67	852.008.969	67%	27,03%	18,67	852.008.969	0%	0,00%		
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	19.400.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%	
	3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-			-		99.996.000		-				-				
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	99.996.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%	
	3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		506.735.305		-				-				

	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	199.999.023	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	199.984.349	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	49.995.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	15.176.933	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	41.580.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-			-		26.250.000			-					-				
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	26.250.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		590.850.000			-					-				
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	19.950.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	11.700.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	559.200.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		12.221.598			-					-				

	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	12.221.598	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		10.026.531.091		4.427.008.489		44,15%		4.427.008.489		0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		9.097.168.091		4.048.008.489				4.048.008.489				
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	85,00	9.075.408.091	28,33	4.048.008.489	33%	44,60%	28,33	4.048.008.489	0%	0,00%		
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	21.760.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		277.463.000		-				-				
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	7.500.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	20.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	249.963.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		651.900.000		379.000.000				379.000.000				
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	7.500.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	19.200.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	625.200.000	0,33	379.000.000	33%	60,62%	0,33	379.000.000	0%	0,00%		

	4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		59.422.406.709		34.627.418.179		58,27%		34.627.418.179		0,00%	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		400.000.000		600.000.000				600.000.000				
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	200.000.000	- ,00	400.000.000	0%	200,00%	- ,00	400.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	200.000.000	- ,00	200.000.000	0%	100,00%	- ,00	200.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		20.058.072.898		10.298.779.507				10.298.779.507				
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	#######	19.658.072.898	- ,00	9.698.779.507	0%	49,34%	- ,00	9.698.779.507	0%	0,00%		
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	200.000.000	- ,00	400.000.000	0%	200,00%	- ,00	400.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	200.000.000	- ,00	200.000.000	0%	100,00%	- ,00	200.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		1.879.079.300		1.295.024.922				1.295.024.922				
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	179.080.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	50,00	1.330.552.800	- ,00	700.000.000	0%	52,61%	- ,00	700.000.000	0%	0,00%		

	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	150,00	369.446.500	-	,00	595.024.922	0%	161,06%	-	,00	595.024.922	0%	0,00%		
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		4.710.000.000			6.602.491.672					6.602.491.672				
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.260.000.000	-	,00	1.789.771.672	0%	142,05%	-	,00	1.789.771.672	0%	0,00%		
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	230.000.000	-	,00	260.000.000	0%	113,04%	-	,00	260.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.720.000.000	-	,00	3.282.720.000	0%	190,86%	-	,00	3.282.720.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.500.000.000	-	,00	1.270.000.000	0%	84,67%	-	,00	1.270.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-			-		1.519.600.000			-					-				
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	1.519.600.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		8.631.865.000			6.986.122.078					6.986.122.078				
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	90.000.000	-	,00	104.840.000	0%	116,49%	-	,00	104.840.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	110.000.000	-	,00	203.775.078	0%	185,25%	-	,00	203.775.078	0%	0,00%		
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	50.000.000	-	,00	70.000.000	0%	140,00%	-	,00	70.000.000	0%	0,00%		

	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	8.381.865.000	- ,00	6.607.507.000	0%	78,83%	- ,00	6.607.507.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		3.290.000.000		1.785.000.000				1.785.000.000				
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	1.140.000.000	- ,00	1.785.000.000	0%	156,58%	- ,00	1.785.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	2.150.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			-		-		13.313.789.511		3.700.000.000				3.700.000.000				
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	413.789.511	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	12.900.000.000	- ,00	3.700.000.000	0%	28,68%	- ,00	3.700.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			-		-		1.620.000.000		760.000.000				760.000.000				
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	500.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	500.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	620.000.000	- ,00	760.000.000	0%	122,58%	- ,00	760.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**			-		-		900.000.000		750.000.000				750.000.000				

	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	300.000.000	-	,00	350.000.000	0%	116,67%	-	,00	350.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	200.000.000	-	,00	400.000.000	0%	200,00%	-	,00	400.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**				-			-		3.100.000.000			1.850.000.000					1.850.000.000				
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	350.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	2.400.000.000	-	,00	1.350.000.000	0%	56,25%	-	,00	1.350.000.000	0%	0,00%		
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	350.000.000	-	,00	500.000.000	0%	142,86%	-	,00	500.000.000	0%	0,00%		
	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		28.602.444.168			15.799.923.748		55,24%			15.799.923.748		0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-			-		104.640.000			-					-				
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	29.200.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	25.600.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	6,00	14.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	35.840.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		6.250.805.005		2.629.105.309				2.629.105.309				
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	54,00	6.074.445.005	-	,00	2.629.105.309	0%	43,28%	-	,00	2.629.105.309	0%	0,00%		
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	176.360.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		1.186.239.520		292.895.776				292.895.776				
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	13.387.500	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	73.274.320	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	700.000.000	-	,00	189.400.000	0%	27,06%	-	,00	189.400.000	0%	0,00%		
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	82.829.700	-	,00	975.776	0%	1,18%	-	,00	975.776	0%	0,00%		

	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	316.748.000	- ,00	102.520.000	0%	32,37%	- ,00	102.520.000	0%	0,00%		
	4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		3.405.940.435		1.438.000.000				1.438.000.000				
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	49.995.000	- ,00	20.000.000	0%	40,00%	- ,00	20.000.000	0%	0,00%		
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	170.795.000	- ,00	36.600.000	0%	21,43%	- ,00	36.600.000	0%	0,00%		
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	3.967.185	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	6,00	3.181.183.250	- ,00	1.381.400.000	0%	43,42%	- ,00	1.381.400.000	0%	0,00%		
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		142.970.000		23.600.000				23.600.000				
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	106.370.000	- ,00	10.000.000	0%	9,40%	- ,00	10.000.000	0%	0,00%		
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	36.600.000	- ,00	13.600.000	0%	37,16%	- ,00	13.600.000	0%	0,00%		
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			-		-		15.759.412.208		10.341.442.663				10.341.442.663				
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	- ,00	-	- ,00	-	25,00	14.186.980.208	- ,00	9.534.201.871	0%	67,20%	- ,00	9.534.201.871	0%	0,00%		
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	543.375.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	25,00	1.029.057.000	- ,00	807.240.792	0%	78,44%	- ,00	807.240.792	0%	0,00%		

	4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**			-		-		1.752.437.000		1.074.880.000				1.074.880.000				
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	22.320.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	157.705.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	1.272.412.000	- ,00	934.880.000	0%	73,47%	- ,00	934.880.000	0%	0,00%		
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	300.000.000	- ,00	140.000.000	0%	46,67%	- ,00	140.000.000	0%	0,00%		
	5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		8.148.043.716		2.606.604.837		31,99%		2.606.604.837		0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		129.999.665		-				-				
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	49.999.665	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	40.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	40.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		5.793.344.717		2.534.004.837				2.534.004.837				
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	53,00	5.753.344.717	35,33	2.534.004.837	67%	44,04%	35,33	2.534.004.837	0%	0,00%		

	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	40.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-			-		384.052.000			-					-				
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	150,00	384.052.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		819.454.932			-					-				
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	239.332.932	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	173.350.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	43.060.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	75,00	363.712.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		871.211.153			72.600.000					72.600.000				
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	15.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	157.092.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	7,00	699.119.153	3,00		72.600.000	43%	10,38%	3,00		72.600.000	0%	0,00%		

	5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		149.981.249		-				-				
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	149.981.249	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		18.809.824.382		10.247.907.071		54,48%		10.247.907.071		0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		49.995.374		-				-				
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	6,00	24.998.205	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	24.997.169	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		8.207.064.223		3.721.128.230				3.721.128.230				
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	14,00	8.157.043.256	9,33	3.721.128.230	67%	45,62%	9,33	3.721.128.230	0%	0,00%		
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	24.994.097	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	25.026.870	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-			-		49.995.540			-					-				
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	49.995.540	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		1.792.536.596		703.059.430				703.059.430					
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	412.138.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	200.000.000	0,67	67.340.000	67%	33,67%	0,67	67.340.000	0%	0,00%			
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	130.004.936	0,33	30.000.000	33%	23,08%	0,33	30.000.000	0%	0,00%			
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	499.969.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	500.425.000	0,67	605.719.430	67%	121,04%	0,67	605.719.430	0%	0,00%			
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	49.999.660	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		8.530.274.064		5.809.719.411				5.809.719.411					
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	20.010.000	0,67	15.000.000	67%	74,96%	0,67	15.000.000	0%	0,00%			

	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	228.762.000	0,67	98.998.411	67%	43,28%	0,67	98.998.411	0%	0,00%		
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	8.281.502.064	2,00	5.695.721.000	200%	68,78%	2,00	5.695.721.000	0%	0,00%		
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		179.958.585		14.000.000				14.000.000				
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	79.960.000	0,33	14.000.000	33%	17,51%	0,33	14.000.000	0%	0,00%		
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	99.998.585	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		5.762.423.117		2.620.386.746		45,47%		2.620.386.746		0,00%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-			-		50.000.000		50.000.000				50.000.000				
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	50.000.000	4,00	50.000.000	100%	100,00%	4,00	50.000.000	0%	0,00%		
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		4.960.803.218		2.313.586.746				2.313.586.746				
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	43,00	4.915.805.218	28,67	2.313.586.746	67%	47,06%	28,67	2.313.586.746	0%	0,00%		

	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	19.998.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	25.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-			-		18.101.500			-					-				
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	18.101.500	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		162.860.440			-					-				
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	20,00	49.990.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	#######	24.976.440	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	16,00	87.894.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		520.665.879			256.800.000					256.800.000				
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	4.995.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	35.990.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	479.680.879	2,00	256.800.000	67%	53,54%	2,00	256.800.000	0%	0,00%		
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		49.992.080		-				-				
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	49.992.080	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		6.184.761.515		1.600.795.312		25,88%		1.600.795.312		0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		24.948.596		-				-				
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	20.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	4.948.596	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		4.659.992.850		1.303.689.536				1.303.689.536				
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	34,00	4.649.972.160	22,67	1.303.689.536	67%	28,04%	22,67	1.303.689.536	0%	0,00%		
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	10.020.690	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		19.890.000		19.995.776				19.995.776				

	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	19.890.000	10,00	19.995.776	100%	100,53%	10,00	19.995.776	0%	0,00%		
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		532.629.736		68.639.237				68.639.237				
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	19.995.776	5,00	4.980.237	50%	24,91%	5,00	4.980.237	0%	0,00%		
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	60.000.000	3,33	15.000.000	33%	25,00%	3,33	15.000.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	44.999.960	3,33	11.249.000	33%	25,00%	3,33	11.249.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	100,00	407.634.000	25,00	37.410.000	25%	9,18%	25,00	37.410.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		466.395.425		128.970.763				128.970.763				
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	100,00	7.995.000	35,00	1.998.000	35%	24,99%	35,00	1.998.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	180.000.000	0,33	26.355.763	33%	14,64%	0,33	26.355.763	0%	0,00%		
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	278.400.425	0,67	100.617.000	67%	36,14%	0,67	100.617.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		480.904.908		79.500.000				79.500.000				
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	53.379.708	4,00	12.000.000	40%	22,48%	4,00	12.000.000	0%	0,00%		

	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	59.531.200	3,00	7.500.000	30%	12,60%	3,00	7.500.000	0%	0,00%		
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	367.994.000	0,67	60.000.000	67%	16,30%	0,67	60.000.000	0%	0,00%		
	1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		11.410.130.389		4.481.037.227		39,27%		4.481.037.227		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		8.104.937.902		3.573.727.227				3.573.727.227				
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	77,00	8.104.937.902	77,00	3.573.727.227	100%	44,09%	77,00	3.573.727.227	0%	0,00%		
	1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		1.668.242.505		344.297.164				344.297.164				
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	499.944.000	1,00	21.000.000	100%	4,20%	1,00	21.000.000	0%	0,00%		
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	150,00	1.168.298.505	20,00	323.297.164	13%	27,67%	20,00	323.297.164	0%	0,00%		
	1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		1.535.709.982		563.012.836				563.012.836				
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	200,00	36.499.950	180,00	8.833.772	90%	24,20%	180,00	8.833.772	0%	0,00%		
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	160.291.700	1,00	20.436.642	50%	12,75%	1,00	20.436.642	0%	0,00%		
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	114,00	1.338.918.332	86,00	533.742.422	75%	39,86%	86,00	533.742.422	0%	0,00%		
	1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		101.240.000		-				-				

	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	,00		-	-	,00		-	41,00	74.840.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	,00		-	-	,00		-	25,00	26.400.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					-				-		6.629.063.500			1.305.793.390		19,70%		1.305.793.390			0,00%	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					-				-		99.998.770			-				-					
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	1,00	99.998.770	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					-				-		5.080.640.058			1.258.793.390				1.258.793.390					
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00		-	-	,00		-	35,00	4.980.706.558	11,67		1.258.793.390	33%	25,27%	11,67	1.258.793.390	0%		0,00%		
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	,00		-	-	,00		-	1,00	99.933.500	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					-				-		49.990.200			-				-					
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	,00		-	-	,00		-	1,00	49.990.200	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					-				-		264.128.000			-				-					
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	-	,00		-	-	,00		-	5,00	264.128.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					-				-		449.433.073			-				-					

	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	32.461.946	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	99.985.625	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	9.999.250	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	14.806.252	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	292.180.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		73.140.896		-				-				
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	73.140.896	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		611.732.503		47.000.000				47.000.000				
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	49.989.572	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	49.999.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	99.200.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	412.543.931	0,67	47.000.000	33%	11,39%	0,67	47.000.000	0%	0,00%		

	8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-		-		4.593.448.938		770.658.133		16,78%		770.658.133		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-		-		30.000.000		-				-				
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	- ,00		-	- ,00		1,00	15.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00		-	- ,00		1,00	15.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-		-		3.924.797.249		731.658.133				731.658.133				
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00		-	- ,00		36,00	3.894.803.209	12,00	731.658.133	33%	18,79%	12,00	731.658.133	0%	0,00%		
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00		-	- ,00		1,00	14.998.040	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	- ,00		-	- ,00		2,00	14.996.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-		-		208.471.000		-				-				
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00		-	- ,00		1,00	30.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00		-	- ,00		1,00	10.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	168.471.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		395.203.191		39.000.000				39.000.000				
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	9.990.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	49.998.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	12.100.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	323.115.191	1,33	39.000.000	33%	12,07%	1,33	39.000.000	0%	0,00%		
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		34.977.498		-				-				
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	34.977.498	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		53.457.597.384		20.317.729.090		38,01%		20.317.729.090		0,00%	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		596.146.646		-				-				
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	50.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	72.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	40.000.250	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	833.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	92.888.056	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	340.425.340	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		42.904.644.868		17.391.729.090				17.391.729.090					
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	986,00	42.724.645.198	25,00	17.391.729.090	3%	40,71%	25,00	17.391.729.090	0%	0,00%		
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	100.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	79.999.670	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-		487.000.000		-				-				
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	300.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	187.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		3.254.638.465		-				-				
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	221.378.195	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	76.129.201	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	288.717.460	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	49.999.609	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	143.869.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	2.474.545.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		5.915.175.800		2.926.000.000				2.926.000.000				
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	29.999.100	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	199.976.700	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	5.685.200.000	1,33	2.926.000.000	67%	51,47%	1,33	2.926.000.000	0%	0,00%		
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		299.991.605		-				-				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	299.991.605	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		6.083.315.390		2.611.522.892		42,93%		2.611.522.892		0,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		16.960.000		-				-				
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	8.480.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	8.480.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		4.605.338.715		1.948.782.892				1.948.782.892				
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	38,00	4.381.078.715	12,67	1.948.782.892	33%	44,48%	12,67	1.948.782.892	0%	0,00%		
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	139.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	85.260.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-			-		47.410.000		47.410.000					47.410.000				
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	47.410.000	1,00	47.410.000	50%	100,00%	1,00	47.410.000		0%	0,00%		
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		332.391.000		-					-				
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	42.330.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	105.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	40,00	185.061.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		963.485.675		572.800.000					572.800.000				
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	18.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	12,00	28.800.000	6,00	7.200.000	50%	25,00%	6,00	7.200.000		0%	0,00%		
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	12,00	916.685.675	12,00	565.600.000	100%	61,70%	12,00	565.600.000		0%	0,00%		
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		117.730.000		42.530.000					42.530.000				

	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	117.730.000	1,00	42.530.000	33%	36,13%	1,00	42.530.000	0%	0,00%		
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		6.476.023.880		1.849.424.892		28,56%		1.849.424.892		0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		8.800.000		-				-				
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	8.800.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.529.053.775		910.574.892				910.574.892				
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	31,00	3.529.053.775	- ,00	910.574.892	0%	25,80%	- ,00	910.574.892	0%	0,00%		
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		402.206.000		-				-				
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	300.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	2.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	17,00	100.206.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		2.510.963.105		938.850.000				938.850.000				
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	4.500.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00		-	- ,00	-	3,00	2.506.463.105	- ,00	938.850.000	0%	37,46%	- ,00	938.850.000	0%	0,00%		
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-		-		25.001.000		-				-				
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00		-	- ,00	-	2,00	25.001.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-		-		3.099.317.278		947.825.851		30,58%		947.825.851		0,00%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-		-		10.000.000		-				-				
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	- ,00		-	- ,00	-	1,00	10.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-		-		2.309.148.937		677.325.851				677.325.851				
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00		-	- ,00	-	20,00	2.294.149.212	13,33	677.325.851	67%	29,52%	13,33	677.325.851	0%	0,00%		
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	- ,00		-	- ,00	-	4,00	14.999.725	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-		-		370.968.341		100.000.000				100.000.000				
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00		-	- ,00	-	1,00	9.514.050	1,00	9.500.000	100%	99,85%	1,00	9.500.000	0%	0,00%		
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	- ,00		-	- ,00	-	1,00	4.998.291	1,00	4.900.000	100%	98,03%	1,00	4.900.000	0%	0,00%		

	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	195.800.000	0,67	55.600.000	33%	28,40%	0,67	55.600.000	0%	0,00%		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	160.656.000	0,33	30.000.000	33%	18,67%	0,33	30.000.000	0%	0,00%		
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		409.200.000		170.500.000				170.500.000				
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	409.200.000	0,67	170.500.000	67%	41,67%	0,67	170.500.000	0%	0,00%		
	1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		4.487.601.261		1.181.768.864		26,33%		1.181.768.864		0,00%	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.670.962.858		1.030.768.864				1.030.768.864				
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	29,00	3.670.962.858	9,67	1.030.768.864	33%	28,08%	9,67	1.030.768.864	0%	0,00%		
	1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		247.848.000		-				-				
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	150.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	97.848.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		488.802.279		151.000.000				151.000.000				
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	10.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	9.453.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	469.349.279	0,33	151.000.000	33%	32,17%	0,33	151.000.000	0%	0,00%		
	1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		79.988.124		-				-				
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	79.988.124	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		4.060.752.812		1.141.629.349		28,11%		1.141.629.349		0,00%	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.351.281.971		964.629.349				964.629.349				
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	30,00	3.351.281.971	10,00	964.629.349	33%	28,78%	10,00	964.629.349	0%	0,00%		
	2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		183.412.341		-				-				
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	13.631.500	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	4.066.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	90.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	5.480.841	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	12.800.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	57.434.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		506.058.500		177.000.000				177.000.000				

	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	24.840.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	3.630.500	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	477.588.000	0,67	177.000.000	33%	37,06%	0,67	177.000.000	0%	0,00%		
	2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		20.000.000		-				-				
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	20.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				-			-		3.726.544.359		989.914.586		26,56%		989.914.586		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				-			-		7.720.000		-				-				
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	3.860.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	3.860.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		3.151.214.788		916.914.586				916.914.586				
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	28,00	3.136.464.788	18,67	916.914.586	67%	29,23%	18,67	916.914.586	0%	0,00%		

	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	14.750.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		108.492.168			-					-				
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	7.500.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	3.226.168	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	97.766.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				-			-		69.604.308			-					-				
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	69.604.308	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		376.473.095		73.000.000				73.000.000					
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	4.500.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	6.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	365.973.095	2,00	73.000.000	67%	19,95%	2,00	73.000.000	0%	0,00%			
	2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		13.040.000			-					-				
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	9.750.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	3.290.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		5.579.352.107		1.499.929.190		26,88%		1.499.929.190		0,00%	DISTRIK SARMI	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.877.835.718		1.096.929.190				1.096.929.190				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	37,00	3.877.835.718	- ,00	1.096.929.190	0%	28,29%	- ,00	1.096.929.190	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		293.939.000		-				-				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	105.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	16.999.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	15,00	171.940.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		1.392.115.389		403.000.000				403.000.000				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	4.500.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	36.015.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	48.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	1.303.600.389	- ,00	403.000.000	0%	30,91%	- ,00	403.000.000	0%	0,00%		

	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		15.462.000		-				-				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	15.462.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		3.760.696.719		989.023.144		26,30%		989.023.144		0,00%	DISTRIK BONGGO TIMUR	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		2.768.532.410		687.023.144				687.023.144				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	34,00	2.768.532.410	- ,00	687.023.144	0%	24,82%	- ,00	687.023.144	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		290.124.750		79.140.000				79.140.000				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	22.668.750	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	119.016.000	- ,00	9.000.000	0%	7,56%	- ,00	9.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	3.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	145.440.000	- ,00	70.140.000	0%	48,23%	- ,00	70.140.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		696.984.559		222.860.000				222.860.000				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	3.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	4.725.150	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	689.259.409	- ,00	222.860.000	0%	32,33%	- ,00	222.860.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		5.055.000		-				-				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	5.055.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		3.659.736.081		1.089.158.872		29,76%		1.089.158.872		0,00%	DISTRIK PANTAI TIMUR	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		2.292.924.311		676.858.872				676.858.872				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	26,00	2.292.924.311	- ,00	676.858.872	0%	29,52%	- ,00	676.858.872	0%	0,00%		
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			-		-		89.276.496		13.000.000				13.000.000				
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	89.276.496	- ,00	13.000.000	0%	14,56%	- ,00	13.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		206.190.630		20.000.000				20.000.000				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	33.625.880	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	90.924.750	- ,00	20.000.000	0%	22,00%	- ,00	20.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	81.640.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		1.071.344.644		379.300.000				379.300.000				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	6.000.000	- ,00	1.000.000	0%	16,67%	- ,00	1.000.000	0%	0,00%		

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.065.344.644	- ,00	378.300.000	0%	35,51%	- ,00	378.300.000	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		4.858.435.628		1.285.105.936		26,45%		1.285.105.936		0,00%	DISTRIK PANTAI BARAT	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.372.735.873		954.605.936				954.605.936				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	25,00	3.372.735.873	- ,00	954.605.936	0%	28,30%	- ,00	954.605.936	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		145.431.575		-				-				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	15.573.575	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	49.998.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	79.860.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		1.300.286.158		330.500.000				330.500.000				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	25,00	23.194.124	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	9.014.125	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	1.268.077.909	- ,00	330.500.000	0%	26,06%	- ,00	330.500.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		39.982.022		-				-				

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	39.982.022	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		3.589.919.255		2.013.088.766		56,08%		2.013.088.766		0,00%	DISTRIK TOR ATAS	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		2.479.638.497		1.266.624.156				1.266.624.156				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	29,00	2.479.638.497	- ,00	1.266.624.156	0%	51,08%	- ,00	1.266.624.156	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		390.867.760		187.300.000				187.300.000				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	189.250.160	- ,00	8.300.000	0%	4,39%	- ,00	8.300.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	39.990.000	- ,00	39.000.000	0%	97,52%	- ,00	39.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	21.602.600	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	140.025.000	- ,00	140.000.000	0%	99,98%	- ,00	140.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		666.164.610		551.664.610				551.664.610				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	666.164.610	- ,00	551.664.610	0%	82,81%	- ,00	551.664.610	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		53.248.388		7.500.000				7.500.000				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	53.248.388	- ,00	7.500.000	0%	14,08%	- ,00	7.500.000	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		4.869.503.999		1.328.121.819		27,27%		1.328.121.819		0,00%	DISTRIK BONGGO	

	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		18.000.000		-				-				
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	18.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.262.010.869		876.321.819				876.321.819				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	3.262.010.869	- ,00	876.321.819	0%	26,86%	- ,00	876.321.819	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		204.000.000		28.000.000				28.000.000				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	150.000.000	- ,00	16.000.000	0%	10,67%	- ,00	16.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	54.000.000	- ,00	12.000.000	0%	22,22%	- ,00	12.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		15.093.130		-				-				
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	8,00	15.093.130	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		1.370.400.000		423.800.000				423.800.000				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	1.370.400.000	- ,00	423.800.000	0%	30,93%	- ,00	423.800.000	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		3.223.602.563		1.104.926.791		34,28%		1.104.926.791		0,00%	DISTRIK APAWER HULU	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		2.082.933.118		588.257.791				588.257.791				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	22,00	2.068.933.118	- ,00	581.257.791	0%	28,09%	- ,00	581.257.791	0%	0,00%		

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	14.000.000	- ,00	7.000.000	0%	50,00%	- ,00	7.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		279.277.600		147.500.000				147.500.000				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	199.995.000	- ,00	108.000.000	0%	54,00%	- ,00	108.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	5.022.600	- ,00	2.500.000	0%	49,78%	- ,00	2.500.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	74.260.000	- ,00	37.000.000	0%	49,82%	- ,00	37.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			-		-		21.269.323		21.269.000				21.269.000				
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	21.269.323	- ,00	21.269.000	0%	100,00%	- ,00	21.269.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		840.122.522		347.900.000				347.900.000				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	16.485.000	- ,00	8.000.000	0%	48,53%	- ,00	8.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	823.637.522	- ,00	339.900.000	0%	41,27%	- ,00	339.900.000	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		4.047.588.751		1.950.614.975		48,19%		1.950.614.975		0,00%	DISTRIK SARMI TIMUR	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		3.069.775.904		1.466.319.975				1.466.319.975				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	22,00	3.049.786.529	- ,00	1.453.119.975	0%	47,65%	- ,00	1.453.119.975	0%	0,00%		

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	19.989.375	-	,00	13.200.000	0%	66,04%	-	,00	13.200.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				-			-		19.507.500			-					-				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	27,00	19.507.500	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		201.538.975		28.750.000					28.750.000				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	9.983.475	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	39.151.860	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	19.906.537	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	50.025.000	-	,00	10.000.000	0%	19,99%	-	,00	10.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	19.972.103	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	62.500.000	-	,00	18.750.000	0%	30,00%	-	,00	18.750.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		706.982.162		455.545.000					455.545.000				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	4.740.000	-	,00	1.185.000	0%	25,00%	-	,00	1.185.000	0%	0,00%		

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	6.900.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	695.342.162	- ,00	454.360.000	0%	65,34%	- ,00	454.360.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		49.784.210		-				-				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	35.041.947	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	14.742.263	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		2.846.482.176		889.842.883		31,26%		889.842.883		0,00%	DISTRIK SARMI SELATAN	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		25.888.918		-				-				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	25.888.918	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			-		-		2.016.655.362		590.342.883				590.342.883				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	- ,00	-	- ,00	-	17,00	2.016.655.362	- ,00	590.342.883	0%	29,27%	- ,00	590.342.883	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			-		-		128.723.598		32.000.000				32.000.000				

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	80.708.375	- ,00	25.000.000	0%	30,98%	- ,00	25.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	18.015.223	- ,00	7.000.000	0%	38,86%	- ,00	7.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	30.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		643.220.945		259.500.000				259.500.000				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	10.050.000	- ,00	3.000.000	0%	29,85%	- ,00	3.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	36.819.900	- ,00	12.800.000	0%	34,76%	- ,00	12.800.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	596.351.045	- ,00	243.700.000	0%	40,87%	- ,00	243.700.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			-		-		31.993.353		8.000.000				8.000.000				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	31.993.353	- ,00	8.000.000	0%	25,01%	- ,00	8.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		5.145.650.595		1.003.160.207		19,50%		1.003.160.207		0,00%	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			-		-		14.120.000		-				-				
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	8.800.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	5.320.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				-			-		3.470.887.204		951.902.207				951.902.207				
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	,00	-	-	,00	-	37,00	3.453.667.204	-	,00	951.902.207	0%	27,56%	-	,00	951.902.207	0%	0,00%		
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	12,00	17.220.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				-			-		189.569.365		29.481.000				29.481.000				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	14.961.765	-	,00	4.470.000	0%	29,88%	-	,00	4.470.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	104.970.000	-	,00	21.000.000	0%	20,01%	-	,00	21.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	14.977.600	-	,00	4.011.000	0%	26,78%	-	,00	4.011.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	54.660.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		1.406.372.526		6.000.000				6.000.000				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	12.000.000	-	,00	3.000.000	0%	25,00%	-	,00	3.000.000	0%	0,00%		

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	12.000.000	-	,00	3.000.000	0%	25,00%	-	,00	3.000.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	1.382.372.526	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				-			-		64.701.500			15.777.000					15.777.000				
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	19.827.500	-	,00	4.977.000	0%	25,10%	-	,00	4.977.000	0%	0,00%		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	44.874.000	-	,00	10.800.000	0%	24,07%	-	,00	10.800.000	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
	1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				-			-		115.709.404.565			10.868.300.000		9,39%			10.868.300.000		0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**				-			-		54.249.326.324			5.286.600.000					5.286.600.000				
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.064.795.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	-	,00	-	-	,00	-	8,00	4.335.014.200	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	7,00	1.469.395.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	2.642.770.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	326.145.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	150,00	621.141.997	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	347,00	13.363.200.000	231,33	5.286.600.000	67%	39,56%	231,33	5.286.600.000	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	230,00	1.333.707.900	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	68,00	1.854.317.480	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	69,00	9.079.058.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	140,00	199.999.800	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	1.019.580.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	30,00	716.312.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	#######	5.599.988.728	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			-		-		3.410.035.200		-		0,00%		-		0,00%		
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	68,00	917.999.144	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	- ,00	-	- ,00	-	6,00	4.404.310.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	920,00	1.300.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	591.556.875	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			-		-		19.790.294.848		2.348.000.000				2.348.000.000				
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	744.061.300	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	889.310.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	649.850.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	300.700.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	#######	300.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	300,00	863.178.406	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	258,00	5.300.958.125	- ,00	2.348.000.000	0%	44,29%	- ,00	2.348.000.000	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	160,00	579.186.389	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	15,00	779.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	22,00	5.134.826.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	30,00	149.999.448	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	200,00	468.173.541	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	22,00	316.850.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	- ,00	-	- ,00	-	#######	1.377.637.800	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	#######	672.804.475	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	500.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	763.759.364	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			-		-		8.920.989.212		275.700.000				275.700.000				
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	300.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	489.217.500	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	560,00	690.420.034	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	#######	600.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	21,00	586.800.000	- ,00	275.700.000	0%	46,98%	- ,00	275.700.000	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	240,00	690.301.678	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	54,00	1.301.963.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	419.580.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	- ,00	-	- ,00	-	6,00	3.842.707.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			-		-		5.735.469.228		1.498.400.000				1.498.400.000				

	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	50,00	69.999.628	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	549.470.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	320,00	79.999.600	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	-	,00	-	-	,00	-	450,00	5.036.000.000	-	,00	1.498.400.000	0%	29,75%	-	,00	1.498.400.000	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**				-			-		11.903.689.953			1.459.600.000					1.459.600.000				
	1.01.02.3.05.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	2.201.758.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.101.182.930	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik)	-	,00	-	-	,00	-	#######	250.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	199.999.710	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	125,00	2.976.000.000	-	,00	1.459.600.000	0%	49,05%	-	,00	1.459.600.000	0%	0,00%		

	1.01.02.3.05.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	75,00	149.999.313	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	22,00	578.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.05.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	4.446.750.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.06	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**			-		-		2.747.598.000		-				-				
	1.01.02.3.06.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	1.640.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.06.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	250,00	250.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.06.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	857.598.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.08	**Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota**	undefined (undefined)-1438		-	- ,00	-	- ,00	12.362.037.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.02.3.08.0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan Pendidikan)	- ,00	-	- ,00	-	72,00	12.362.037.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.01.06	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**			-		-		334.668.866		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

	1.01.06.2.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		334.668.866		-				-				
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Peserta Didik)	- ,00	-	- ,00	-	140,00	334.668.866	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			-		-		5.109.822.580		478.600.000		9,37%		478.600.000		0,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		4.109.899.830		-				-				
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	1.200.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	110,00	109.900.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	2.799.999.830	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		999.922.750		478.600.000				478.600.000				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	150.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	170,00	400.000.000	-	,00	21.000.000	0%	5,25%	-	,00	21.000.000	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	12,00	449.922.750	-	,00	457.600.000	0%	101,71%	-	,00	457.600.000	0%	0,00%		
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				-			-		61.459.438.238		1.162.320.000		1,89%			1.162.320.000		0,00%	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		23.795.202.770		-					-				
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	2.651.680.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	18,00	8.656.910.820	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	1.437.916.114	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	14,00	2.750.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	269.350.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	100,00	7.479.346.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	-	,00	-	-	,00	-	44,00	549.999.836	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		34.606.074.318		1.162.320.000				1.162.320.000					
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	600,00	500.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	500,00	500.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	500,00	549.999.816	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	#######	349.999.530	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	100,00	149.999.498	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	#######	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	#######	299.996.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			-		-		150.000.000		-		0,00%		-		0,00%		
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	#######	206.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	120,00	400.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	325,00	200.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	200.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	200.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	1.999.999.200	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	249.999.869	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	199.999.250	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	2,00	150.000.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	2,00	251.999.929	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	2,00	2.121.964.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	4,00	430.000.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	4,00	8.699.922.093	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	11,00	12.152.569.000	7,33	1.162.320.000		67%	9,56%	7,33	1.162.320.000			0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	4,00	2.585.633.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	-	,00		-	-	,00		-	300,00	300.000.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	-	,00		-	-	,00		-	95,00	300.000.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		

	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	#######	800.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	199.999.914	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	257.993.219	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.3.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		3.058.161.150		-				-				
	1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	400.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.3.02.0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik (Unit/Fasyankes)	- ,00	-	- ,00	-	11,00	100.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.3.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	1.808.161.150	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.3.02.0064	Penanggulangan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	130.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.3.02.0065	Penanggulangan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	130.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.02.3.02.0067	Penanggulangan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	130.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.02.02.3.02.0068	Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	360.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			-		-		1.100.000.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**			-		-		600.000.000		-				-				
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	40,00	600.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		500.000.000		-				-				
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	500.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			-		-		699.999.139		-		0,00%		-		0,00%	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		699.999.139		-				-				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	699.999.139	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	

	1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			-		-		4.512.091.096		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		4.512.091.096		-				-				
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	- ,00	-	- ,00	-	25,00	4.512.091.096	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			-		-		1.000.000.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		1.000.000.000		-				-				
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	1.000.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			-		-		1.500.000.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		1.500.000.000		-				-				
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata (Kawasan)	- ,00	-	- ,00	-	27,00	1.500.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			-		-		23.913.035.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**			-		-		23.913.035.000		-				-				
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	- ,00	-	- ,00	-	17,00	20.413.035.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	- ,00		-	- ,00		-	11,00	2.500.000.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	- ,00		-	- ,00		-	11,00	1.000.000.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				-			-		450.000.000			-		0,00%			-	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**				-			-		450.000.000			-					-			
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	- ,00		-	- ,00		-	2,00	450.000.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																				
	1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				-			-		11.345.744.000			-		0,00%			-	0,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				-			-		28.540.000			-					-			
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	- ,00		-	- ,00		-	27,00	28.540.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**				-			-		10.743.500.000			-					-			
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	- ,00		-	- ,00		-	27,00	10.743.500.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**				-			-		573.704.000			-					-			

	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	27,00	573.704.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				-			-		1.169.893.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**				-			-		169.893.000			-					-				
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	169.893.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**				-			-		1.000.000.000			-					-				
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	-	,00	-	-	,00	-	30,00	1.000.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				-			-		534.500.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				-			-		28.000.000			-					-				
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	28.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.04.05.3.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**				-			-		506.500.000			-					-				
	1.04.05.3.01.0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik (Unit Rumah)	-	,00	-	-	,00	-	27,00	506.500.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																					
	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				-			-		466.354.921		48.500.000		10,40%		48.500.000		0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		166.380.000		48.500.000				48.500.000				
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	49.980.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	116.400.000	- ,00	48.500.000	0%	41,67%	- ,00	48.500.000	0%	0,00%		
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**			-		-		299.974.921		-				-				
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	299.974.921	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			-		-		224.800.000		77.000.000		34,25%		77.000.000		0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		224.800.000		77.000.000				77.000.000				

	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	184.800.000	-	,00	77.000.000	0%	41,67%	-	,00	77.000.000	0%	0,00%		
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	6,00	40.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																				
	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				-		-		768.947.732		-		0,00%		-		0,00%	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**				-		-		690.187.072		-				-				
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	-	,00	-	-	,00	-	250,00	690.187.072	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				-		-		78.760.660		-				-				
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	150,00	78.760.660	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				-		-		506.547.906		-		0,00%		-		0,00%	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**				-		-		406.549.980		-				-				

	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	250,00	221.919.539	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	250,00	184.630.441	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**			-		-		99.997.926		-				-				
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	150,00	99.997.926	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			-		-		653.378.651		-		0,00%		-		0,00%	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		653.378.651		-				-				
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	- ,00	-	- ,00	-	200,00	653.378.651	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			-		-		136.255.407		-		0,00%		-		0,00%	DINAS SOSIAL	

	1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**			-		-		136.255.407		-				-				
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	150,00	136.255.407	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
	2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			-		-		1.039.022.392		-		0,00%		-		0,00%	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**			-		-		1.039.022.392		-				-				
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	139.024.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	899.998.392	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			-		-		668.278.940		-		0,00%		-		0,00%	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		22.520.000		-				-				
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	22.520.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		645.758.940		-				-				
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	22.936.056	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	22.962.084	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	#######	599.860.800	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
	2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			-		-		249.998.375		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**			-		-		99.999.133		-				-				
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	99.999.133	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**			-		-		149.999.242		-				-				

	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	149.999.242	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				-		-		149.999.328			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**				-		-		49.999.500			-					-				
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	49.999.500	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				-		-		99.999.828			-					-				
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	99.999.828	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				-		-		99.999.505			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**			-		-		99.999.505		-				-				
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		99.999.505		-		0,00%		-		0,00%		
	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			-		-		199.999.260		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		149.999.260		-				-				
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	149.999.260	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		50.000.000		-				-				
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Layanan)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	50.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
	2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**			-		-		939.999.680		-		0,00%		-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah lumbung Pangan yang tersedia (unit)-1435		-	- ,00	-	4,00	939.999.680	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	939.999.680	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				-			-		930.000.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	jumlah pemberdayaan kelompok masya rakat dlm penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (laporan)-1436			-	-	,00	-	1,00	930.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	930.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				-			-		930.000.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	jumlah pengadaan,pengelol aan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota (kelompok)-1437			-	-	,00	-	6,00	930.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	930.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																					
	2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**				-			-		7.354.000.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

	2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		7.354.000.000		-				-				
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	7.300.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	54.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			-		-		1.399.998.537		-		0,00%		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**			-		-		1.399.998.537		-				-				
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	699.999.202	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	699.999.335	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			-		-		1.963.405.591		-		0,00%		-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**			-		-		330.041.771		-				-				

	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	330.041.771	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				-			-		1.633.363.820			-					-				
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.633.363.820	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				-			-		140.496.142			-		0,00%			-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**				-			-		140.496.142			-					-				
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	-	,00	-	-	,00	-	12,00	140.496.142	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				-			-		61.837.185			-		0,00%			-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		61.837.185			-					-				
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	12.736.185	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	49.101.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				-		-		401.432.285		-		0,00%			-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				-		-		401.432.285		-					-				
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	200.263.802	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	-	,00	-	-	,00	-	50,00	201.168.483	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				-		-		41.200.000		-		0,00%			-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**				-		-		41.200.000		-					-				

	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	41.200.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				-			-		1.913.797.002			-		0,00%			-		0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**				-			-		1.913.797.002			-					-				
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	11,00	813.996.506	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	20,00	899.800.496	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				-			-		550.000.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**				-			-		550.000.000			-					-				
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	350.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	100.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	-	,00	100.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				-			-			350.000.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**				-			-			350.000.000			-					-				
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00		350.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
	2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**				-			-			299.940.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**				-			-			299.940.000			-					-				
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	-	,00	-	-	,00	-	25,00	299.940.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				-			-			455.778.920			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**				-			-			455.778.920			-					-				
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	114,00	225.737.440	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	114,00	230.041.480	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			-		-		2.108.443.403		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		2.108.443.403		-				-				
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	- ,00	-	- ,00	-	92,00	508.453.403	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	105,00	1.599.990.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			-		-		300.399.475		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			-		-		99.999.475		-				-				

	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	99.999.475	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		200.400.000			-				-				
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	80.400.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	120.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				-			-		3.803.747.319			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**				-			-		1.059.998.583			-					-				
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	59.999.513	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	150.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	250.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	300.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	99.999.070	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**				-			-		961.000.000			-					-				

	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	400.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	276,00	561.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				-		-		1.063.498.736		-				-					
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	379,00	185.999.500	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	12,00	14.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	50,00	100.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	13.500.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	20,00	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	50,00	150.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	50,00	199.999.236	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				-		-		719.250.000			-				-				
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	21,00	656.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	-	,00	-	-	,00	-	6,00	63.250.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				-		-		855.000.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				-		-		330.000.000			-					-					

	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	130.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	100,00	200.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			-		-		525.000.000		-				-				
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	- ,00	-	- ,00	-	282,00	282.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	- ,00	-	- ,00	-	94,00	243.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
	2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			-		-		1.199.828.874		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			-		-		999.961.624		-				-				
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	427.965.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	571.996.624	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**			-		-		199.867.250		-				-				
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	199.867.250	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			-		-		999.992.975		-		0,00%		-		0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		999.992.975		-				-				

	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	-	,00	-	-	,00	-	36,00	999.992.975	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																				
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**					-		-		32.049.375		-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
	2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan (Unit Usaha)-1430			-	-	,00	-	43,00	32.049.375	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	-	,00	-	-	,00	-	43,00	32.049.375	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**					-		-		822.134.091		-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah unit usaha mikro yang diberdayakan (Unit)-1431			-	-	,00	-	10,00	822.134.091	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	51.495.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	770.639.091	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.17.09	**PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI**					-		-		29.242.000		-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	

	2.17.09.3.01	**Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.**			-		-		29.242.000		-				-				
	2.17.09.3.01.0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi (Kelompok)	- ,00	-	- ,00	-	35,00	29.242.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			-		-		102.954.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)-1427		-	- ,00	-	1,00	102.954.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	102.954.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			-		-		102.741.625		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)-1428		-	- ,00	-	17,00	102.741.625	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	- ,00	-	- ,00	-	17,00	102.741.625	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			-		-		103.978.875		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yangDiolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)-1429		-	- ,00	-	1,00	103.978.875	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	103.978.875	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			-		-		563.544.090		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**			-		-		563.544.090		-				-				

	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	20,00	563.544.090	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				-			-		865.167.804			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		85.187.837			-					-				
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	-	,00	85.187.837	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**				-			-		590.000.000			-					-				
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	590.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				-			-		189.979.967			-					-				
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	189.979.967	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																					
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				-			-		81.996.898			-		0,00%			-		0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		81.996.898			-					-				

	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	81.996.898	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				-		-		67.920.793			-		0,00%			-		0,00%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				-		-		67.920.793			-					-				
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	67.920.793	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				
	2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**				-		-		379.998.080			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**				-		-		379.998.080			-					-				
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	540,00	199.999.020	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	-	,00	-	-	,00	-	65,00	179.999.060	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**				-		-		85.000.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				-		-		85.000.000			-					-				

	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	85.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				-			-		229.901.850			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**				-			-		229.901.850			-					-				
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	-	,00	-	-	,00	-	15,00	99.999.920	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	-	,00	-	-	,00	-	16,00	129.901.930	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																					
	2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				-			-		2.099.841.987			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		1.549.844.378			-					-				
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	-	,00	-	-	,00	-	65,00	289.500.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	149.998.633	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	90,00	199.999.169	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	40,00	148.000.558	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	-	,00	-	-	,00	-	#######	762.346.018	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		549.997.609			-					-				
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	-	,00	-	-	,00	-	20,00	199.998.357	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	50,00	149.999.916	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	-	,00	-	-	,00	-	25,00	199.999.336	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																				
	2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				-			-		283.226.428			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		92.900.000			-					-				

	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	92.900.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**			-		-		190.326.428		-				-				
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	190.326.428	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			-		-		1.699.984.581		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Tersedianya jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia, jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia,Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (unit)-1418		-	- ,00	-	4,00	399.997.848	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	99.999.888	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	299.997.960	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya, Tersedianya jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (65 Kelompok)-1419		-	- ,00	-	- ,00	899.987.920	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	50,00	599.994.880	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	- ,00	-	- ,00	-	5,00	299.993.040	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan, Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)-1420		-	- ,00	-	1,00	199.999.129	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	199.999.129	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.25.03.2.04	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha tangkap yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)-1421		-	- ,00	-	1,00	199.999.684	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	199.999.684	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				-		-		1.099.963.375			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Tersedianya jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (21 Kelompok)-1422			-	-	,00	-	-	,00	799.982.810	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	299.990.347	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	-	,00	-	-	,00	-	20,00	299.996.666	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	199.995.797	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Tersedianya jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Unit)-1423			-	- ,00		-	16,00	299.980.565	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	- ,00		-	- ,00		-	5,00	299.980.565	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				-			-		1.399.916.731			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERIKANAN	
	3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Tersedianya jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah usaha pelaku perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi (Unit)-1424			-	- ,00		-	3,00	699.995.056	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	- ,00		-	- ,00		-	1,00	699.995.056	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.25.06.3.04	**Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	Tersedianya jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (Unit Usaha)-1425			-	- ,00		-	5,00	299.999.339	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		

	3.25.06.3.04.0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (Unit Usaha)	- ,00		- ,00		5,00	299.999.339	- ,00		0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	3.25.06.3.06	**Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil**	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (kg/kap/t ahun)-1426			- ,00		200,00	399.922.336	- ,00		0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	3.25.06.3.06.0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (kg/kap/tahun)	- ,00		- ,00		200,00	399.922.336	- ,00		0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
	3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**							1.399.991.995				0,00%				0,00%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Orang 5 Unit)-1414			- ,00		40,00	499.998.087	- ,00		0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	- ,00		- ,00		40,00	499.998.087	- ,00		0%	0,00%	- ,00		0%	0,00%		

	3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan TahapanPengembangan(Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi (Unit)-1415		-	- ,00	-	6,00	899.993.908	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	899.993.908	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			-		-		1.299.974.500		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	- Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)-1416		-	- ,00	-	40,00	799.991.388	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	40,00	799.991.388	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)-1417		-	- ,00	-	40,00	499.983.112	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	- ,00		-	- ,00		-	40,00	499.983.112	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					
	3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				-			-		4.788.089.500			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**				-			-		3.261.734.000			-					-				
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	- ,00		-	- ,00		-	1,00	665.281.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	- ,00		-	- ,00		-	1,00	268.020.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	- ,00		-	- ,00		-	1,00	947.400.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	- ,00		-	- ,00		-	#######	495.437.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	- ,00		-	- ,00		-	#######	885.596.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		
	3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**				-			-		241.048.000			-					-				
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	- ,00		-	- ,00		-	1,00	241.048.000	- ,00		-	0%	0,00%	- ,00		-	0%	0,00%		

	3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		345.327.500		-				-				
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	345.327.500	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**			-		-		939.980.000		-				-				
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	- ,00	-	- ,00	-	610,00	939.980.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			-		-		416.565.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**			-		-		416.565.000		-				-				
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	- ,00	-	- ,00	-	13,00	416.565.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			-		-		399.990.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**			-		-		399.990.000		-				-				
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	399.990.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			-		-		329.755.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**			-		-		329.755.000		-				-				

	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	-	,00	-	-	,00	-	30,00	329.755.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				-		-		2.227.294.210		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**				-		-		2.227.294.210		-				-				
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	466.194.160	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	951.358.750	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	809.741.300	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				-		-		150.170.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
	3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah laporan pengendalian stok yang tersedia (Laporan)-1432			-	-	,00	-	1,00	150.170.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	150.170.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				-		-		1.999.998.000		-		0,00%		-		0,00%	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
	3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				-		-		1.999.998.000		-				-					

	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.999.998.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				-			-		63.376.000			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah alat ukur pelaksanaan metrologi legal yang tersedia (Unit)-1433			-	-	,00	-	50,00	63.376.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	50,00	63.376.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				-			-		69.899.940			-		0,00%			-		0,00%	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
	3.31.02.2.01	**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Unit)-1434			-	-	,00	-	1,00	69.899.940	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	69.899.940	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		SEKRETARIAT DAERAH																				
	4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				-			-		24.338.300.000		12.410.000.000		50,99%		12.410.000.000			0,00%	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**				-			-		14.188.300.000		8.000.000.000				8.000.000.000					
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.300.000.000	-	,00	1.100.000.000	0%	84,62%	-	,00	1.100.000.000	0%	0,00%		
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	1.200.000.000	-	,00	300.000.000	0%	25,00%	-	,00	300.000.000	0%	0,00%		

	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	11.688.300.000	-	,00	6.600.000.000	0%	56,47%	-	,00	6.600.000.000	0%	0,00%		
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**				-			-		9.450.000.000			3.660.000.000					3.660.000.000				
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	9.450.000.000	-	,00	3.660.000.000	0%	38,73%	-	,00	3.660.000.000	0%	0,00%		
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**				-			-		700.000.000			750.000.000					750.000.000				
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	200,00	200.000.000	-	,00	150.000.000	0%	75,00%	-	,00	150.000.000	0%	0,00%		
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	300.000.000	-	,00	600.000.000	0%	200,00%	-	,00	600.000.000	0%	0,00%		
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				-			-		999.999.259			1.349.999.259		135,00%			1.349.999.259		0,00%	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				-			-		999.999.259			1.349.999.259					1.349.999.259				
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	300.000.000	-	,00	350.000.000	0%	116,67%	-	,00	350.000.000	0%	0,00%		

	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	350.000.000	- ,00	700.000.000	0%	200,00%	- ,00	700.000.000	0%	0,00%		
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	20,00	349.999.259	- ,00	299.999.259	0%	85,71%	- ,00	299.999.259	0%	0,00%		
		SEKRETARIAT DPRD																	
	4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			-		-		27.532.290.858		11.643.332.546		42,29%		11.643.332.546		0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**			-		-		2.260.484.514		-				-				
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	598.611.006	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	885.048.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	299.985.508	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	400.000.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	76.840.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			-		-		888.591.475		-				-				
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	54.617.527	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	54.517.527	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	298.945.207	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	296.869.207	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	57.900.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	125.742.007	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**				-			-		9.145.087.785		1.993.195.226				1.993.195.226					
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	2.659.736.968	-	,00	733.496.380	0%	27,58%	-	,00	733.496.380	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	3.023.872.839	-	,00	696.139.061	0%	23,02%	-	,00	696.139.061	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	933.245.656	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	933.245.656	-	,00	278.948.552	0%	29,89%	-	,00	278.948.552	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	933.245.656	-	,00	244.611.233	0%	26,21%	-	,00	244.611.233	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	410.146.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	52.800.000	-	,00	40.000.000	0%	75,76%	-	,00	40.000.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	198.795.010	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**				-			-		4.093.549.980		2.881.098.680					2.881.098.680				
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	876.875.000	-	,00	1.275.500.000	0%	145,46%	-	,00	1.275.500.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	2.455.708.000	-	,00	1.455.598.680	0%	59,27%	-	,00	1.455.598.680	0%	0,00%		
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	238.800.000	-	,00	70.000.000	0%	29,31%	-	,00	70.000.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	240.000.000	-	,00	50.000.000	0%	20,83%	-	,00	50.000.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	204.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	8.400.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	69.766.980	-	,00	30.000.000	0%	43,00%	-	,00	30.000.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				-			-		9.728.339.350		5.948.277.900					5.948.277.900				
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	704.835.000	-	,00	209.875.000	0%	29,78%	-	,00	209.875.000	0%	0,00%		
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	34.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	75,00	8.989.504.350	-	,00	5.738.402.900	0%	63,83%	-	,00	5.738.402.900	0%	0,00%		
	4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**				-			-		52.578.000		-					-				

	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	52.578.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**			-		-		1.363.659.754		820.760.740				820.760.740				
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	625.122.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	683.379.242	- ,00	820.760.740	0%	120,10%	- ,00	820.760.740	0%	0,00%		
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	55.158.512	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		PERENCANAAN																	
	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			-		-		5.821.395.990		-		0,00%		-		0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			-		-		2.599.997.948		-				-				
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	4,00	599.999.450	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	- ,00	-	- ,00	-	3,00	549.999.760	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	- ,00	-	- ,00	-	12,00	999.999.522	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	449.999.216	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			-		-		999.996.448		-				-				

	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	699.999.369	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	32,00	299.997.079	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				-			-		1.439.217.868			-					-				
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	487.799.206	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	6,00	951.418.662	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**				-			-		782.183.726			-					-				
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	282.183.726	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	500.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				-			-		2.749.992.955			-		0,00%			-		0,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				-			-		2.249.992.955			-					-				

	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	1.299.998.507	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	449.999.846	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	3,00	499.994.602	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				-			-		500.000.000			-				-				
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	500.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		KEUANGAN																				
	5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				-			-		162.923.833.567		38.966.346.155		23,92%		38.966.346.155		0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**				-			-		2.653.006.092		-					-				
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	49.997.770	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	46.607.290	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	30,00	135.432.254	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	60,00	134.989.060	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	30,00	99.978.424	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	30,00	134.990.328	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	799.997.660	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	899.999.750	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	99.999.201	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	51.032.410	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	49.982.143	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	30,00	149.999.802	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				-			-		1.049.956.358			-					-				

	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	30,00	99.995.490	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	240,00	149.962.830	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	199.999.340	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	112,00	249.980.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	45,00	49.987.465	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	-	,00		-	-	,00		-	41,00	300.031.233	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**					-				-		1.749.998.835				-						-				
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	-	,00		-	-	,00		-	4,00	49.999.695	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	10,00	50.000.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	-	,00		-	-	,00		-	20,00	300.000.000	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	-	,00		-	-	,00		-	6,00	549.999.580	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	-	,00		-	-	,00		-	2,00	699.999.560	-	,00		-	0%	0,00%	-	,00		-	0%	0,00%		

	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	50.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	50.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				-			-		157.270.874.802		38.966.346.155					38.966.346.155				
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	149.370.874.802	0,67	35.561.346.155	67%	23,81%	0,67	35.561.346.155	0%	0,00%		
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	7.900.000.000	0,67	3.405.000.000	67%	43,10%	0,67	3.405.000.000	0%	0,00%		
	5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**				-			-		199.997.480		-					-				
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	99.997.480	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	41,00	100.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				-			-		1.289.903.957		-		0,00%			-		0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				-			-		1.289.903.957		-					-				

	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	249.963.901	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	100.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	4,00	189.980.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	6,00	399.999.226	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	6,00	149.996.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	20,00	199.964.830	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				-			-		786.576.304		244.999.304		31,15%		244.999.304		0,00%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**				-			-		786.576.304		244.999.304				244.999.304				
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	244.999.304	5,00	244.999.304	100%	100,00%	5,00	244.999.304	0%	0,00%		
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	9,00	99.580.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	-	,00	-	-	,00	-	100,00	50.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		

	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	100,00	70.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	241.998.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	50.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	10,00	29.999.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		KEPEGAWAIAN																				
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				-		-		1.551.081.870			-		0,00%			-		0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				-		-		443.568.460			-					-				
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	340.587.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	102.981.460	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**				-		-		149.992.750			-					-				
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	60,00	149.992.750	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**				-		-		778.778.350			-					-				
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	-	,00	-	-	,00	-	35,00	49.998.350	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	728.780.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				-		-		178.742.310			-					-				

	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	10,00	178.742.310	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			-		-		1.680.873.212		-		0,00%		-		0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**			-		-		1.299.999.832		-				-				
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	80,00	1.299.999.832	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			-		-		380.873.380		-				-				
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	99.969.880	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	280.903.500	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
		INSPEKTORAT DAERAH																	
	6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			-		-		2.786.133.953		-		0,00%		-		0,00%	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**			-		-		2.386.134.453		-				-				
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	2,00	199.972.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	32,00	799.925.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	-	,00		-	-	,00	-	5,00	181.442.575	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	-	,00		-	-	,00	-	3,00	199.997.622	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	-	,00		-	-	,00	-	5,00	204.800.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	-	,00		-	-	,00	-	5,00	299.999.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	-	,00		-	-	,00	-	2,00	499.998.256	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**				-			-			399.999.500			-					-				
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	-	,00		-	-	,00	-	1,00	199.999.500	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	-	,00		-	-	,00	-	1,00	200.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				-			-			1.099.992.375			-		0,00%			-		0,00%	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**				-			-			499.999.000			-					-				
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	-	,00		-	-	,00	-	5,00	499.999.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**				-			-			599.993.375			-					-				

	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	-	,00	-	-	,00	-	1,00	99.998.250	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	-	,00	-	-	,00	-	12,00	499.995.125	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
		KECAMATAN																				
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				-		-		399.921.541		-		0,00%		-		0,00%	DISTRIK SARMI	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				-		-		399.921.541		-				-				
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	-	,00	-	-	,00	-	5,00	399.921.541	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				-		-		75.000.000		-		0,00%		-		0,00%	DISTRIK SARMI	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				-		-		75.000.000		-				-				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	2,00	75.000.000	-	,00	-	0%	0,00%	-	,00	-	0%	0,00%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				-		-		44.400.000		-		0,00%		-		0,00%	DISTRIK TOR ATAS	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				-		-		44.400.000		-				-				

	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	44.400.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			-		-		44.000.000		24.000.000		54,55%		24.000.000		0,00%	DISTRIK BONGGO	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			-		-		22.000.000		12.000.000				12.000.000				
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	22.000.000	- ,00	12.000.000	0%	54,55%	- ,00	12.000.000	0%	0,00%		
	7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			-		-		22.000.000		12.000.000				12.000.000				
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	22.000.000	- ,00	12.000.000	0%	54,55%	- ,00	12.000.000	0%	0,00%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			-		-		44.000.000		24.000.000		54,55%		24.000.000		0,00%	DISTRIK BONGGO	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			-		-		22.000.000		12.000.000				12.000.000				
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	22.000.000	- ,00	12.000.000	0%	54,55%	- ,00	12.000.000	0%	0,00%		
	7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**			-		-		22.000.000		12.000.000				12.000.000				

	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	-	,00	-	-	,00	-	-	,00	22.000.000	-	,00	12.000.000	0%	54,55%	-	,00	12.000.000	0%	0,00%		
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				-		-			23.490.000		12.000.000		51,09%		12.000.000		0,00%	DISTRIK BONGGO	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				-		-			23.490.000		12.000.000				12.000.000				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	-	,00	-	-	,00	-	-	,00	23.490.000	-	,00	12.000.000	0%	51,09%	-	,00	12.000.000	0%	0,00%		
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				-		-			22.000.000		12.000.000		54,55%		12.000.000		0,00%	DISTRIK BONGGO	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				-		-			22.000.000		12.000.000				12.000.000				
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	-	,00	-	-	,00	-	-	,00	22.000.000	-	,00	12.000.000	0%	54,55%	-	,00	12.000.000	0%	0,00%		
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				-		-			13.993.021		-		0,00%		-		0,00%	DISTRIK SARMI TIMUR	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				-		-			13.993.021		-				-				

	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	13.993.021	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			-		-		20.500.000		-		0,00%		-		0,00%	DISTRIK SARMI TIMUR	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			-		-		20.500.000		-				-				
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	20.500.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			-		-		96.000.000		16.000.000		16,67%		16.000.000		0,00%	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			-		-		96.000.000		16.000.000				16.000.000				
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	- ,00	-	- ,00	-	1,00	96.000.000	- ,00	16.000.000	0%	16,67%	- ,00	16.000.000	0%	0,00%		
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
	8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			-		-		1.099.999.844		-		0,00%		-		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			-		-		1.099.999.844		-				-				
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	50,00	1.099.999.844	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			-		-		1.296.135.135		-		0,00%		-		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			-		-		1.296.135.135		-				-				
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	1.090.195.005	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	205.940.130	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			-		-		393.060.000		-		0,00%		-		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			-		-		393.060.000		-				-				
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	393.060.000	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		
	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			-		-		34.188.141		-		0,00%		-		0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			-		-		34.188.141		-				-				
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	34.188.141	- ,00	-	0%	0,00%	- ,00	-	0%	0,00%		

BAB 3
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang menjelaskan kondisi dan proyeksi perekonomian, kapasitas fiskal, serta sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Analisis ini digunakan untuk menyesuaikan arah kebijakan keuangan daerah dengan perkembangan terbaru, sehingga rencana pembangunan tetap realistis, responsif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Perubahan ini membahas mengenai Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang menjadi landasan penting dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2025. Pada bagian ini dijelaskan gambaran kondisi makro ekonomi daerah, potensi dan tantangan perekonomian, serta kerangka pendanaan pembangunan yang bersumber dari berbagai instrumen keuangan daerah. Evaluasi ini dilakukan agar arah pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal yang realistis, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan efektif dan berdaya guna.

Perubahan RKPD Tahun 2025 juga tidak terlepas dari dinamika kebijakan nasional, khususnya adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang mengamanatkan agar pemerintah daerah melakukan pengendalian dan penajaman penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa belanja daerah diarahkan pada program prioritas yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, penyesuaian juga perlu dilakukan menyusul terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang menetapkan Pagu Indikatif Transfer ke Daerah, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus, yang secara langsung memengaruhi kapasitas fiskal Kabupaten Sarmi.

Dengan demikian, melalui bab ini, diuraikan secara lebih terperinci mengenai proyeksi pendapatan daerah, kebijakan belanja, sumber pembiayaan, serta arah kebijakan fiskal daerah, yang disusun dengan memperhatikan dinamika ekonomi nasional, kebijakan fiskal pemerintah pusat, serta kebutuhan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sekaligus mendukung tercapainya sasaran prioritas dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Arah pembangunan ekonomi daerah berarti melaksanakan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan arah kebijakan daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Sarmi dipengaruhi oleh kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dan Provinsi Papua sesuai dokumen RKPD tahun 2025. Dimana ***tema RKP tahun 2025*** fokus di bidang ekonomi yaitu ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan"*** dan pembangunan nasional diarahkan pada 3 (tiga) arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1) Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2) Infrasruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3) Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP tahun 2025, yang meliputi:
(1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%-5,6%;
(2) Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0%-8%;
(3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4-5%;
(4) Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379-0,382;
(5) Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99-74,02;
(6) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 38,6.
Serta indikator lainnya yaitu:
(1) Nilai Tukar Nelayan / NTN (nilai) sebesar 107-110;
(2) Nilai Tukar Petani /NTP (nilai) sebesar 105-108.

Sementara itu kebijakan sektor perekonomian Provinsi Papua dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebagaimana tema RKPD yaitu

Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua.

Selanjutnya Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025 sesuai Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 yaitu "Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan".

Pada tahun 2025 diproyeksikan masih melanjutkan perbaikan kondisi perekonomian yang jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2022 awal. Implementasi kebijakan tahun 2023 dan tahun 2024 dengan berbagai upaya pemulihan seperti halnya peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terus diimplementasikan di tahun 2025 sebagai titik balik pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025, menjadi dasar kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sarmi di tahun tersebut. Oleh karena kebijakan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah diharapkan dapat mengakomodasi dan mengelola sumber daya yang ada sehingga membantu proses pembangunan berlangsung secara optimal.

Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh peningkatan pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilyah Indonesia, dimana wilayah Papua tercatat sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan tertinggi. Dalam lingkup Provinsi Papua pertumbuhan ekonomi pada triwulan I di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, tumbuh sebesar 19,49 persen (yoy) dengan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,37 persen dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,51 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional, pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi diproyeksikan sebesar 3,60 persen atau diperkirakan tumbuh sebesar 5,30-5,86. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sarmi tahun 2025 guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan regional

diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan dan pemberdayaan masyarakat dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim usaha yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah produk semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran yang membaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dilatarbelakangi kondisi ekonomi nasional maupun regional yang masih dihadapkan pada upaya pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID19, dan guna mendukung prioritas Nasional, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Sarmi sesuai dengan RPD 2023-2026, Agenda ketiga yaitu; ***"Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan"***. Agenda ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan pendampingan yang terus menerus kepada masyarakat dalam penguatan sistem ekonomi masyarakat yang berbasis potensi unggulan, peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.

Arah kebijakan ekonomi daerah sebagaimana diatas dapat dijelaskan dalam konsep yang lebih implementasi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar. Program diarahkan pada:
   - Peningkatan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah
   - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi UMKM.
   - Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
   - Peningkatan infrastruktur pendukung.

b. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis. Program diarahkan pada:
   - Peningkatan ketahanan pangan
   - Peningkatan produksi pertanian dan hasil peternakan
   - Pengembangan budidaya perikanan
   - Pengembangan industri kecil dan menengah
   - Pengembangan sentra-sentra industri potensial

- Pengembangan sentra pengelolaan Kelapa dalam dan produk unggulan lainnya.
- Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM
- Mengembangkan klaster-klaster ekonomi potensial.
- Meningkatkan intensitas koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam pendampingan dan pemberdayaan UMKM.
- Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan lainnya.
- Perkuatan dan perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023. Memasuki triwulan I-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen dengan seluruh komponen pengeluaran dan lapangan usaha mampu tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang telah kembali ke target bank sentral pada Mei 2023 sebesar 4,0 persen, lebih cepat daripada prakiraan sebelumnya, yaitu baru akan kembali ke target bank sentral pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US$4.783,9 atau setara Rp71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai US$4.580 dan mendorong Indonesia kembali masuk dalam kategori upper-middle income country.

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), diolah 2023

Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Dunia (World Bank) diproyeksikan stabil di kisaran 5%, Pada tahun 2022 ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,1%, begitu pula pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 5,1%. Proyeksi tersebut tumbuh pesat dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 yang hanya tumbuh 3,7%. Indonesia dikatakan lebih resilience dibandingkan negara-negara di Eropa yang mengalami penurunan proyeksi hingga 1%. Dalam laporan GEP, Bank Dunia juga menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas karena kondisi pandemi yang mulai terkendali. Dalam laporan Danareksa Research Institute (DRI) optimis bahwa ekonomi Indonesia akan melanjutkan pertumbuhan dalam rentang 5,2%-5,35% pada tahun 2024. Perkiraan tersebut didasarkan pada perkembangan ekonomi terkini dan potensi serta tantangan ke depan bahwa perekonomian domestik diperkirakan akan terus pulih.

Dalam laporan Economic Outlook November 2022, OECD lebih optimis dibanding proyeksi dari Bank Dunia yang menilai pertumbuhan ekonomi global bisa jatuh ke 0,5% pada tahun 2023 dan 2% pada tahun 2025. Perekonomian global menghadapi tantangan yang berat di tengah laju inflasi tinggi dan keyakinan pasar yang melemah, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang kuatnya permintaan komoditas ekspor utama yang tertunda sejak pandemi. OECD juga menyebutkan ada sejumlah risiko yang menghambat laju pertumbuhan

ekonomi Indonesia, seperti persoalan energi, pupuk, pangan dan ketegangan sosial menjelang pemilu 2025 sebagai resiko utama. Keadaan ini memaksa adanya kebijakan moneter yang ketat, sementara dukungan untuk rumah tangga rentan harus tetap terjaga.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu dipahami pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Adapun kondisi perkembangan perekonomian Indonesia dan target pertumbuhanya adalah sebagai berikut.

Kondisi perekonomian Indonesia pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif dan cenderung menurun karena adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Kondisi pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi menurun sampai dengan -2,07. Kondisi ini mulai membaik di tahun berikutnya karena penerapan kebijakan penanganan pandemi, sehingga memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2022 mencapai Rp 4.919,9 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II tahun 2022 terhadap triwulan II 2021 tumbuh sebesar 5,23%. Pertumbuhan ini terjadi hampir semua lapangan usaha, kecuali konstruksi yang terkontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,15% dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,28%. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian (3,56%); perdagangan besar dan eceran (2,17%); reparasi mobil dan sepeda motor (0,04%); serta industri pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha lainnya pertumbuhan signifikan, diantaranya jasa pendidikan sebesar 7,43%; transportasi dan pergudangan sebesar 6,78%; dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,94%.

Gambar 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global
Tahun 2022-2025 (%)

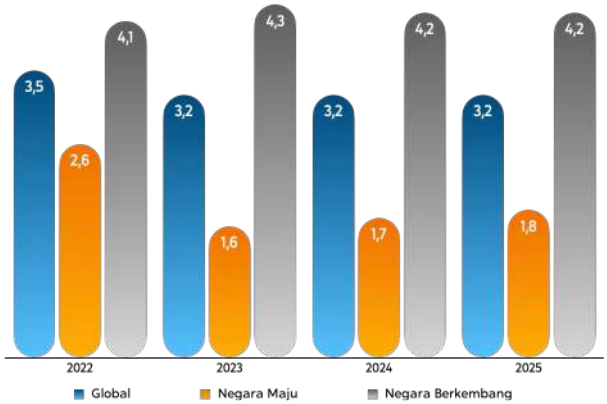

Sumber dokumen RKP 2025

Penguatan ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2022 terlihat pada semua wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi

kontributor utama dengan peranan sebesar 56,55% dari ekonomi nasional, dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% (y-on-y) dibanding triwulan II-2021. Angka tersebut terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2022 yang dihitung berdasarkan PDB ADHK mencapai Rp 19.588,4 triliun atau tumbuh sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV- 2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36% (q to q), peningkatan tertinggi dari sisi produksi dan lapangan usaha administrasi pemerintah.

Sasaran ekonomi makro nasional tahun 2025 adalah mempercepat agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,7% pada tahun 2025. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut yang akan meningkatkan GNI perkapita (Atlas Method) menjadi US$4.970- 5.510 dengan kategori upper-middle income countries. Stabilitas ekonomi makro tahun 2025 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5– 3,5% (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.800–Rp15.400 per US$. Pada tahun 2025, TPT diupayakan turun menjadi 5,0–5,7%.

Demikian pula Rasio GINI turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Hal ini terdapat relevansi pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional dengan arah kebijakan ekonomi daerah. BerdasarkanRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional2020-2025, terdapat 7 agenda pembangunan nasional antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi danpelayanan dasar.

Dalam memperkuat 7 agenda pembangunan nasional tersebut, perlu didukung adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sasaran ekonomi makro nasional tahun 2020-2025 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun yang mencapai 6,0%. Stategi pencapaian sasaran ekonomi makro nasional tahun 2020-2025 diantaranya:

1. Memperkuat permintaan domestik;
2. Diversifikasi ekspor dan stabilitas eksternal;
3. Menjaga kesinambungan fiskal;
4. Menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar;
5. Mengurangi ketimpangan wilayah; dan
6. Kebutuhan investasi dan pembiayaan.

Arah kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan konsolidatif untuk memberi ruang untuk pencapaian prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi. Arah kebijakan fiskal tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dan Hibah
   a. Akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif;
   b. Sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat mengurangi ketergantungan pada SDA dan mendukung transisi energi; serta; dan
   c. Optimalisasi PNBP dari pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintahan.
2. Belanja Negara

   Kebijakan belanja dilakukan dengan menjaga kualitas belanja (wise and better spending) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat countercyclical untuk menjadi enabler yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada SDM, infrastruktur, dan kelembagaan.

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran
   a. Pemanfaatan utang pemerintah lebih produktif untuk prioritas pembangunan, dikelola secara prudent dan akuntabel;
   b. Peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar keuangan yang kondusif dan melibatkan multi stakeholders, serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah. dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable dan lebih masif; serta
   c. Pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Special Vehicle Purpose (SVP) yang tepat dan efisien.

Rencana pembangunan jangka menengah tersebut difokuskan pada agenda pembangunan dan arah kebijakan tahunan nasional berdasarkan RKP Nasional tahun 2025. Arah kebijakan ekonomi tahun 2025 berfokus pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangungan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Fokus kebijakan ekonomi Makro tahun 2025 sebagai berikut:

1. Percepatan transformasi ekonomi;
2. Pembangunan inklusif;
3. Pembangunan berkelanjutan; serta
4. Mewujudkan stabilitas ekonomi.

Data capaian tersebut diperoleh dari Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi. Data capaian kabupaten terhadap nasional dikatakan selaras, meskipun terdapat indikator yang masih berada di bawah capaian nasional. Indikator yang masih ada di bawah capaian nasional adalah Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung berdasarkan indeks pendidikan, indeks Kesehatan, dan indeks daya beli. Capaian IPM Kabupaten Sarmi selisih 8,05 poin angka lebih kecil dari capaian nasional demikian juga dengan capaian angka Tingkat kemiskinan dengan selisih nilai 4,19 poin dan capaian Rasio Gini dengan selisih 0,01 dengan capain nasional. Namun, Kabupaten Sarmi lebih unggul dalam penanganan pengangguran dengan perbadingan capaian nasional 5,86 sedangkan Kabupaten Sarmi 2,09 di tahun 2022.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Papua.

Perekonomian Papua pada triwulan I tahun 2025 mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -12,98% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2024 yang masih terkontraksi -4,05% (yoy). Penurunan tajam ini terutama dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan dan penggalian yang tertekan akibat turunnya produksi, menyusul belum terbitnya kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga pertengahan Maret 2025.

Meskipun demikian, kontraksi ekonomi yang lebih dalam dapat tertahan oleh pertumbuhan positif di sektor nontambang, khususnya pada LU pertanian, LU perdagangan besar dan eceran, serta LU administrasi pemerintahan. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terutama dipicu oleh penurunan tajam pada ekspor luar negeri. Selain itu, perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dibandingkan triwulan sebelumnya, ditambah dengan kontraksi pada belanja pemerintah, semakin menekan kinerja perekonomian.

Ke depan, adanya kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang mulai berlaku pada Maret 2025 memberikan harapan terhadap perbaikan kinerja perekonomian Papua pada triwulan-triwulan berikutnya.

Tabel 3.1
Perkembangan PDRB Provinsi Papua

Uraian	TAHUN 2022					TAHUN 2023					TAHUN 2024					2025
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I
PDRB ADHK (Rp. Miliar)	41.949	43.322	43.014	44.621	172.907	40.948	44.973	46.570	49.435	181.927	48.109	46.940	47.341	47.431	189.821	48.109
PDRB ADHK Tanpa Tambang (Rp. Miliar)	23.799	24.352	24.863	25.669	98.682	24.800	25.432	25.682	26.802	102.716	26.057	26.658	26.858	27.517	107.090	26.057
Pertumbuhan PDRB (% yoy)	13,51	14,80	6,13	2,70	8,97	(2,39)	3,81	8,27	10,79	5,22	17,49	4,37	1,66	(4,05)	4,34	(12,98)
Pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang (% yoy)	5,76	5,25	4,47	1,37	4,14	4,20	4,44	3,30	4,42	4,09	5,07	4,82	4,58	2,67	4,26	3,51
Pertumbuhan PDRB (% q-to-q)	(3,45)	3,27	(0,71)	3,74	n/a	(8,23)	9,83	3,55	6,15	n/a	(2,68)	(2,43)	(2,43)	0,19	n/a	(11,73)
Pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang (% q-to-q)	(6,01)	2,32	2,10	3,24	n/a	(3,39)	2,55	0,98	4,36	n/a	(2,78)	2,30	2,30	2,45	n/a	(1,98)
Pertumbuhan PDB Indonesia (% yoy)	5,02	5,46	5,73	5,01	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	5,11	5,05	5,05	5,02	5,03	4,87

Sumber : BPS, diolah

Kinerja perekonomian wilayah Papua melanjutkan kontraksi pada triwulan I 2025. Perekonomian wilayah Papua pada triwulan I 2025 terkontraksi sebesar -12,98% (yoy), menurun lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -4,05 (yoy). Kinerja perekonomian Wilayah Papua pada triwulan I 2025 lebih rendah dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 4,87% (yoy). (Grafik 1.1). Perlambatan perekonomian pada triwulan diakibatkan penurunan signifikan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan dan penggalian yang terkendala keadaan kahar (force majeure) serta masih terdapatnya high-based

effect, menyebabkan LU pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi hingga -32,46% (yoy). LU pertambangan dan penggalian menunjukkan kinerja yang signifikan sepanjang triwulan III 2023 hingga triwulan I 2024 akibat tingkat penggilingan yang optimal disertai ore grade tembaga dan emas yang tinggi mendorong produksi yang signifikan pada ketiga triwulan tersebut. Pada triwulan I 2025, penurunan kadar bijih (ore grade) emas dan tembaga masih berlanjut dari triwulan sebelumnya. Selain itu, dampak lanjutan dari kejadian kahar berupa kebakaran smelter serta belum diterbitkannya kebijakan relaksasi ekspor hingga pertengahan Maret 2025 turut menyebabkan penurunan signifikan pada tingkat gilingan (milling rate). Akibatnya, produksi tembaga dan emas masing-masing terkontraksi sebesar -39,71% (yoy) dan -47,89% (yoy).

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Dengan dan Tanpa Tambang

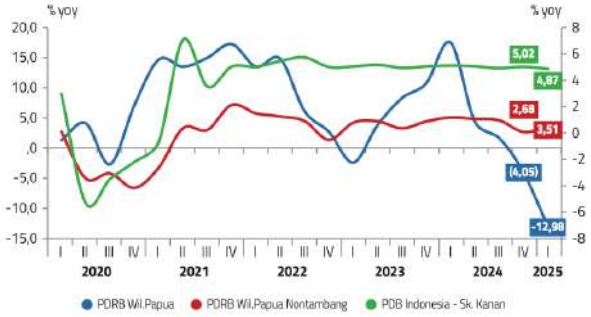

Sumber : BPS, diolah

Gambar 3.3
Perkembangan Survei Konsumen

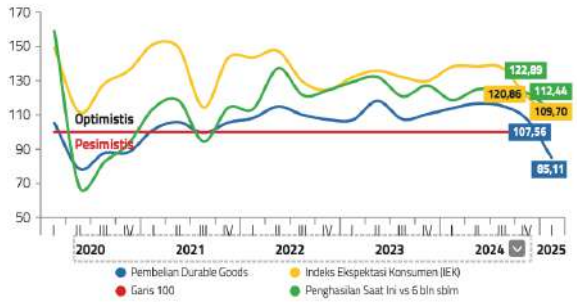

Sumber : Survei Konsumen, Bank Indonesia, diolah.

Kontraksi ekonomi wilayah Papua lebih lanjut pada triwulan I 2025 tertahan oleh laju pertumbuhan LU nontambang. LU nontambang tumbuh lebih tinggi pada triwulan I 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan kelompok LU tersebut mencapai 3,51% (yoy). Pertumbuhan bersumber dari LU pertanian, LU perdagangan besar dan eceran, serta LU administrasi pemerintahan. Kinerja pertumbuhan pada LU pertanian sejalan dengan panen raya yang berlangsung pada awal tahun, sementara LU perdagangan dan LU administrasi sejalan dengan aktivitas terkait belanja HBKN Idul Fitri 2025 dan pencairan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS). Sementara perlambatan pada LU konstruksi disebabkan oleh prinsip kehati-hatian baik pemerintah maupun pelaku usaha yang turut terdampak dalam hal pembangunan, hal ini tercermin dari penjualan semen yang tertahan pada triwulan I 2025.

Pada sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi wilayah Papua bersumber dari penurunan signifikan komponen total ekspor. Jumlah ekspor konsentrat tembaga tercatat terkontraksi sebesar

-74,30% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar -49,77% (yoy). Kontraksi ekspor disebabkan oleh kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang baru diterbitkan pada 17 Maret 2025, sehingga realisasi ekspor hingga akhir triwulan I 2025 masih terbatas. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan hingga September 2025, sehingga pada triwulan berikutnya kinerja ekspor diperkirakan akan mengalami perbaikan.

Selain ekspor, perlambatan konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) turut menahan laju pertumbuhan ekonomi wilayah Papua. Perlambatan konsumsi pemerintah selaras dengan high based effect pelaksanaan Pemilu pada triwulan I 2024, sementara perlambatan PMTB sejalan dengan realisasi belanja modal pemerintah pusat maupun daerah yang masih tertahan akibat kebijakan realokasi anggaran. Kondisi perlambatan ini semakin menekan kinerja ekonomi Papua ketika ditinjau dari sisi fiskal pemerintah.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Papua pada triwulan I 2025 terkontraksi tajam sebesar -61,64% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -25,95% (yoy). Kontraksi tersebut bersumber dari seluruh komponen pendapatan, terutama pajak perdagangan internasional yang turun -68,14% (yoy), pajak dalam negeri -60,53% (yoy), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) -16,08% (yoy). Pada sisi belanja, realisasi APBN belanja Pemerintah Pusat juga mengalami kontraksi 52,23% (yoy), berbalik dari pertumbuhan 12,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kinerja yang menurun ini kontras dengan realisasi APBN TKDD yang justru tumbuh 26,51% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 8,81% (yoy), dengan pendorong utama berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan DAK Non Fisik yang masing-masing tumbuh 71,70% (yoy), 24,71% (yoy), dan 20,11% (yoy).

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan APBN Papua

Pendapatan APBN	Realisasi (Rp Miliar)									Tw-IV 2024 (%yoy)	Tw-I 2025 (%yoy)
	Tahun 2023				Tahun 2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I		
Pajak Dalam Negeri	1.382,46	1.900,01	2.229,31	3.174,89	1.571,72	2.171,50	2.401,46	3.294,87	620,42	3,78	(60,53)
Pajak Perdagangan Internasional	340,06	74,36	925,36	3.523,26	2.600,07	1.512,01	2.048,59	1.593,63	828,36	(54,77)	(68,14)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	219,29	188,64	171,84	348,66	332,35	151,07	238,51	329,43	278,91	(5,52)	(16,08)
Total	**1.942,00**	**2.164,41**	**3.326,51**	**7.046,81**	**4.504,14**	**3.834,58**	**4.688,56**	**5.217,93**	**1.727,69**	**(25,95)**	**(61,64)**

Sumber : DJPb Kanwil Papua, Kemenkeu, diolah.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Sarmi.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kondisi perekonomian dan kinerja perekonomian di Kabupaten Sarmi dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Indikator yang dapat digunakan dalam menjelaskan kinerja ekonomi yakni Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam cakupan wilayah yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat memberikan gambaran umum mengenai ukuran ekonomi di Kabupaten Sarmi.

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Dimana DRB pada harga konstan ini digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi 2019-2023 dapat dilihat dalam **gambar 3.2.**

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024

Sumber : BPS .go.id Tahun 2022 dan data di olah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi tahun 2023 didorong oleh peningkatan produksi pada beberapa lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 naik namun tidak signifikan hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar kategori lapangan usaha seperti kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya mengalami pertumbuhan namun lambat . Angka tersebut menurun pada

tahun 2024 dengan angka capaian pertumbuhan mencapai 5,15% dan angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan oleh ada perlembatan pertumbuhan pada beberapa sektor lapangan usaha.

Tabel 3.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sarmi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2023-2024

Katergori	URAIAN	2023	2024	Tambah/ Kurang	KET
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,40	27,81	-1,59	Menurun
B	Pertambangan dan Penggalian	1,14	1,09	-0,05	Menurun
C	Industri Pengolahan	1,78	1,77	-0,01	Menurun
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0	Tetap
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0	Tetap
F	Konstruksi	21,18	21,58	0,4	Meningkat
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	10,15	10,39	0,24	Meningkat
H	Transportasi dan Pergudangan	6,01	6,15	0,14	Meningkat
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,77	0,02	Meningkat
J	Informasi dan Komunikasi	3,43	3,55	0,12	Meningkat
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,34	1,35	0,01	Meningkat
L	Real Estat	3,57	3,63	0,06	Meningkat
M,N	Jasa Perusahaan	0,56	0,54	-0,02	Menurun
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,84	14,37	0,53	Meningkat
P	Jasa Pendidikan	2,70	2,72	0,02	Meningkat
Q	Jasa Kesehatan	2,50	2,60	0,10	Meningkat
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,55	1,58	0,03	Meningkat

Sumber : BPS Kab. Sarmi dalam Angka Tahun 2023 - 2024 dan data di olah.

Struktur ekonomi Kabupaten Sarmi mencerminkan besarnya kontribusi berbagai lapangan usaha dalam menghasilkan barang dan jasa. Struktur ini terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap sektor usaha, sehingga dapat menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2019–2023), perekonomian Kabupaten Sarmi didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

Dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi, diperlukan pijakan yang kuat pada capaian indikator makro daerah agar kebijakan yang dihasilkan lebih kontekstual dan tepat sasaran. Capaian indikator makro Kabupaten Sarmi dalam beberapa tahun terakhir memberikan

gambaran mengenai keberhasilan yang telah dicapai sekaligus tantangan yang masih perlu diatasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025, capaian indikator tersebut dijadikan dasar penting untuk menyesuaikan arah kebijakan dan program pembangunan ekonomi, sehingga lebih adaptif terhadap dinamika yang berkembang dan tetap konsisten dengan tujuan pembangunan jangka menengah maupun nasional.

Tabel 3.4
Capaian Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2022-2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TARGET TAHUN 2025
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	63,94	64,86	64,20	67,00	64,47	67,89	64,73
Persentase Penduduk Miskin/ tingkat kemiskinan	Persen	13,84	13,76	13,15	13,21	12,49	14,05	11,87
Pertumbuhan ekonomi (%)	Persen	4,38	2,89	4,79	3,56	5,23	4,26	5,72
Pendapatan Per Kapita	Juta Rp.	71,30	78,43	73,21	83,47	75,17	88,76	77,19
Indeks Gini Rasio (nilai)	Indeks	0,409	0,387	0,401	0,372	0,393	0,370*	0,385
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	5,26	2,09	4,57	3,09	3,97	3,41	3,45

Sumber : 1) RPD Kabupaten Sarmi 2023 -2026
2) BPS Kabupaten Sarmi

Berdasarkan tabel indikator makro, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi terus menunjukkan tren positif, naik dari 64,86 pada tahun 2022 menjadi 67,89 pada tahun 2024 dan melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, target IPM tahun 2025 sebesar 64,73 tidak sejalan dengan tren capaian riil sehingga perlu penyesuaian.

Sementara itu, indikator kemiskinan memperlihatkan fluktuasi, yaitu menurun dari 13,76% (2022) menjadi 13,21% (2023), tetapi kembali meningkat menjadi 14,05% pada tahun 2024, lebih tinggi dari target 12,49%. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, meskipun terjadi kenaikan dari 2,89% (2022) menjadi 4,26% (2024), capaian tersebut masih di bawah target, sehingga pencapaian target 2025 sebesar 5,72% membutuhkan akselerasi melalui investasi, penguatan infrastruktur, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan.

Kinerja pendapatan per kapita menunjukkan hasil yang menggembirakan, meningkat signifikan hingga Rp88,76 juta pada tahun 2024 dan melampaui target. Namun, target tahun 2025 sebesar Rp77,19 juta justru lebih rendah dari capaian terakhir, sehingga perlu diselaraskan

dengan tren capaian positif. Sementara itu, Indeks Gini yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan terus membaik dari 0,387 (2022) menjadi 0,370 (2024). Sayangnya, target 2025 sebesar 0,385 kembali lebih tinggi dari capaian terakhir, sehingga tidak konsisten dengan arah perbaikan. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), capaian relatif terkendali meskipun naik menjadi 3,41% pada tahun 2024, tetap lebih rendah dari target yang ditetapkan. Target 2025 sebesar 3,45% menunjukkan tren yang masih cukup terjaga meski tetap perlu diantisipasi.

Secara keseluruhan, capaian pembangunan ekonomi Kabupaten Sarmi periode 2022–2024 menunjukkan kemajuan pada IPM, pendapatan per kapita, ketimpangan, dan TPT, namun masih menghadapi tantangan dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidaksesuaian beberapa target tahun 2025 dengan capaian riil menunjukkan perlunya penyesuaian agar lebih realistis, konsisten, dan relevan dengan perkembangan yang ada.

Dalam konteks tersebut, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sarmi tahun 2025 berfungsi sebagai fokus pembangunan untuk memastikan strategi yang ditempuh selaras dengan mandat peraturan perundang-undangan dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarmi 2023–2026. Rumusan pembangunan ekonomi tertuang dalam Agenda 3, yaitu ***"Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan,"*** yang kemudian dioperasionalkan melalui tema pembangunan tahun 2025, yakni ***"Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Perekonomian yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi yang Maju dan Sejahtera dalam Kebhinekaan."***

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sarmi tahun 2025 dirumuskan sejalan dengan arah kebijakan provinsi dan nasional, yang mencakup: (1) peningkatan pemerataan ekonomi yang kuat dan berdaya saing; (2) pengembangan potensi sumber daya ekonomi lokal secara berkelanjutan; (3) peningkatan nilai tambah komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan kehutanan berbasis ekonomi kerakyatan; (4) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; (5) peningkatan kesempatan berusaha dan kemudahan akses faktor produksi; (6) peningkatan kemandirian daerah dalam mengelola sumber pendapatan; (7) penguatan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; (8) pengentasan

kemiskinan dan pengurangan kesenjangan; (9) pemantapan pembangunan berkelanjutan (hijau/ rendah karbon); (10) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (11) edukasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan keseimbangan ekologi; serta (12) penguatan interaksi sosial masyarakat dengan lingkungan.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan 2025.

Perekonomian Kabupaten Sarmi dalam dua tahun mendatang juga berpotensi mengalami tantangan akibat dari pengaruh perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Imbas kelesuan ekonomi Eropa telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perekonomian daerah yang bertumpu pada ekonomi nasional juga akan merasakan dampaknya.

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional, dan provinsi yang berimbas pada perkembangan daerah, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) Menekan laju pertumbuhan penduduk, (3) dan Menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Sebagaimana gambaran di atas, agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis. Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Sarmi tahun 2020-2024, perekonomian Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sarmi yang memiliki posisi strategis serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada 2025 adalah sebagai berikut:

a. Tantangan.

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat

mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan investasi ramah lingkungan merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Promosi dan penataan/pengelolaan Kawasan strategis cepat tumbuh kepada investor perlu ditingkatkan.
3. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
5. Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024-2025.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah : pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah. Kedua, meningkatkan pelayanan perijinan

usaha. Ketiga, menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro dan Kelima, efisiensi alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2023 dan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 1,50 persen. Namun perkiraan kenaikan ini juga berkontribusi dengan aktivitas ekonomi baik lokal, maupun regional dan juga nasional.

Disisi lain laju Inflasi provinsi papua diperkirakan sebesar 5,05 persen (yoy) yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kamupaten Sarmi dan tingkat kemiskinan Kabupaten Sarmi di perkirakan turun 0,02 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 13,79 persen menjadi 13,77 persen pada tahun 2025 dan angka ini diperkirakan akan terus turun. Indikator lain terkait capaian kinerja pembangunan adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia. Pada Tahun 2023 angka IPM Kabupaten Sarmi diperkirakan naik 0,5 point dari 67,00 point menjadi 67,5 point di tahun 2025.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 disusun selaras dengan tema pembangunan daerah yaitu ***"Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Perekonomian yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi yang Maju dan Sejahtera dalam Kebinekaan."***

Dalam kerangka Perubahan RKPD Tahun 2025, arah kebijakan ini tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga berfungsi untuk memastikan agar pengelolaan fiskal daerah lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan regional, serta selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional yang tengah dijalankan pemerintah pusat.

Dengan demikian, arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk memperkuat efektivitas perencanaan, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta mendorong konsistensi dalam manajemen fiskal. Tujuannya adalah agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan fiskal daerah di masa depan.

Sebagai pijakan hukum dan regulatif, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sarmi berlandaskan pada beberapa kerangka acuan utama:

(a). Reformasi Struktural yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah reformasi regulasi pada tingkat undang-undang meliputi :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

(b). Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Pusat telah menerbitkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas dasar Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mulai dari Perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan oleh daerah yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi.

(c). Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prestasi kerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam penyusuan dan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan maupun sub kegiatan telah berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2023– 2026;

(d). Pemerintah Kabupaten Sarmi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah

Selain pijakan regulasi tersebut, arah kebijakan keuangan daerah juga mempertimbangkan arahan strategis terbaru Pemerintah Pusat, yaitu:

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 , yang menekankan pergeseran belanja dari belanja rutin ke belanja produktif dan strategis dengan dampak langsung terhadap pelayanan publik;

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana transfer secara lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan daya ungkit bagi perekonomian lokal.

Dengan berpedoman pada kerangka tersebut, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD diarahkan pada:

1. **Peningkatan kapasitas fiskal daerah**, melalui optimalisasi PAD dan bagi hasil pajak daerah, dengan tetap menjaga agar mekanisme pemungutan tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian lokal, serta mengutamakan penggunaannya untuk belanja publik, khususnya belanja produktif;
2. **Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah**, agar pengalokasian anggaran lebih strategis, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. **Pengelolaan pembiayaan daerah yang hati-hati**, dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali sesuai batas pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan risiko makro ekonomi maupun gejolak harga;
4. **Penguatan ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan**, melalui konsolidasi fiskal, pengendalian defisit, dan peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Lebih lanjut, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sarmi dalam Perubahan RKPD 2025 juga mempertimbangkan proyeksi makroekonomi daerah, realisasi investasi, serta kapasitas belanja pemerintah. Tantangan utama yang dihadapi antara lain: (1) masih terbatasnya peningkatan PAD, (2) rendahnya investasi produktif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, dan (3) belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan pada strategi penguatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja pembangunan, serta pengelolaan pembiayaan daerah yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil (outcome-oriented).

Dengan pendekatan tersebut, arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu **terwujudnya Sarmi yang lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.**

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan pemberian wewenang bagi daerah provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian fiskal agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat uraian tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah

menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari public private partnership (PPP). Bentuk PPP antara lain seperti, kontrak servis, kontrak manajemen, kontrak sewa, kontrak Build-Operate-Transfer/BOT, dan kontrak konsesi.

Kebijakan keuangan Kabupaten Sarmi tahun 2025 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sarmi Tahun 2023-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sarmi. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain- lain pendapatan asli daerah yang sah; b) Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional. Penyesuaian pendapatan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengendalian Belanja Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur perubahan alokasi transfer ke daerah.

Berdasarkan hasil penyesuaian, total Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 mengalami penurunan dari Rp1.081.930.720.650,00 sebelum perubahan menjadi Rp970.241.052.274,00 setelah perubahan, atau berkurang sebesar Rp111.689.668.376,00 (turun 11,51 persen).

Penurunan pendapatan daerah tersebut tidak terjadi secara merata pada seluruh komponennya, melainkan menunjukkan dinamika yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik sumber pendapatan. Beberapa komponen justru mengalami peningkatan sebagai hasil dari optimalisasi potensi daerah, sementara yang lain mengalami penurunan seiring adanya penyesuaian transfer dari pusat dan rasionalisasi pendapatan lainnya. Secara rinci, perkembangan masing-masing komponen pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD menunjukkan adanya kenaikan dari Rp12.793.000.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp14.961.929.651,00 setelah perubahan, atau bertambah sebesar Rp2.168.929.651,00 (naik 0,17 persen). Kenaikan ini sepenuhnya berasal dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang meningkat 30,25 persen, dari Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp7.168.929.651,00. Peningkatan tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hasil penyertaan modal daerah. Sementara itu, komponen lain seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang Sah tidak mengalami perubahan nominal.

2. Pendapatan Transfer

Komponen Pendapatan Transfer justru mengalami penurunan signifikan sebesar Rp129.118.364.000,00 (turun 0,12 persen), dari Rp1.065.678.560.650,00 menjadi Rp936.560.196.650,00. Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang turun dari Rp1.058.136.815.000,00 menjadi Rp929.018.451.000,00, atau berkurang 13,90 persen. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan penyesuaian transfer ke daerah sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 29 Tahun 2025, yang menekankan efisiensi distribusi fiskal nasional. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak mengalami perubahan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen ini mengalami lonjakan signifikan, yaitu meningkat dari Rp3.459.160.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp18.718.925.973,00 setelah perubahan, atau naik sebesar Rp15.259.765.973,00 (81,52 persen). Kenaikan ini berasal dari kategori Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang mencerminkan adanya tambahan penerimaan dari sumber-sumber sah di luar PAD dan transfer, termasuk kemungkinan penerimaan hibah pemerintah maupun pihak ketiga.

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut disajikan rincian target dan proyeksi pendapatan daerah yang dituangkan dalam Tabel 3.5. Penyajian tabel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kuantitatif yang lebih jelas mengenai struktur pendapatan daerah serta kontribusi masing-masing sumber penerimaan terhadap total pendapatan.

Tabel 3. 5
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi
Pada Rencana Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5=4-3]	[6=5/3]
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.081.930.720.650,00**	**970.241.052.274,00**	**(111.689.668.376,00)**	**(11,51)**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**12.793.000.000,00**	**14.961.929.651,00**	**2.168.929.651,00**	**0,17**
4.1.01	Pajak Daerah	6.080.000.000,00	6.080.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	7.168.929.651,00	2.168.929.651,00	30,25
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.323.000.000,00	1.323.000.000,00	0,00	0,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.065.678.560.650,00**	**936.560.196.650,00**	**(129.118.364.000,00)**	**(0,12)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.058.136.815.000,00	929.018.451.000,00	(129.118.364.000,00)	(13,90)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.541.745.650,00	7.541.745.650,00	0,00	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3.459.160.000,00**	**18.718.925.973,00**	**15.259.765.973,00**	**81,52**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	3.459.160.000,00	18.718.925.973,00	15.259.765.973,00	81,52

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, kebijakan belanja daerah perlu diarahkan secara lebih efektif dan efisien. Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional terbaru.

Penyesuaian kebijakan belanja ini dilakukan sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang menekankan optimalisasi penggunaan anggaran dengan prinsip spending better, efisiensi belanja barang/jasa, serta fokus pada program/kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, arah kebijakan belanja daerah juga mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pagu Indikatif Transfer ke Daerah, yang membawa implikasi pada perubahan kapasitas fiskal daerah, khususnya terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Dengan demikian, penyesuaian arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk:

1. Memperkuat belanja yang mendukung prioritas nasional dan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi belanja aparatur agar ruang fiskal lebih besar bagi belanja produktif.
3. Menjamin konsistensi antara program/kegiatan dengan indikator kinerja pembangunan.
4. Menyesuaikan struktur belanja berdasarkan kebijakan transfer ke daerah sebagaimana ditetapkan dalam KMK 29 Tahun 2025.

Berdasarkan hasil penyesuaian, total belanja daerah mengalami penurunan dari Rp1.079.930.720.650,00 sebelum perubahan menjadi Rp1.024.939.626.049,46 setelah perubahan, atau berkurang sebesar Rp54.991.094.600,54 (turun 5,37 persen).

Jika ditelaah lebih lanjut, penyesuaian belanja daerah tersebut tidak terjadi secara merata pada seluruh kelompok belanja, melainkan menunjukkan dinamika yang berbeda-beda sesuai dengan prioritas masing-masing pos anggaran. Perubahan ini mencerminkan adanya penguatan pada beberapa jenis belanja yang bersifat mendesak dan strategis, sekaligus pengetatan pada komponen belanja yang masih dapat dioptimalkan efisiensinya. Rincian pergeseran belanja tersebut dapat dilihat pada uraian berikut

1. Belanja Operasi

Belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp6.841.013.967,54 atau 0,90 persen, dari semula Rp766.493.425.977,00 menjadi Rp759.652.412.009,46. Perubahan pada Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pola yang beragam antar komponen belanja. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian alokasi sesuai kebutuhan riil dan prioritas pembangunan daerah. Rincian perkembangan masing-masing komponen Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

- Belanja Pegawai justru mengalami kenaikan sebesar Rp20.835.498.843,23 atau 6,74 persen, sebagai konsekuensi dari penyesuaian kebijakan penggajian dan tunjangan pegawai.
- Belanja Barang dan Jasa turun signifikan sebesar Rp23.417.331.810,77 (5,59 persen), sejalan dengan efisiensi anggaran operasional rutin.
- Belanja Hibah naik sebesar Rp1.065.000.000,00 (6,88 persen) untuk memperkuat dukungan pada organisasi sosial dan kemasyarakatan.
- Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan cukup tajam, yakni Rp5.324.181.000,00 (32,83 persen), mencerminkan rasionalisasi belanja yang lebih selektif pada bantuan langsung masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja modal mengalami penurunan paling signifikan, yaitu sebesar Rp56.398.635.235,00 atau 55,24 persen, dari Rp158.487.502.473,00 menjadi Rp102.088.867.238,00.

- Beberapa jenis belanja modal justru meningkat, seperti Belanja Modal Tanah (naik Rp2 miliar atau 21,74 persen), Belanja Modal Peralatan dan Mesin (naik Rp5,57 miliar atau 27,01 persen), serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan (naik Rp10,16 miliar atau 25,32 persen).
- Namun, terjadi penurunan drastis pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp74,54 miliar (turun 235,91 persen), yang menjadi faktor utama berkurangnya total belanja modal.
- Selain itu, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya naik Rp6,8 miliar (6,18 persen) dan Belanja Modal Aset Lainnya meningkat Rp400 juta (97,18 persen).

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga meningkat cukup besar, dari Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp8.650.000.000,00, atau naik Rp3.650.000.000,00 (42,20 persen). Peningkatan ini mencerminkan antisipasi pemerintah daerah terhadap risiko ketidakpastian, seperti bencana alam maupun dinamika sosial-ekonomi yang memerlukan respon cepat.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp4.598.554.602,00 (2,98 persen), dari Rp149.949.792.200,00 menjadi Rp154.548.346.802,00. Seluruh peningkatan terjadi pada Belanja Bantuan Keuangan, yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas keuangan desa dan mendukung pelaksanaan program pembangunan berbasis kewilayahan.

Secara umum, arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 difokuskan pada:

- Efisiensi belanja operasi, dengan menekan pengeluaran rutin yang kurang produktif namun tetap memperkuat belanja pegawai dan hibah.
- Rasionalisasi belanja modal, khususnya pada proyek infrastruktur besar, guna menjaga keseimbangan fiskal daerah.
- Peningkatan kesiapsiagaan fiskal, melalui penambahan porsi belanja tidak terduga.
- Penguatan transfer keuangan daerah, untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kampung.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Sarmi sekaligus memastikan tercapainya target prioritas pembangunan tahun 2025 secara efektif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan belanja daerah yang telah diuraikan sebelumnya, kebutuhan penyesuaian struktur belanja dituangkan lebih lanjut dalam proyeksi belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Proyeksi ini mencerminkan pengalokasian anggaran berdasarkan prinsip *spending better* serta memperhatikan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025. Rincian proyeksi belanja dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sarmi
Pada Rencana Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5=4-3]	[6=5/3]
5	**BELANJA DAERAH**	**1.079.930.720.650,00**	**1.024.939.626.049,46**	**(54.991.094.600,54)**	**(5,37)**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**766.493.425.977,00**	**759.652.412.009,46**	**(6.841.013.967,54)**	**(0,90)**
5.1.01	Belanja Pegawai	288.407.483.280,00	309.242.982.123,23	20.835.498.843,23	6,74
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.125.802.692	418.708.470.881,23	(23.417.331.810,77)	(5,59)
5.1.05	Belanja Hibah	14.417.103.005,00	15.482.103.005,00	1.065.000.000,00	6,88
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.543.037.000,00	16.218.856.000,00	(5.324.181.000,00)	(32,83)
5.2	**BELANJA MODAL**	**158.487.502.473,00**	**102.088.867.238,00**	**(56.398.635.235,00)**	**(55,24)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.200.000.000,00	9.200.000.000,00	2.000.000.000,00	21,74
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.057.237.852,00	20.629.870.525,00	5.572.632.673,00	27,01
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.975.564.830,00	40.139.687.334,00	10.164.122.504,00	25,32
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.139.718.976,00	31.597.521.018,00	(74.542.197.958,00)	(235,91)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103.373.147,00	110.180.693,00	6.807.546,00	6,18
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.607.668	411.607.668,00	400.000.000,00	97,18
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.000.000.000,00**	**8.650.000.000,00**	**3.650.000.000,00**	**42,20**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	8.650.000.000,00	3.650.000.000,00	42,20
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**149.949.792.200,00**	**154.548.346.802,00**	**4.598.554.602,00**	**2,98**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.949.792.200,00	154.548.346.802,00	4.598.554.602,00	2,98

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun periode tahun berikutnya. Komposisi pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 Pembiayaan daerah dalam struktur APBD merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus anggaran guna mendukung kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.7, terdapat perbedaan signifikan antara kondisi sebelum perubahan dan setelah perubahan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penerimaan Pembiayaan**
   - Sebelum perubahan, penerimaan pembiayaan tercatat nihil.
   - Setelah perubahan, penerimaan pembiayaan bertambah sebesar Rp56.698.573.775,46 yang sepenuhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.
   - Penambahan ini mencerminkan adanya kapasitas fiskal tambahan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan tahun berjalan.
2. **Pengeluaran Pembiayaan**
   - Baik sebelum maupun setelah perubahan, pengeluaran pembiayaan tetap dialokasikan sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk Penyertaan Modal Daerah.
   - Hal ini menunjukkan konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung permodalan BUMD dan investasi strategis, tanpa adanya perubahan alokasi meskipun terjadi penyesuaian pada sisi penerimaan.
3. **Pembiayaan Netto**
   - Sebelum perubahan, pembiayaan netto bernilai negatif sebesar Rp(2.000.000.000,00).
   - Setelah perubahan, posisi pembiayaan netto berbalik positif dengan nilai Rp54.698.573.775,46.
   - Perubahan ini merepresentasikan peningkatan kapasitas fiskal netto sebesar Rp56.698.573.775,46 atau setara dengan pertumbuhan 103,66%, yang berdampak langsung pada penguatan ruang fiskal daerah.

4. Arah Kebijakan Pembiayaan

Dengan memperhatikan kondisi di atas, maka arah kebijakan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pembiayaan utama guna mendukung kebutuhan belanja prioritas daerah yang belum terakomodasi pada APBD murni.
- Menjaga kesinambungan kebijakan penyertaan modal daerah dengan mempertahankan alokasi yang telah ditetapkan, sebagai strategi memperkuat peran BUMD dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah.
- Penggunaan pembiayaan netto yang positif secara efektif untuk memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan likuiditas anggaran, dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan.

Dengan arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarmi berupaya menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber pembiayaan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan pada sisi pembiayaan daerah, berikut disajikan perbandingan proyeksi pembiayaan sebelum dan setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sarmi
Pada Rencana Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5=4-3]	[6=5/3]
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-**	**56.698.573.775,46**	**56.698.573.775,46**	**100,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	**56.698.573.775,46**	56.698.573.775,46	100,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**(2.000.000.000,00)**	**54.698.573.775,46**	**56.698.573.775,46**	**103,66**
	Sisa Lebih Pembiayan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**-**	**-**	**-**	

3.2.4. Kebijakan Pembiayaan sumber dana Otonomi Khusus pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Kebijakan pembiayaan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2025 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pengelolaan berbagai sumber pendanaan, salah satunya adalah Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dana ini merupakan instrumen fiskal yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN untuk mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua, termasuk Kabupaten Sarmi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2025, kebijakan pembiayaan dari sumber dana Otsus mengalami beberapa penyesuaian yang mendasar, antara lain:

1. Penyesuaian akibat Kebijakan Nasional (KMK 29 Tahun 2025)
   Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, alokasi dana transfer, termasuk Dana Otsus, mengalami penyesuaian untuk memastikan efisiensi fiskal dan penguatan kualitas belanja publik. Hal ini berdampak pada perubahan besaran pagu Dana Otsus yang diterima oleh Kabupaten Sarmi, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi ulang terhadap prioritas pembiayaan pada sektor-sektor utama.
2. Pemanfaatan SiLPA Dana Otsus Tahun 2024
   Selain alokasi reguler Tahun Anggaran 2025, pembiayaan dari Dana Otsus juga bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Otsus Tahun 2024, yang terdiri dari:
   - SiLPA Efisiensi, yaitu sisa anggaran akibat pelaksanaan kegiatan yang berhasil diselesaikan dengan biaya lebih rendah dari pagu, tanpa mengurangi kualitas output;
   - SiLPA Non Efisiensi, yaitu sisa anggaran akibat kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi karena kendala teknis, administrasi, atau keterlambatan pelaksanaan.

   Pemanfaatan SiLPA ini menjadi penting dalam mendukung kesinambungan program prioritas yang belum sempat terealisasi pada tahun sebelumnya, sekaligus memperkuat kapasitas belanja daerah pada Tahun 2025.
3. Fokus Sektor Prioritas
   Sejalan dengan amanat regulasi Otsus Papua, penggunaan Dana Otsus diarahkan pada sektor prioritas, yakni:

- Pendidikan (minimal 30%),
- Kesehatan (minimal 20%),
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat,
- Pembangunan infrastruktur dasar,
- Perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua,
- Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas kelembagaan.

4. Prinsip Efisiensi dan Akuntabilitas
   Pengelolaan Dana Otsus dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menekankan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dengan memperkuat integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dana Otsus diarahkan pada program yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar serapan anggaran.
5. Sinergi dengan Sumber Dana Lain
   Untuk mengoptimalkan pembangunan, Dana Otsus disinergikan dengan DAU, DAK, DBH, serta Dana Transfer Lainnya sehingga tercapai integrasi program lintas sektor dan perangkat daerah, serta menghindari duplikasi belanja.

Dengan kebijakan pembiayaan tersebut, diharapkan Dana Otonomi Khusus pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mampu memperkuat pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Sarmi, terutama peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat khususnya orang asli Papua (OAP).

Pagu dan prosentase pembagian dana otonomi khusus Kabupaten Sarmi pada perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Pagu dan Prosentase Pembagian Dana Otonomi Khusus pada
Rencana Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025

NO	OPD	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG		
		ALOKASI OTSUS 1%	ALOKASI OTSUS 1,25%	ALOKASI DTI	ALOKASI OTSUS 1%	ALOKASI OTSUS 1,25%	ALOKASI DTI	ALOKASI OTSUS 1%	ALOKASI OTSUS 1,25%	ALOKASI DTI
A	**TOTAL ALOKASI**	**54.159.528.000,00**	**71.059.360.000,00**	**13.213.000.035,00**	**57.441.224.548,00**	**76.635.794.603,00**	**13.503.862.801,00**	**3.281.696.548,00**	**5.576.434.603,00**	**290.862.766,00**
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.729.764.000,00	34.559.360.000,00		6.555.310.247,00	36.649.360.000,00		825.546.247,00	2.090.000.000,00	
2	DINAS KESEHATAN	5.829.764.000,00	11.500.000.000,00		7.585.914.301,00	13.248.250.206,00		1.756.150.301,00	1.748.250.206,00	
3	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	700.000.000,00			700.000.000,00				-	
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	700.000.000,00			700.000.000,00				-	
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11.000.000.000,00		11.213.000.035,00	11.000.000.000,00		11.413.000.035,00		-	200.000.000,00
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16.000.000.000,00			16.700.000.000,00		90.862.766,00	700.000.000,00	-	90.862.766,00
7	DINAS SOSIAL	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00				-	
8	DINAS TENAGA KERJA	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00				-	
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	2.200.000.000,00			2.200.000.000,00				-	
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	700.000.000,00			700.000.000,00				-	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00				-	
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	800.000.000,00			800.000.000,00				-	
13	DINAS PERTANIAN		8.000.000.000,00			8.487.462.398,00		-	487.462.398,00	
14	DINAS PARIWISATA		3.000.000.000,00			3.000.000.000,00		-	-	
15	DINAS KETAHANAN PANGAN		3.000.000.000,00			3.000.000.000,00		-	-	
16	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM		3.000.000.000,00			3.070.000.000,00		-	70.000.000,00	
17	DINAS PERIKANAN		3.000.000.000,00			3.000.000.000,00		-	-	
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00				-	
19	BADAN KEPEGAWIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00				-	
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00				-	
21	INSPEKTORAT DAERAH	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00				-	
22	DINAS PERHUBUNGAN			1.000.000.000,00			1.000.000.000,00		-	
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00				-	
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	-	-	
25	RSUD		5.000.000.000,00			6.180.721.999,00		-	1.180.721.999,00	
B	**TOTAL DISTRIBUSI**	**54.159.528.000,00**	**71.059.360.000,00**	**13.213.000.035,00**	**57.441.224.548,00**	**76.635.794.603,00**	**13.503.862.801,00**			
C	**SELISIH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Permasalahan pembangunan sering kali dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Setiap permasalahan harus dapat ditangani dan diantisipasi oleh Pemerintah. Adapun sumber permasalahan pembangunan dapat berasal dari internal Pemerintah maupun berasal dari permasalahan eksternal.

Setiap permasalahan pembangunan yang terjadi di Pemerintah Daerah pasti membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, prioritas pembangunan dibutuhkan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pembangunan tersebut.

Tujuan penyusunan prioritas pembangunan lebih diarahkan untuk mengetahui permasalahan pembangunan yang memiliki pengaruh lebih terhadap proses pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat berfungsi untuk dapat mengoptimalkan pendanaan yang bersifat terbatas agar tepat sasaran. Prioritas pembangunan merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang akan diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, dan harus kesinambungan dari program prioritas yang belum mencapai target.

Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sarmi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Sarmi. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Papua guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, maka berikut ini disajikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Papua.

Prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi pada tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua RPD Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

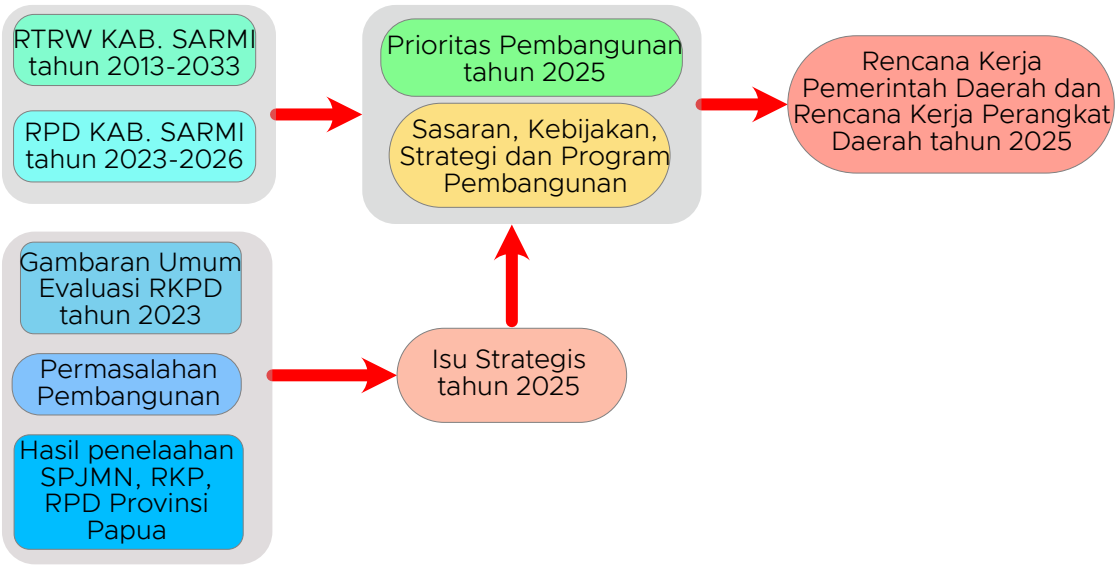

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarmi tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Sarmi tahun 2013-2033; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2022-2023; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025; (5) Prioritas Provinsi Papua dalam RPD provinsi Papua tahun 2024-2026.

Pembangunan daerah Kabupaten Sarmi tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap Agenda pembangunan. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada rumusan agenda pembangunan serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPD 2023-2026 selain menerjemahkan tujuan dari agenda pembangunan daerah, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran RPD 2023-2026 Kabupaten Sarmi merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarmi tahun 2005-2025.

Mengacu pada agenda pembangunan pada RPJMN teknokratik 2025-2029, sasaran stratejik dan arah kebijakan RPD Provinsi Papua 2024-2026, sasaran pokok, arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sarmi 2002-2025,

isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, dirumuskan 5 (lima) Agenda Pembangunan dalam RPD Kabupaten Sarmi 2023-2026 sebagai berikut.

Agenda 1 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Religius, Berbudaya dan Berdaya Saing

Agenda 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Sesuai Arahan RTRW

Agneda 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan;

Agenda 4 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Serta Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Politik Masyarakat Yang Rukun, Bersatu dan Demokratis;

Agenda 5 : Mengoptimalkan Pelayanan Publik yang Prima Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Fokus pembangunan dari masing-masing agenda pembangunan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Agenda dan Fokus Pembangunan Kabupaten Sarmi 2023-2026

Agenda Pembangunan	Fokus Pembangunan	Bidang Urusan Terkait
1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Religius, Berbudaya Dan Berdaya Saing	1. Pengembangan SDM yang berkualitas dan bertaqwa kepada Tuhan YME 2. Penguatan moderasi beragama sesuai kepercayaan kepada Tuhan YME 3. Pengembangan potensi intelektual manusia yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. 4. Peningkatan produktifitas, dan daya saing SDM 5. Penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat 6. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. 7. Pemerataan pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas dan kemudahan akses bagi masyarakat 8. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi dalam pembangunan	(1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (4) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (5) Kepemudaan dan Olahraga; (6) Kebudayaan; (7) Perpustakaan; dan (8) Kesatuan Bangsa dan Politik

Agenda Pembangunan	Fokus Pembangunan	Bidang Urusan Terkait
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata Sesuai Arahan RTRW	1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan layak huni, air bersih, sanitasi dan sumber daya energi yang berkualitas. 2. Peningkatan pembangungan infrastruktur dasar secara merata 3. Pemanfaatan ruang sesuai potensi dan daya dukung lingkungan 4. Pemanfaatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur TIK untuk transformasi digital 5. Pengaturan batas-batas wilayah 6. Optimalisasi kepemilikan sertifikat tanah 7. Pengembangan pusat- pusat pertumbuhan dan pembangunan kampung guna memperluas pelayanan publik yang merata dan terjangkau 8. Optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	(1) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (3) Pertanahan; (4) Perhubungan; (5) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (6) Kecamatan/ Distrik; dan (7) Komunikasi dan Informatika
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan	1. Peningkatan pemerataan ekonomi yang kuat dan berdaya saing. 2. Pengembangan potensi sumber daya ekonomi lokal yang unggul secara berkelanjutan 3. Peningkatan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan kehutanan berbasis ekonomi kerakyatan. 4. Pengembangan dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. 5. Peningkatan kesempatan dan peluang berusaha bagi masyarakat dan kemudahan akses terhadap faktor produksi. 6. Peningkatan kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah 7. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah. 8. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan	1) Pangan; (2) Lingkungan Hidup; (3) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; (4) Penanaman Modal; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Pariwisata; (7) Pertanian; (8) Energi dan Sumber Daya Mineral; (9) Perdagangan; (10) Perindustrian; dan (11) Keuangan

Agenda Pembangunan	Fokus Pembangunan	Bidang Urusan Terkait
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan	9. Pemantapan pembangunan berkelanjutan (pembangunan hijau/rendah karbon) 10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 11. Peningkatan edukasi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan ekologi 12. Peningkatan interaksi kehidupan sosial masyarakat dengan lingkungan	1) Pangan; (2) Lingkungan Hidup; (3) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; (4) Penanaman Modal; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Pariwisata; (7) Pertanian; (8) Energi dan Sumber Daya Mineral; (9) Perdagangan; (10) Perindustrian; dan (11) Keuangan
4. Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Serta Wawasan Kebangsaan Dan Kehidupan Politik Masyarakat Yang Rukun, Bersatu Dan Demokratis	1. Pemantapan kehidupan yang aman dan damai 2. Pemantapan kehidupan masyarakat yang patuh, dan tertib terhadap peraturan hukum 3. Peningkatan layanan pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan politik masyarakat yang berbudaya, rukun, bersatu dan demokratis 5. Peningkatan kualitas pelayanan produk-produk hukum	(1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; (2) Sosial; (3) Sekretariat Daerah; (4) Sekretariat DPRD; dan (5) Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Mengoptimalkan Pelayanan Publik Yang Prima Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	1. Peningkatan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 2. Peningkatan profesionalitas kerja aparatur dalam melayani masyarakat 3. Peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap aparatur dalam pelayanan publik 4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 5. Peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. 6. Pemerataan pelayanan publik yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan	(1) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (2) Statistik; (3) Persandian; (4) Kearsipan; (5) Perencanaan; (6) Keuangan; (7) Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan; (8) Penelitian dan Pengembangan; (9) Inspektorat; dan (10) semua bidang urusan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2023 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sarmi selama 4 (empat) tahun sesuai RPD 2023– 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan (1) ; Meningkatkan percepatan pembangunan SDM unggul, berkarakter dan beriman. Manusia merupakan modal utama pembangunan untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran yang harus dicapai adalah: 1) Meningkatnya kualitas SDM religius dan berbudaya 2) Meningkatnya aksesibiltas dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan 3) Meningkatnya SDM yang unggul dan produktif dalam menjawab tantangan era perubahan 4) Optimalnya Pengarusutamaan Gender serta perlindungan perempuan dan anak.

Tujuan (2); Meningkatkan pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar dan air bersih yang merata. Sarana prasarana Infrastruktur Dasar, Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia dan untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran dari tujuan ini adalah: 1) Meningkatnya kualitas dana kuantitas jalan dan jembatan serta penataan drainase; 2) Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak; 3) Terpenuhinya sarana, prasarana dan utilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh.

Tujuan (3); Meningkatkan konektivitas dan moda transportasi wilayah. Sasarannya yaitu Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah Cakupan layanan armada

Tujuan (4); Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis penataan ruang yang berkelanjutan. Sasaran 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 2) Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 3) Optimalnya cakupan pelayanan persampahan.

Tujuan (5); Meningkatkan mitigasi dan penanganan bencana daerah. Sasarannya yaitu Meningkatnya penanganan dan penanggulangan resiko bencana.

Tujuan (6); Meningkatkan kualitas sektor perekonomian dalam perwujudan kemandirian daerah. Sasaran; 1) Meningkatnya produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan; 2) Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah; 3) Meningkatnya daya saing pariwisata; 4) Meningkatnya daya saing pariwisata; 5) Meningkatnya pendapatan asli daerah.

Tujuan (7); Meningkatkan kemandirian pangan daerah. Sasaran; 1) Meningkatnya ketahanan pangan.

Tujuan (8); Mengembangkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kampung/kelurahan. Sasarannya yaitu Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata.

Tujuan (9); Meningkatkan nilai-nilai kerukunan masyarakat yang bersatu dan demokratis. Sasaran 1) Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah; 2) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik.

Tujuan (10); Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga melalui jaminan dan perlindungan sosial. Sasaran; 1) Meningkatnya pemberdayaan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 2) Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat.

Tujuan (11); Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien. Sasaran 1) Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2) Meningkatnya kualitas Layanan Publik 3) Meningkatnya kualitas manajemen ASN; 4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan; 5) Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah; 6) Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas.

Tabel 4.2.
Rumusan Tujuan, Sasaran Dan Indikator Pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026

KODE	Agenda/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		
A1	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius, Berbudaya danBerdaya Saing**									
TI	**Meningkatkan percepatan pembangunan SDM unggul, berkarakter dan beriman**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**6.394**	**6.420**	**6.447**	**6.473**	**6.500**	**6.500**	
S1	Meningkatnya kualitas SDM religius danberbudaya	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	4.000	4.427	4.899	5.422	6.000	6.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
S2	Meningkatnya aksesibiltas danmutu penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan	Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	883	953	1.029	1.111	1.200	1.200	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Orang	200	230	265	304	350	350	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		Angka Harapan Hidup	Tahun	6.646	6.684	6.723	6.761	6.800	6.800	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
S3	Meningkatnya SDM yang unggul danproduktif dalam menjawab tantangan era perubahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	6.427	668	694	722	750	75	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	3.000	3.320	3.674	4.066	4.500	4.500	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Event	N/A	1	1	1	1	4	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
S4	Optimalnya Pengarusutamaan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	8.235	8.276	8.317	8.358	8.400	8.400	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Predikat Kota Layak Anak	Predikat	N/A	Inisiasi	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	Agenda/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		
A2	**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas DanMerata Sesuai Arahan RTRW**									
T2	**Meningkatkan pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar dan air bersih yang merata**	**Indeks Kemahalan Konstruksi**	**Indeks**	**13.883**	**13.524**	**1 31,73**	**12.832**	**125 00**	**125**	
S5	Meningkatnya kualitas dana kuantitas jalan danjembatan serta penataan drainase	Persentase jalan dalam kandisi mantap	Persen	973	1.232	1.560	1.975	2.500	25	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum DanPenataan Ruang
S6	Meningkatnya pemerataan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	8.982	9.109	9.237	9.368	9.500	9.500	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	7.516	7.634	7.754	7.876	8.000	8.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
S7	Terpenuhinya sarana, prasarana danutilitas perumahan guna menekan kawasan permukiman yang tidak kumuh	Rasio rumah layak huni	Persen	7.000	7.122	7.246	7.372	7.500	7.500	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase kawasan kumuh	Ha	116	112	108	104	100	100	
T3	**Meningkatkan konektivitas dan moda transportasi wilayah**	**Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**	**Km/Unit**	**0,08850**	**0,08950**	**0,09047**	**0,09145**	**0,09244**	**0,09244**	
S8	Meningkatnya layanan transportasi antar wilayah	Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	3,61	3,92	4,25	4,61	5,00	5,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	N/A	250	361	520	750	750	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Arus pergerakan bongkar muat barang angkutan udara	Kg	N/A	500	721	1040	1500	1500	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

KODE	Agenda/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		
T4	**Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis penataan ruang yang berkelanjutan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**8.740**	**8.780**	**8.860**	**8.882**	**8.904**	**8.904**	
S9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	7.700	7.800	8.000	8.180	8.364	8.364	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	9.001	9.002	9.003	9.012	9.021	9.021	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
S10	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
S11	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	500	1.000	1.500	2.000	2.500	2.500	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Ketersediaan TPA yang terkelola secara baik	Ada /Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
T5	**Menigkatkan mitigasi danpenanganan bencana daerah**	**Indeks Resiko Bencana**	**Kelas Resiko**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Sedang**	**Sedang**	**Sedang**	
S12	Meningkatnya penanganan danpenanggulangan resiko bencana	Persentase korban bencana alam dansosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dansetelah tanggapdarurat bencana (SPM)	Persen	80	85	90	95	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman DanKetertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

KODE	Agenda/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		
A3	**Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Kewilayahan Secara Berkelanjutan**									
T6	**Meningkatkan kualitas sektor perekonomian dalam perwujudankemandirian daerah**	**Pertumbuhan ekonomi**	**Persen**	**438**	**479**	**523**	**572**	**625**	**625**	
S13	Meningakatnya produktivitas pertanian perkebunan danperikanan	Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	Persen	1.945	2.006	2.069	2.133	2.200	2.200	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Kontribusi sektor peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	117	141	171	207	250	250	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
		Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen	4.896	5.040	5.189	5.342	5.500	5.500	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
S14	Meningkatnya nilai investasi dan perluasan lapangan kerja berbasis produk unggulan daerah	Nilai realisasi invetasi tahunan (PMA / PMDN)	Rp. Miliar	293	3.063	3.202	3.348	3.500	3.500	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	526	457	397	345	300	300	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	9	10	11	13	15	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	1,88	2,02	2,17	2,33	2,50	2,50	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
		Persentase UMKM dan IKM aktif	Persen	31,00	34,03	37,35	41,00	45,00	45,00	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		Persentase koperasi aktif	Persen	25,00	31,12	38,73	48,21	60,00	60,00	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

KODE	Agenda/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		
S15	Meningkatnya daya saing pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen	832	871	912	955	1.000	1.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Persentase peningkatan wisatawan (WNA / WNI)	Persen	125	149	177	210	250	250	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
S16	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Peningkatan nilai PAD	Persen	15	161	173	186	200	200	Keuangan
T7	**Meningkatkan kemandirian pangan daerah**	**Indeks ketahanan pangan**	**Indeks**	**4.468**	**4.501**	**4.534**	**4.567**	**4.600**	**4.600**	
S17	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH	5kor	65	6.622	6.745	6.872	7.000	7.000	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
T8	**Mengembangkan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kampung/ kelurahan**	**Indek Desa Membangun**	**Indeks**	**00.000**	**0,5030**	**0,5086**	**0,5143**	**0,5200**	**0,5200**	
S18	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kampung/kelurahan yang merata	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat DanDesa
A4	**Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Serta Wawasan Kebangsaan Dan Kehidupan Politik Masyarakat Yang Rukun, Bersatu dan Demokratis**									
T9	Meningkatkan nilai-nilai kerukunan masyarakat dan bersatu dan demokratis	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	80,20	80,89	81,59	82,29	83,00	83,00	
S19	Meningkatnya kondusivitas wilayah serta kepatuhan terhadap produk hukum daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
S20	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang rukun berlandaskan wawasan kebangsaan dan politik	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kesatuan Bangsa dan Politik
T10	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga melalui jaminan dan perlindungan sosial	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	72,36	73,01	73,67	74,33	75,00	75,00	
S21	Meningkatnya pemberdayaan dan rehabitasi kesejahteraan sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	45,00	46,20	47,43	48,70	50,00	50,00	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	60,00	61,21	62,45	63,71	65,00	65,00	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
S22	Meningkatnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial masyarakat adat	Cakupan Layanan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Persen	35,00	36,19	37,42	38,69	40,00	40,00	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

KODE	Agenda/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		
A5	**Mengoptimalkan Pelayanan Publik Yang Prima Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel**									
T11	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif da efisien**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**N/A**	**C**	**C**	**C**	**CC**	**CC**	
S23	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Predikat	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
S24	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Tingkat keamanan penyelenggaraan e-government	Persen	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
		Tingkat Cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	75,00	77,38	79,84	82,38	85,00	85,00	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
		Rata-Rata lama kepengurusan perijinan	Hari	5,00	5,00	3,00	3,00	2,00	2,00	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	75,00	75,74	76,49	77,24	78,00	78,00	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		Persentase layanan kearsipan berbasis elektronik	Indeks	50,00	51,21	52,44	53,70	55,00	55,00	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
		Persentase penegakan terhadap Perda dan Perjaka	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Tertib Hukum Lingkungan (Ijin lingkungan yang direkomendasikan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Persentase daerah yang terjangkau layanan telekomunikasi dan internet	Persen	35,00	35,73	36,47	37,23	38,00	38,00	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

KODE	Agenda/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD	URUSAN PERANGKAT DAERAH
					2023	2024	2025	2026		
S25	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	Predikat	N/A	46,00	50,60	55,66	61,23	61,23	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
S26	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	C	C	C	CC	B	B	Sekretariat Daerah
		Nilai LKJP Kabupaten	Skala Nilai	C	C	CC	B	BB	BB	Sekretariat Daerah
S27	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
		Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	90,00	91,22	92,47	93,72	95,00	95,00	Perencanaan
S28	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas	Maturitas SPIP	Level	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	Inspektorat Daerah
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Inspektorat Daerah

4.2. Prioritas Pembangunan tahun 2025.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-3 (tiga) RPD Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Papua tahun 2025.

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. ***"Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,*** dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. ***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut.

Gambar 4.2
Sasaran Pembangunan 2025

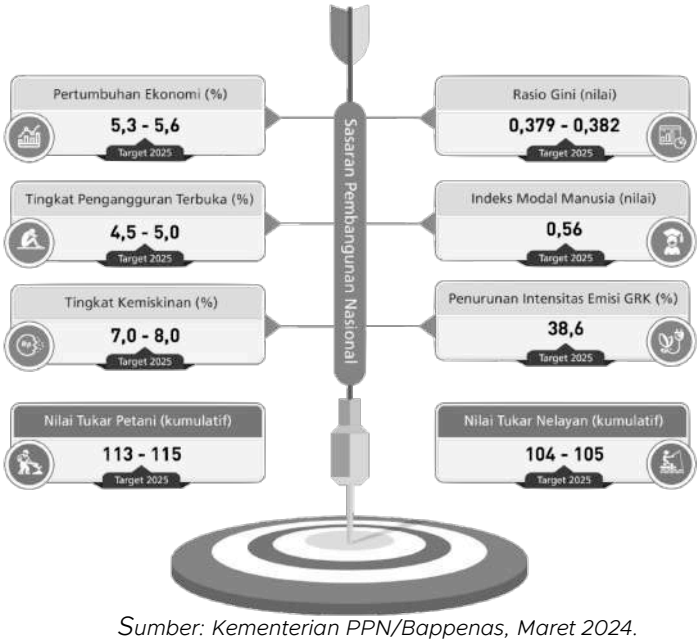

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

Gambar 4.3
Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 2
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PRIORITAS NASIONAL 1
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

4.2.2 Arahan RIPPP 2021-2041

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua maka telah ditetap Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 yang memuat langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan di tanah Papua. RIPPP membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Secara filosofis, RIPPP merupakan penjabaran tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945 yang disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan2030 (sustainable development goals).

Dalam dokumen RIPPP dinyatakan bahwa Visi Pembangunan Papua 2041 ***"Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera".*** Upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui **3 (tiga) misi dan sasaran indikator** sebagai berikut:

a. **Misi-1**: memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengansasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikjator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.
b. **Misi-2**: memberikan pelayanan pendidikan yang berkualotas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter d a n mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).
c. **Misi-3**; meningkatkan kokmpetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Gambar 4.4
Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua

	INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2041
PAPUA SEHAT sasaran : Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk	Umur harapan hidup (UHH) (tahun)	65,93 - 66,14	68,66 - 68,67
	Prevalensi stunting (%)	29,50 - 26,20	10,00
PAPUA CERDAS sasaran: Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk	Harapan lama sekolah (HLS) (tahun)	11,11 - 13,13	14,59 - 16,61
	Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun)	6,76 - 7,69	9,36 - 10,37
PAPUA PRODUKTIF sasaran : Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk	Tingkat kemiskinan (%)	27,38 - 21,82	5,99 - 5,00
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,84 - 3,33	4,11 - 1,73
	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	10,30	6,30

Dimensi pembangunan yang tertuang dalam RIPPP meliputi Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua produktif yang masing-masing dapat diuraikan lagi sebagai berikut:

a. Papua Sehat
   1) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
   2) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan
   3) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.

b. Papua Cerdas
   1) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;
   2) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;
   3) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan
   4) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

c. Papua Produktif
   1) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;
   2) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global;
   3) Sumber daya alam yang berkelanjutan;
   4) Ekonomi lokal; dan
   5) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua

Produktif, dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan. Kondisi perlu meliputi adanya intervensi di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan dan tanah adat/ulayat, kebudayaan dan harmonisasi sosial.

4.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2025.

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025 merupakan satu proses konsolidasi beberapa arahan yang telah diberikan oleh beberapa dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah lainnya, berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 serta pemetaan terhadap permasalahan serta isu strategis yang mengemuka di Papua. Selain itu, uraian prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga sangat terkait dengan tema pembangunan daerah yang disusung pada tahun 2025 seiring dengan adanya faktor- faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Papua tahun 2025.

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijkan yang tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021, disamping isu strategis paling mutakhir yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2025 adalah; ***Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua.***

Sesuai dengan tema pembangunan tersebut diatas, Sasaran pembangunan nasional dan Papua Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sasaran Target Pembangunan tahun 2025

No	Indikator	Nasional	Papua
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6	4,4 -4,9
2	Kemiskinan	7-8	16 -16,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5	6,3 - 6,8
4	Indeks Modal Manusia	0,56	0,45
5	Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,380 -0,383
6	Intensitas Emisi GRK	38,6	59,28

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2025 yang telah dirumuskan diatas maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2023 yaitu:

a. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
b. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
c. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
d. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

4.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2025 disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan Kabupaten Sarmi dimana masa pengabdian Bupati yang habis pada tahun 2022, penentuan Tujuan dan Sasaran disusun dengan mengacu kepada Misi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sarmi tahun 2005-2025, dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Arah kebijakan Kabupaten Sarmi merupakan fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode 2023-2026. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus atau tema

dalam setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan amanah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi tahun 2025 dengan tema ***"Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Perekonomian Yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Kebhinekaan".*** Merujuk kepada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sarmi 2005-2025, serta berkembangnya isu-isu strategis yang penting dan mendesak, maka rumusan fokus atau tema pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026 dapat disampaikan sebagai berikut.

Gambar 4.1.
Tema dan Fokus Pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026

4.2.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan tahun Ketiga (2025).

Tema pembangunan tahun 2025 adalah ***Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Perekonomian Yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Kebhinekaan***. Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPD (2025) ini masih fokus pada pembangunan sebagaimana yang dilakukan pada tahun kedua. Optimalisasi pemenuhan infrastruktur dasar terutama jalan dan jembatan, sumber daya listrik,air bersih dan perumahan layak huni dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjuta. Semua ini bertujuan

mencapai Sarmi yang maju dan sejahtera dalam kebhinekaan sebagaimana yang dirumuskan sebagai visi dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Sarmi Tahun 2005-2025.

Berdasarkan strategi pengembangan kabupaten/kota menurut RKP 2025, Kabupaten Sarmi masuk dalam wilayah adat Mamta. Adapun strategi pengembangan wilayah Mamta adalah Hilirisasi industri sagu, kelapa, kakao dan pengembangan pariwisata Danau dan wisata bahari. Dalam implementasi kegiatan prioritas tersebut juga perlu mempertimbangkan posisi strategi Kabupaten Sarmi secara Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selain berdasarkan wilayah adat, pembangunan Kabupaten Sarmi berdasarkan RKP dilakukan pada koridor pemerataan yang mencakup kegiatan prioritas: (1)pengembangan sektor unggulan; (2)pengembangan kawasan strategis; (3)pengembangan kawasan perkotaan; (4)pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi; serta (5)penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan. Dengan pendekatan melalui koridor pemerataan Kabupaten Sarmi mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (hinterland) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak- hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (no-one left behind).

Arah Pengembangan Wilayah Sarmi dalam RTRW Papua dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua tahun 2024-2026, Kabupaten Sarmi terletak di wilayah adat Mamta dengan kondisi topografi pesisir. Dalam sistem perkotaan di Provinsi Papua, terdapat Perkotaan di Kabupaten Sarmi yang memiliki kedudukan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), serta berperan sebagai pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah. Kabupaten Sarmi memiliki posisi strategis secara regional karena ditetapkan sebagai Kawasan Strategi Pengelolaan Ekonomi Rendah Karbon, Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, Kawasan Strategis Sosial Budaya. Hal

ini menjadi strategis karena mendukung kebijakan umum pengembangan wilayah di Provinsi Papua tahun 2024-2026 yaitu "Green Growth berbasis wilayah adat", khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan propinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kabupaten Sarmi tahun 2023-2026 maka pada tahun 2025 Pembangunan Kabupaten Sarmi diprioritaskan pada:

1. Peningkatan SDM yang berkualitas;
2. Pemenuhan dan Peningkatan pembangungan infrastruktur dasar (Jalan Jembatan, Perumahan layak huni dan air bersih;
3. Penguatan kemampuan SDM berbasis potensi unggulan wilayah;
4. Pemantapan kehidupan yang aman, damai rukun, bersatu dan demokratis;
5. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah untuk kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan RPD 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia 64,20
2. Pertumbuhan ekonomi 4,79 persen
3. Pendapatan Per Kapita 73,21 Juta
4. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,57 persen
5. Persentase Penduduk 13,15 persen
6. Indeks Gini Rasio 0,401

Prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi yang disusun berdasarkan RPD 2023-2026 juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Persandingan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Papua serta prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi sebagaimana dalam matriks berikut ini:

Tabel 4.2

Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Prov. Papua, dan Kabupaten Sarmi tahun 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SARMI Tahun 2025
Tema Pembangunan	***"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***	***Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua.***	***Optimalisasi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Perekonomian Yang Berkelanjutan Guna Mencapai Sarmi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Kebhinekaan.***
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	· Pertumbuhan ekonomi yang iklusif, berkeadilan dan berkelanjutan;	· **(PP3)** Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis potensi unggulan wilayah.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	· Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas	· **(PP2)** Pemenuhan dan Peningkatan pembangungan infrastruktur dasar (Jalan/Jembatan, Perumahan layak huni dan air bersih)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;	· Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM	· **(PP1)** Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas; · **(PP3)** Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis potensi unggulan wilayah
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasa	· Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas	· **(PP2)** Pemenuhan dan Peningkatan pembangungan infrastruktur dasar (Jalan/Jembatan, Perumahan layak huni dan air bersih)
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	· Pertumbuhan ekonomi yang iklusif, berkeadilan dan berkelanjutan; · Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas.	· **(PP3)** Penguatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis potensi unggulan wilayah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	· Peningkatan Keamanan dan Ketertiban · Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	· **(PP4)** Pemantapan kehidupan yang aman, damai rukun, bersatu dan demokratis; · **(PP5)** Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah untuk kesejahteraan Masyarakat

4.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi Terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarmi tahun 2025.

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1. Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi.

Pokir dari anggota DRPD merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu masukan yang penting dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Sarmi tahun 2025. Usulan Pokir tersebut diinput melalui aplikasi Sistem Informnasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan disinergikan dengan prioritas program/kegiatan, kewenangan dan persyaratan teknis lainnya.

Adapun rumusan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Kabupaten Sarmi, sebagaimana yang telah di sampaikan oleh masing-masing Komisi DPRD sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan.

(1) Perluasan dan pemerataan akses penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Masih terdapat guru yang tidak berada di tempat tugas, terutama di kampung-kampung dengan akses sulit.
(3) Masih ada guru yang belum memiliki tempat tinggal.
(4) Masih ada sekolah yang tidak ada murid.
(5) Belum tersedianya alat transportasi khusus untuk pelajar.
(6) Masih terdapat sekolah dengan ketersediaan sarana prasarana pendukung dengan dalam kondisi rusak berat.
(7) Belum dilakukan secara optimal pelayanan pada Pendidikan anak usia dini (PAUD).
(8) Perlu ada Pembangunan sarana/prasarana utilitas sekolah seperti pagar sekolah; pembangunan asrama, gedung serba guna dan penimbunan sekolah.

b. Urusan Kesehatan.

(1) Masih ada kampung dengan akses sulit ke puskesmas sehingga harus di optimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan membangun PUSTU.

(2) Masih banyak terdapat puskesmas di daerah–daerah terpencil tidak memiliki alat kesehatan yang memadai dalam menangani masalah kesehatan di kampung.
(3) Masih ada tenaga medis yang tidak memiliki rumah.
(4) Terdapat PUSTU dan fasilitas kesehatan lainnya yang di jumpai dalam kondisi Rusak berat dan rusak ringan namun belum di tangani perbaikannya dengan baik.
(5) Peningkatan pemerataan dan perluasan akses penyelenggaraan kesehatan.
(6) Perlu penyediaan mobil ambulance untuk PUSKESMAS dengan kondisi ambulance rusak berat.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(1) Pembangunan, peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di wilayah Kabupaten Sarmi, terutama Daerah dengan kondisi jalan rusak.
(2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan di permukiman/ perkampungan.
(3) Peningkatan pembangunan drainase, normalisasi sungai untuk meminimalisir banjir.
(4) Pembangunan Jalan Produksi untuk lebih mempermudah akses masyarakat ke lahan-lahan produksi pertanian.
(5) Pembangunan dan pemeliharaan Sarana/prasarana tempat peribadatan.
(6) Perlu adanya pembangunan box culvert sebagai penghubung sarana lalulintas manusia maupun kendaraan dan juga untuk memenuhi kebutuhan saluran drainase.
(7) Penyediaan air bersih yang layak di konsumsi oleh masyarakat.
(8) Perlu ada pembangunan jembatan penyeberangan yang layak pakai dengan memperhitungkan keadaan lingkungan sekitar.
(9) Pembanyediaan MCK bagi masyarakat dan pada fasilitas umum dengan mempertimbangkan keberfungsiannya.

d. Urusan Perumahan dan Permukiman.

(1) Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

e. Urusan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

(1) Tidak adanya penegakan Perda/Perkada di sebabkan belum adanya tenaga PPNS pada Dinas Pol PP dan kurangnya dukungan anggaran terhadap tugas fungsi penegakan PERDA.

f. Urusan Perpustakaan .

(1) Masih rendahnya minat baca dan belajar masyarakat terutama di kampung-kampung.

(2) Belum tersedianya taman baca atau perpustakaan di kampung untuk menumbuhkan minat baca masyarakat.

g. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

(1) Masih ada masyarakat di Kabupaten Sarmi yang belum memiliki identitas kependudukan.

(2) Perlu adanya inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Perlu adanya bimbingan teknis bagi ASN dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kompetensi ASN.

(4) Perlu adanya pelayanan jemput bola ke masyarakat dalam upaya optimalisasi cakupan layanan kependudukan bagi masyarakat.

(5) Perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

h. Urusan Pariwisata.

(1) Dalam rangka pengembangan pariwisata maka diperlukan Penyediaan sarana dan prasarana dibidang pariwisata terutama untuk menjangkau daerah-daerah pulau di Distrik Sarmi sehingga dapat memberikan PAD bagi Kabupaten Sarmi.

i. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(1) Masih belum optimalnya kelembagaan kampung baik dalam melaksanakan pembangunan di kampung maupun dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan kampung melalui bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur.

(2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kampung.

j. Pemuda dan Olah Raga

(1) Pembangunan sarana dan prasarana olah raga bagi masyarakat untuk meningkatkan minat bakat olahraga masyarakat.

(2) Pembinaan minat dan bakat masyarakat dalam berolah raga.

k. Urusan Pertanian

(1) Diperlukan pendampingan dan pembukaan lahan pertanian kepada masyarakat melalui optimalisasi pelayanan tenaga penyuluh pertanian dengan memperhatikan pemenuhan kesejahteraan bagi tenaga penyuluh lapangan baik tempat tinggal, sarana dan prasarana dan juga insentif.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
(3) Perlu adanya pemetaan loikasi pertanian tanam yang sesuai dengan struktur tanah yang ada.
(4) Pengadaan bibit ternak dan bibit tanaman bagi masyarakat yang disertai dengan pendampingan.
(5) Pembangunan ranch / kandang peternakan sapi.

l. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

(1) Diperlukan pembangunan dan perbaikan pasar yang dalam kondisi rusak.
(2) Mendorong pengembangan dan peningkatan hasil produksi UMKM di Kabupaten Sarmi dengan cara memberikan dukungan modal usaha bagi UMKM dan bantuan peralatan yang memadai.

4.3.2. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sarmi.

Telaah rumusan pokok-pokok pikiran DPRP menjadi bagian sangat penting dalam upaya mengakomodir berbagai konsep pemikiran yang diajukan oleh pihak legislatif guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Sarmi pada tahun 2025.

Melalui penelaahan ini, dapat disinkronkan dan disinergikan rumusan dan usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh pihak legislatif ke dalam RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Urusan Pendidikan.

Pemerataan dalam pendistribusian guru merupakan permasalahan yang mendasar pada bidang Pendidikan di Kabupaten Sarmi. Hingga saat ini masih dirasakan adanya ketidakmerataan dalam pendistribusian guru antara wilayah perkotaan dengan wilayah kampung. Fenomena yang terjadi sebagian besar guru berada di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah kampung-kampung yang dengan akses sulit masih banyak kekurangan guru. Permasalahan lainnya terkait

eksistensi guru adalah tingkat kehadiran guru. Faktor-faktor rendahnya kesejahteraan guru, jarak yang jauh, topografi yang ekstrim, minimnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi merupakan faktor penyebab yang perlu diatasi segera di tahun 2024, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Kemudian untuk sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk penunjang pengajaran dan pembelajaran murid (misalkan buku pelajaran, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya), meskipun setiap tahun telah menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan pendidikan, dan terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya namun sampai saat ini masih terlihat belum optimal, sehingga kualitas lulusan sekolah belum meningkat signifikan. Semua kondisi faktual ini (belum optimalnya guru dan prasarana pendidikan) menjadi salah satu penyebab RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) di Kabupaten Sarmi yang masih rendah, yang nantinya berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ketersediaan guru, pemerintah Kabupaten Sarmi melaksanakan perekrutan guru kontrak. Sedangkan untuk meningkatkan Rata Lama Sekolah (RLS), Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sesuai mandatory spending yakni 20 persen dari APBD Kabupaten Sarmi. Selain itu peningkatan RLS juga dilakukan melalui optimalisasi lembaga pendidikan disemua jenjang pendidikan dan organisasi profesi pendidik. Hal lain yang tidak kalah penting dan telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan adalah pemberian Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan kelengkapan siswa (seragam, buku tulis, dan kelengkapan sekolah lainnya), Pelatihan dan sertifikasi guru, pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Pada tahun 2023 Pemerintah daerah juga telah melakukan penandatanganan kerjasama bersama bersama beberapa lembaga mitra dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Bersama Yayasan Surya Institute (Prof. Yohanes Surya) telah diselenggarakan kegiatan belajar matematika dengan metode GASING (gampang, asyik dan menyenangkan), kegiatan ini di ikuti oleh guru dan siswa SD dan SMP, bersama Lembaga UNICEF perwakilan Papua telah diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) yang berupaya membuka peluang bagi anak-anak untuk

mengakses pendidikan masa depan yang lebih baik, PAUD-HI sangat berkontribusi dalam mendorong perkembangan fisik dan intelektual anak. Bersama Lembaga Yayasan Nusantara Sejati telah dilaksanakan program literasi baca tulis kelas awal, Program ini menyasar tenaga pendidik yang mana guru dilatih komponen literasi baca tulis dan juga disiplin positif. Program kerja bersama lembaga mitra ini menjadi salah satu program kerja lanjutan pada Rencana Kerja perangkat daerah dinas pendidikan pada tahun 2025.

Berdasarkan seluruh telaah pokok-pokok pikiran DPRD di atas, maka pada RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 telah disusun program/ kegiatan pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
5. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.
6. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota.
8. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Urusan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan di daerah sulit akses telah menjadi program prioritas yang ditetapkan dalam rencana strategis urusan kesehatan, yakni memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat pada daerah terpencil. Daerah yang menjadi sasaran prioritas kegiatan adalah daerah yang mempunyai kriteria sulit dari segi transportasi, dan topografi. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Sarmi juga dilakukan dengan

memprogramkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka kesakitan dan pada tahun 2025 juga dilakukan optimalisasi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan baik RSUD, Puskesmas, dan juga PUSTU di Kabupaten Sarmi. Beranjak dari berbagai masalah pembangunan kesehatan di atas, dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, maka dalam RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 terdapat kegiatan-kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dalam upaya meberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat diantaranya, Pemerintah daerah telah melakukan penendatangan kerjasam bersama RSUD Dok II Jayapura dan juga dalam upaya memberikan jaminan kesehatan menyeluruh kepada Masyarakat pemerintah daerah telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Program ini diselenggarakan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial dan Kabupaten Sarmi telah mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* yang mana *UHC* merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Berdasarkan seluruh telaah pokok pikiran DPRD diatas maka dalam RKPD tahun 2025 telah direncanakan program kegiatan kesehatan yang strategis sebagai berikut;

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
4. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berbagai infrastruktur dasar masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Sarmi dengan penyediaan yang harus

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kondisi geografis. Isu-isu strategis yang mengemuka di tahun 2025 terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagaimana yang tersirat dalam pokok-pokok pikiran DPRD adalah : (1) jaringan jalan dan jembatan yang belum menjangkau wilayah terisolir dan juga dalam wilayah kota yang belum optimal, (2) jalan dalam kondisi yang baik, dan permukaan jalan yang beraspal masih sangat kurang, sehingga mengganggu kelancaran pendistribusian barang dan penumpang (3) kuantitas dan kualitas jembatan yang masih belum memadai menyebabkan hubungan transportasi darat antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadi terhambat dan tidak lancar.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dasar di atas, serta mengakomodir pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD maka dalam RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 telah dibuat program-program pekerjaan umum sebagai berikut :

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
7. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
8. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
9. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
10. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

d. Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah bsik pusat, regional

maupun daerah. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Salah satu isu strategis tahun 2025 tentang perumahan adalah pemenuhan kebutuhan infratruktur dasar yang belum memadai dan masih terlihat timpang dengan masalah pokok Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana dan utilitas perumahan serta masih tingginya kawasan permukiman kumuh. Hal ini sejalan dengan pokok pikiran yang telah di sampiakan oleh DPRD, bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan sebuah kebutuhan mendasar yang sampai saat ini belum terpenuhi secara optimal, masih di jumpai dalam 1 (satu) rumah di huni oleh beberapa kepala keluarga dan hal ini dapat menjadi pemicu konflik.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dasar perumahan di atas, serta mengakomodir pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD maka dalam RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 telah dibuat program kegiatan urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. (Satuan Polisi Pamong Praja).

Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib.

Dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Namun demikian fungsi ini belum optimal dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan hambatan dan masalah yang dihadapi.

Guna mengatasi permasalahan belum optimalnya pelaksanaan urusan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat di atas, serta mengakomodir pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD maka dalam RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 telah dibuat program kegiatan urusan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat sebagai berikut :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil.

Kepemilikan dokumen kependudukan menjadi keharusan bagi seluruh masyarakat. Namun sampai saat ini belum semua masyarakat di wilayah Kabupaten Sarmi memiliki dokumen kependudukan. Setiap tahunnya pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan upaya pelayanan dokumen kependudukan terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah dengan akses sulit.

Berdasarkan telaah pokok-pokok pikiran DPRD di atas, maka untuk RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 telah disusun program pembangunan urusan administrasi kependudukan dan capil di prioritaskan pada;

1. Penataan Pendaftaran Penduduk.
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
3. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
4. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Permasalahan pada urusan pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Sarmi, diantaranya seperti yang di sampaikan pada pokok

pikiran DPRD yaitu; Masih belum optimalnya kelembagaan kampung baik dalam melaksanakan pembangunan di kampung maupun dalam pengelolaan Dana Desa/Kampung.

Tahun 2025 pada rencana kerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Kampung telah direncanakan beberapa program kegiatan antara lain:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

h. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sarmi bahwa Kabupaten Sarmi telah melahirkan atlit-atlit olah raga yang handal. Selain itu juga aktivitas olah raga mebuat orang sehat dan menjauhkan generasi muda dari aktifitas negatif. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi maka dalam RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olah raga yaitu;

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
5. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

i. Urusan Pariwisata.

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sarmi bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 telah dibuat

beberapa program yang terkait dengan urusan pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat yaitu:

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
3. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

j. Urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sarmi bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan spesifik sesuai potensi daerah setempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat, dan pelaku ekonomi swasta. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi maka dalam RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan urusan pertanian yaitu;

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang tersedia, merupakan salah satu prioritas dalam arahan pembangunan bidang ekonomi. Dalam arti yang luas pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kepastian pendapatan bagi keluarga menjadi muara dari semua kegiatan ekonomi. Tentunya proses pemberdayaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang tersedia dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi yang gunakan untuk Mendorong pengembangan dan peningkatan hasil produksi melalui kelompok usaha bersama di Kabupaten Sarmi. Maka pada RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 dalam upaya optomalisasi pemberdayaan masyarakat melalui urusan Koperasi, Usaha kecil dan menengah pada tahun 2025 telah disusun beberapa program yaitu:

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
4. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan.
5. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
8. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota.

BAB 5
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menjelaskan keterkaitan rencana kerja pembangunan dengan kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan prioritas serta kemampuan keuangan daerah, agar perencanaan dan penganggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari aspek pendanaan yang menjadi instrumen utama dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah menjadi bab penting dalam dokumen RKPD Perubahan, karena memuat keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan dengan alokasi sumber daya keuangan yang tersedia.

Bab ini menyajikan uraian mengenai keterpaduan antara program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dengan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan fiskal, serta prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta alokasi pendanaan yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

Selain itu, pada bagian ini juga ditampilkan sinkronisasi antara sasaran pembangunan daerah dengan kerangka pendanaan yang realistis dan terukur, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Dengan demikian, Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ini diharapkan menjadi landasan operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada perubahan RKPD tahun 2025 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1(satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/ rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/ Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah SMP/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs, Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang, Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, SD, SMP dan Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, SD, dan SMP.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), Cakupan pembinaan remaja di sekolah, Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Ibu hamil KEK, Persentase Ibu Hamil yang Anemia, Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan, Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A, Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) , Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram), Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Cakupan pelayanan kesehatan balita, Angka Kematian balita (AKABA) , Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, Prevalensi Stunting pada Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR), Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, Incident Rate DBD per

100.000 penduduk, Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, Angka Penemuan Pneumonia Balita, Deteksi Dini Hepatitis, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Cakupan UCI kelurahan, Cakupan BIAS DT/Td, Cakupan BIAS Campak Rubela, Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar, Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, Cakupan kepesertaan JKN, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK, Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan yang terakreditasi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan, Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat, Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yang memenuhi standart dan persyaratan perijinan, Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu

Cakupan Desa Siaga, Cakupan PHBS tatanan rumah tangga sehat, Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan, Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit, dan Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS), pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Jumlah talud yang di bangun.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penambahan SR SPAM dan pemeliharaan SPAM.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Penambahan SR IPAL dan sanitasi setempat.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Prosestase rekomtek IMB yang terbit.

f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja Jumlah paket Penataan Bangunan dan Lingkungan.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja panjang jalan yang terbangun dan Persentase jumlah jembatan.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi jasa konstruksi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja Pesentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan.

Proram ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau

relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman.

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.

5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda

dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai indikator kinerja Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan juga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM), Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos, dan Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan.

b. Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,

serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM).

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

d. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang Mendapat perlindungan dan jaminan sosial(SPM).

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemgesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Target kinerja dari program ini adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan target kinerja Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, Rasio Kekerasan terhadap perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Persentase PKK aktif, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusu yang memerlukan koordinasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja presentase anak korban kekerasan.

3. Pangan

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan untuk mencapai target kinerja penyediaan infrastruktur pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER).

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar.

4. Pertanahan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/Kota untuk indikator kinerja presentase penyelesaian sengketa tanah.

b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin membuka tanah yang dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah dan pengendalian pemanfaatan tanah negara.

c. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota dengan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

5. Lingkungan Hidup

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan indikator kinerja berupa dokuemen IKPLHD dan dokumen KLHS.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Ketersediaan Laboratorium Pengujian Lingkungan, Presentase Konservasi Lahan, Persentase Konservasi Sumber Mata Air.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan Persentase ruang terbuka hijau dan cakupan layanan penerangan jalan umum.

d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah Kegiatan penegakan hukum lingkungan, Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kab/Kota, Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan IGRK.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat..

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat propinsi. Indikator capaian program ini adalah Jumlah pernghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota, Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup.

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaandan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase penerbitan KIA usia 0-5 tahun.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0- 5 tahun.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator program ini yaitu untuk mencapai ketersediaan database.

7. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR), Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai Rasio akseptor KB baru, Cakupan peserta KB aktif, Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, Persentase Baduta Stunting.

8. Perhubungan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; pengujian berkala kendaraan bermotor; pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/ kota; penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Rasio konektivitas kota dan Kinerja lalu lintas kota.

9. Komunikasi Dan Informatika

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan progran prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengn akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian progam Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian progam Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

f. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

11. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program jumlah promosi penanaman modal.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.

12. Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.

13. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

14. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase SDM di bidang persandian.

15. Kebudayaan

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

b. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.

d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.

16. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

17. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip), Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi di bidangKearsipan.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan Dan Perikanan

a. Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program capaian bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan dan presentase kelompok kelompok pengelola dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

2. Pariwisata

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan cappaian program jumlah objek wisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindunggan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota, peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program jumlah kejadian bencana pertanian.

d. Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

4. Perdagangan

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program adalah Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk dan Ketesediaan infromasi pasokan,harga dan akses pangan daerah.

5. Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome), Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana IKM, Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu persentase peningkatan evaluasi perkembangan kelurahan, Peningkatan fasilitasi forum asosiasi kepala daerah, Peningkatan kapasitas SDM LPMK, sarasehan awal tahun, peningkatan Koordinasi administrasi pemerintahan, peningkatan koordinasi bidang administrasi kewilayahan, peningkatan kualitas laporan dana kelurahan, Peningkatan kualitas LPPD dan LKPJ, Peningkatan keterbukaan informasi publik terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, peningkatan skor LPPD, cakupan bidang kerja sama daerah, Tersusunnya produk hukum daerah, Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum, Terlaksananya pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Dokumen PPRG Setda, Dokumen Rencana Kerja Setda, Dokumen Perjanjian Kinerja Setda, Dokumen Laporan Keuangan Setda, Dokumen LKJIP Setda, Juklak APBD, Standarisasi Harga Satuan, monev bankeu, Rakor POK Kota/Setda dan Pengembangan Simpok, Bintek Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Meningkatnya kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, Meningkatkan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT, Berkurangnya peredaran barang kena cukai ilegal, Berkurangnya peredaran barang kena cukai ilegal, Meningkatnya pengendalian inflasi daerah, Meningkatnya fasilitasi bidang ketenagakerjaan, Meningkatnya infrastruktur dan perhubungan, Meningkatnya Akses Keuangan Daerah bagi pelaku UMKM dan pelajar, Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terdaftar dalam SIKP, Meningkatnya kinerja BUMD, Meningkatnya kinerja BLUD, Penyertaan Modal pada BUMD, Tercapainya laporan penghematan energi di institusi pemerintah, Terpenuhinya kebutuhan air sesuai dengan standar kesehatan.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Capaian program ini yaitu Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang terfasilitasi, Persentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD. Indikator kinerja program ini adalah Peningkatan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD), Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta fasilitasi kerumahtanggaan, Cakupan Administrasi Keuangan.

2. Sekretariat DPRD

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD. Capaian program ini adalah Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi, Cakupan fasilitasi fungsi

Penganggaran, Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah persentase kesesuaian Program RPD ke dalam RKPD.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash managenent (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

3. Kepegawaian

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Persentase jumlah ASN yang menerima Pembinaan Disiplin,

Persentase Jumlah ASN dengan Penilaian Kinerja Baik, Persentase pemenuhan dokumen perencanaan kebutuhan Pegawai, Persentase pelaksanaan pengadaan pegawai, Persentase PNS yang mengikuti assesment, Persentase pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi, Persentase Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

4. Pendidikan dan Pelatihan SDM

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi.

5. Kewilayahan (Distrik)

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kabupaten Sarmi dilaksanakan oleh 10 Distrik yaitu: Distrik Sarmi, Sarmi Timur, Sarmi Selatan, Pantai Barat, Bonggo, Bonggo Timur, Tor Atas, Pantai Timur Pantai Timur Bagian Barat dan Apawer Hulu.

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat distrik

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kampung, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Distrik, Persentase PKK aktif, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Distrik.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah dan Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Distrik.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kampung dengan capaian program Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal dan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu nilai MCP Korsupgah KPK.

G. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program presentase pendidikan Politik yang dilaksanakan.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian program Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian program yaitu Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial.

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan yang mendukung fokus kebijakan pemerintah tentang Penghapusan Kemiskinan pada perubahan RKPD di tahun 2025

NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
1	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	1.469.395.000,00
2	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	9.079.058.000,00
3	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	5.599.988.728,00
4	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	3.742.719.622,00
5	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	917.999.144,00
6	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4.404.310.000,00
7	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.300.000.000,00
8	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	361.450.000,00
9	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	300.000.000,00
10	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	5.780.520.362,00
11	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	316.850.000,00
12	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	952.804.475,00
13	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	600.000.000,00
14	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.301.963.000,00
15	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4.101.425.000,00
16	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	549.470.000,00
17	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	5.036.000.000,00
18	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	250.000.000,00
19	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Mengurangi Beban Pengeluaran	4.446.750.000,00

NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
20	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Mengurangi Beban Pengeluaran	857.598.000,00
21	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatkan Pendapatan	199.999.020,00
22	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	500.000.000,00
23	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	500.000.000,00
24	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	549.999.816,00
25	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	349.999.530,00
26	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	149.999.498,00
27	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	200.000.000,00
28	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	150.000.000,00
29	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	206.000.000,00
30	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	400.000.000,00
31	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	450.000.000,00
32	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	450.000.000,00
33	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Mengurangi Beban Pengeluaran	200.000.000,00
34	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	2.398.250.206,00
35	2025	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	430.000.000,00
36	2025	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	9.282.959.305,00
37	2025	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	150.000.000,00

NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
38	2025	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	325.721.999,00
39	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Unit Air Baku	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	0,00
40	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Tanggul Sungai	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	0,00
41	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	4.712.091.096,00
42	2025	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	28.000.000,00
43	2025	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Meningkatkan Pendapatan	690.187.072,00
44	2025	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	78.760.660,00
45	2025	DINAS SOSIAL	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	221.919.539,00
46	2025	DINAS SOSIAL	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	184.630.441,00
47	2025	DINAS SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	0,00
48	2025	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	99.997.926,00
49	2025	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	653.378.651,00
50	2025	DINAS TENAGA KERJA	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Mengurangi Beban Pengeluaran	599.860.800,00
51	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	939.999.680,00
52	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	930.000.000,00

NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
53	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	930.000.000,00
54	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	100.000.000,00
55	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	100.000.000,00
56	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	350.000.000,00
57	2025	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pendapatan	1.599.990.000,00
58	2025	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	199.999.236,00
59	2025	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Mengurangi Beban Pengeluaran	243.000.000,00
60	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	240.000.000,00
61	2025	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Meningkatkan Pendapatan	121.495.000,00
62	2025	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Meningkatkan Pendapatan	1.689.144.641,00
63	2025	DINAS PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	0,00
64	2025	DINAS PERIKANAN	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	299.993.040,00
65	2025	DINAS PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	299.990.347,00

NO	TAHUN	NAMA SKPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	PAGU
66	2025	DINAS PERIKANAN	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	299.996.666,00
67	2025	DINAS PERIKANAN	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Pendapatan	0,00
68	2025	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	299.980.565,00
69	2025	DINAS PERIKANAN	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	699.995.056,00
70	2025	DINAS PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	268.020.000,00
71	2025	DINAS PERTANIAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	150.000.000,00
72	2025	DINAS PERTANIAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Meningkatkan Pendapatan	329.755.000,00
73	2025	DINAS PERTANIAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	466.194.160,00
74	2025	DINAS PERTANIAN	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	809.741.300,00
75	2025	DISTRIK BONGGO	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	22.000.000,00
76	2025	DISTRIK BONGGO	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	22.000.000,00
TOTAL PAGU					**86.941.351.581,00**

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan SPM pada Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi di tahun 2025

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00
2	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.101.425.000,00
3	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	600.000.000,00
4	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	586.800.000,00
5	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	5.036.000.000,00
6	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	716.312.000,00
7	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.742.719.622,00
8	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.664.795.000,00
9	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.599.988.728,00
10	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.300.000.000,00
11	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.404.310.000,00
12	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.201.758.000,00
13	SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	250.000.000,00
14	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	300.000.000,00
15	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	591.556.875,00
16	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.333.707.900,00
17	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13.363.200.000,00
18	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	917.999.144,00
19	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	50.000.000,00
20	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	149.999.313,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
21	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.976.000.000,00
22	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	199.999.710,00
23	SPM Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.640.000.000,00
24	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan SMK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	250.000.000,00
25	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.854.317.480,00
26	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	578.000.000,00
27	SPM Bidang Pendidikan	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	779.000.000,00
28	SPM Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	690.301.678,00
29	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	500.000.000,00
30	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	500.000.000,00
31	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	150.000.000,00
32	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	549.999.816,00
33	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	349.999.530,00
34	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	149.999.498,00
35	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	200.000.000,00
36	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	299.996.000,00
37	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	150.000.000,00
38	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	206.000.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
39	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	400.000.000,00
40	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	450.000.000,00
41	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	450.000.000,00
42	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4.712.091.096,00
43	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.000.000.000,00
44	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	11.443.500.000,00
45	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	28.540.000,00
46	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	116.400.000,00
47	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	184.800.000,00
48	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	40.000.000,00

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
49	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	0,00
50	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	221.919.539,00
51	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	184.630.441,00
TOTAL						**78.266.066.370,00**

Tabel 5.3
Program dan Kegiatan yang mendukung fokus kebijakan pemerintah tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Stunting pada perubahan RKPD Kabupaten Sarmi di tahun 2025

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	187.629.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	22.160.000,00
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	1.042.635.000,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	660.000,00
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.200.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	56.846.000,00
7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	40.920.000,00
8	DINAS PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	508.056,00
9	DINAS PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.695.000,00
10	DINAS PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	650.000.000,00
11	DINAS PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	9.692.000,00
12	DINAS PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	38.100.000,00
13	DINAS PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
14	DINAS PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.900.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.290.450,00
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.259.000,00
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.785.000,00
18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	590.665.000,00
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	66.634.000,00
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	21.260.000,00
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.800.850,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.973.519,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.705.000,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.370.000,00
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	38.550.000,00
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	800.000,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.000.000,00
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	300.000,00
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.000.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.500.000,00
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	614.000.000,00
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	20.275.662,00
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	24.943.000,00
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	1.500.000,00
35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	26.400.000,00
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	0,00
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	145.400.000,00
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	0,00
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	32.000.000,00
40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	0,00
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	346.380.000,00
42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	354.520.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
43	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	257.750.000,00
44	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	91.520.000,00
45	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	8.450.000,00
46	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	278.000.000,00
47	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	105.000.000,00
48	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	24.000.000,00
49	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	165.280.000,00
50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	357.712.000,00
51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.000.000,00
52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
53	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
55	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
56	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
57	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	720.952.000,00
59	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	447.346.505,00
60	DINAS KETAHANAN PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	124.265.000,00
61	DINAS PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	41.580.000,00
62	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	164.038.000,00
63	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.925.000,00
64	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	36.500.000,00
65	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	40.800.000,00
66	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	3.970.595,00
67	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	508.056,00
68	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	7.500.000,00
69	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	509.800.000,00
70	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	6.300.000,00
71	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	16.000.000,00
72	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	32.000.000,00
73	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	10.500.000,00
74	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	619.539,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
75	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	750.000,00
76	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	206.750.000,00
77	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial	3.300.000,00
78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.000.000,00
79	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	34.848.000,00
80	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	63.000.000,00
81	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	151.656.000,00
82	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.000.000,00
83	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.500.000.000,00
84	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	84.718.000,00
85	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	22.300.000,00
86	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	6.188.000,00
87	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	74.200.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
88	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	48.000.000,00
89	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	21.780.000,00
90	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	52.500.000,00
91	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	4.800.000,00
92	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	19.314.000,00
93	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	166.200.000,00
94	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	45.650.000,00
95	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	5.500.000,00
96	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	265.000,00
97	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	140.000.000,00
98	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	28.925.000,00
99	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	167.400.000,00
100	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	112.260.000,00
101	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	4.500.000,00
102	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.793.100,00
103	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	8.526.980,00
104	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	18.352.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
105	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	7.590.000,00
106	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	9.000.000,00
107	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	28.800.000,00
108	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	2.100.000,00
109	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	51.572.000,00
110	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	90.740.000,00
111	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	29.025.849,00
112	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	15.600.000,00
113	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	5.500.000,00
114	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	4.023.816,00
115	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	275.600.000,00
116	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	86.976.000,00
117	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	112.300.000,00
118	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	53.000,00
119	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.625.000,00
120	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3.350.000,00
121	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	28.972.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
122	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	22.185.000,00
123	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	23.065.000,00
124	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	34.750.000,00
125	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	120.000.000,00
126	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	22.500.000,00
127	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.145.924,00
128	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	9.633.945,00
129	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	22.088.000,00
130	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	5.400.000,00
131	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	32.000.000,00
132	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	11.880.000,00
133	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	16.112.000,00
134	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	129.240.000,00
135	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	76.310.000,00
136	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	6.733.250,00
137	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	8.636.000,00
138	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	108.320.000,00
139	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	10.125.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
140	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	5.700.000,00
141	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	61.875.000,00
142	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	122.300.000,00
143	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	8.700.000,00
144	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	5.500.000,00
145	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	6.227.315,00
146	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	3.155.824,00
147	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33.660.000,00
148	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.400.000,00
149	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	21.600.000,00
150	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	12.600.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
151	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	113.376.000,00
152	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	468.780.000,00
153	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	2.508.000,00
154	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	49.393.200,00
155	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	36.000.000,00
156	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	140.000.000,00
157	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	327.979.000,00
158	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.267.200.000,00
159	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	76.920.000,00
160	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	39.000,00
161	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	99.960.000,00
162	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	2.400.000,00
163	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.428.542,00
164	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	19.720.988,00
165	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	202.850.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
166	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	17.160.000,00
167	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	7.200.000,00
168	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	99.240.000,00
169	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.433.464,00
170	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	181.050.000,00
171	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.176.500,00
172	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	241.569.000,00
173	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	41.047.275,00
174	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	191.534.996,00
175	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.476.617,00
176	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.750.000,00
177	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.002.338,00
178	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.296.225,00
179	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	110.547.800,00
180	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.258.400.000,00
181	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.355.940.000,00
182	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.940.953,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
183	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.455.000,00
184	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.537.925,00
185	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	375.820.000,00
186	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.920.000,00
187	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	151.500.000,00
188	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	121.200.000,00
189	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	961.560.000,00
190	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	628.788.000,00
191	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.999.976.000,00
192	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	4.200.000,00
193	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	222.800.000,00
194	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	304.000,00
195	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	2.376.000,00
196	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	200.320.000,00
197	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	35.700.000,00
198	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	931.410,00
199	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	17.866.504,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
200	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	48.100.000,00
201	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	3.366.000,00
202	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	5.400.000,00
203	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	2.100.000,00
204	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	7.476.000,00
205	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	79.060.000,00
206	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	122.692.000,00
207	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	115.500.000,00
208	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
209	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	647.900.000,00
210	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB	80.400.000,00
211	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.000.000,00
212	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.000.000,00
213	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	18.849.500,00
214	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	95.300.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
215	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	71.850.000,00
216	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.500.000,00
217	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	9.000.000,00
218	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00
219	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00
220	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00
221	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00
222	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00
223	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
224	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00
225	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	243.000.000,00
226	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	49.500.000,00
227	DISTRIK SARMI	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	171.940.000,00
228	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.800.000,00
229	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.400.000,00
230	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	267.273.000,00
231	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	49.475.000,00
232	DISTRIK BONGGO TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	145.440.000,00
233	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.100.000,00
234	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.400.000,00
235	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.500.000,00
236	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	39.071.236,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
237	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	35.728.000,00
238	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	5.200.000,00
239	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	11.000.000,00
240	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	4.000.000,00
241	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan	105.000.000,00
242	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
243	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.504.000,00
244	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.700.000,00
245	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.964.904.000,00
246	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dana Alokasi Umum (DAU)	51.763.600,00
247	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dana Alokasi Umum (DAU)	51.763.600,00
248	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dana Alokasi Umum (DAU)	135.300.000,00
249	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.131.283.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
250	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	299.928.000,00
251	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	235.000.000,00
252	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.200.000,00
253	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18.000.000,00
254	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	112.800.000,00
255	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	277.000.000,00
256	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	14.000.000,00
257	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	586.800.000,00
258	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
259	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	20.840.180,00
260	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	7.607.320,00
261	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	2.903.178,00
262	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	2.556.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
263	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	221.517.000,00
264	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	80.800.000,00
265	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.800.000,00
266	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	13.600.000,00
267	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	15.000.000,00
268	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	23.100.000,00
269	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	91.578.000,00
270	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	194.000.000,00
271	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	12.000.000,00
272	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	330.325.632,00
273	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	106.350.360,00
274	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	11.020.828,00
275	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Puskesmas	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	8.209.214.000,00
276	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.301.963.000,00
277	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.652.384,00
278	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.719.760,00
279	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	1.701.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	21.120.000,00
281	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	14.400.000,00
282	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	420.000.000,00
283	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	120.000.000,00
284	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	2.400.000,00
285	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.200.000,00
286	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	65.826.000,00
287	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	258.980.000,00
288	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.200.000,00
289	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	30.000.000,00
290	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	25.020.000,00
291	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	6.846.195,00
292	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3.018.603,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
293	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	4.500.000,00
294	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	26.127.142,00
295	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.814.486,00
296	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	32.875.540,00
297	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	88.800.000,00
298	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	15.000.000,00
299	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	85.950.000,00
300	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	14.400.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
301	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	18.000.000,00
302	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	18.900.000,00
303	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	44.226.000,00
304	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	60.000.000,00
305	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	22.862.505,00
306	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	19.900.000,00
307	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	32.728.620,00
308	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	218.470.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
309	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	52.218.188,00
310	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	16.783.712,00
311	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	36.000.000,00
312	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	277.046.000,00
313	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	51.600.000,00
314	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	24.800.000,00
315	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	50.000.000,00
316	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	42.000.000,00
317	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	396.960.000,00
318	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	363.800.000,00
319	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	22.500.000,00
320	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Alokasi Umum (DAU)	600.000.000,00
321	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	720.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
322	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.620.000,00
323	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.800.000,00
324	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	35.292.000,00
325	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	70.880.000,00
326	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	1.227.261,00
327	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.646.280,00
328	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	3.600.000,00
329	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	4.200.000,00
330	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan	454.500.000,00
331	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	1.300.500.000,00
332	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	349.500.000,00
333	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.555.104.000,00
334	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.274.242.000,00
335	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	0,00
336	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	0,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
337	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	0,00
338	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	6.300.000,00
339	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	0,00
340	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	0,00
341	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	1.293.700.000,00
342	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.450.000.000,00
343	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	168.471.000,00
344	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	26.845.600,00
345	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	43.400.000,00
346	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	1.030.299.600,00
347	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.000.000,00
348	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Alokasi Umum (DAU)	303.490.000,00
349	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	964.782.000,00
350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.987.000,00
351	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.000.000,00
352	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	990.231.000,00
353	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	1.350.000.000,00
354	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.050.760.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
355	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1.440.000.000,00
356	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.994.000.000,00
357	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	23.178.000,00
358	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	830.456.000,00
359	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00
360	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00
361	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1.801.000.000,00
362	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	110.535.000,00
363	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	430.020.000,00
364	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.613.380.000,00
365	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	101.478.000,00
366	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	26.700.000,00
367	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.350.000,00
368	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.130.000,00
369	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	171.511.000,00
370	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	13.550.000,00
371	DINAS TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	57.434.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
372	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.982.205,00
373	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.100.000,00
374	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.016.000,00
375	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.900.000,00
376	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	500.425.000,00
377	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.090.000,00
378	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	12.679.789,00
379	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	10.161.114,00
380	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	1.500.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
381	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	19.800.000,00
382	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	0,00
383	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	200.812.500,00
384	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	30.900.000,00
385	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	1.600.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
386	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	150.000.000,00
387	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat	81.000.000,00
388	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.515.000,00
389	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	32.175.000,00
390	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	6.300.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
391	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	45.000.000,00
392	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	255.000.000,00
393	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1.260.000.000,00
394	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih	120.138.300,00
395	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih	0,00
396	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih	101.500.000,00
397	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih	120.131.820,00
398	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
399	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
401	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
402	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
403	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
404	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
405	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
406	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
407	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
408	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
409	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
410	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	4.170.320.976,00
411	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.052.000,00
412	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	13.948.000,00
413	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	585.000.000,00
414	DISTRIK APAWER HULU	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	74.260.000,00
415	DISTRIK SARMI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	62.500.000,00
416	DISTRIK SARMI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.326.909,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
417	DISTRIK SARMI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.016.112,00
418	DISTRIK SARMI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.650.000,00
419	DISTRIK SARMI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
420	DISTRIK SARMI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.000.000,00
421	DISTRIK TOR ATAS	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	140.025.000,00
422	DISTRIK SARMI SELATAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	30.000.000,00
423	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.660.000,00
424	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	54.000.000,00
425	DISTRIK PANTAI BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	79.860.000,00
426	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Dana Alokasi Umum (DAU)	200.000.000,00
427	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	386.496.506,00
428	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	427.500.000,00
429	DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	185.600.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
430	DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	114.300.000,00
431	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.000.000,00
432	DISTRIK BONGGO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.000.000,00
433	DISTRIK PANTAI TIMUR	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	81.640.000,00
434	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	910.000.000,00
435	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	20.000.000,00
436	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	30.000.000,00
437	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	40.000.000,00
438	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
439	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
440	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
441	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
442	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
443	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
444	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
445	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
446	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00
447	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	96.000.000,00
448	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.280.665,00
449	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.969.000,00
450	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.600.000,00
451	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.150.000,00
452	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	46.200.000,00
453	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.800.000,00
454	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	140.000.000,00
455	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	889.401.430,00
456	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	1.910.598.400,00
457	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	43.470.000,00
458	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	267.088.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
459	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	152.260.000,00
460	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	279.000.000,00
461	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.350.000,00
462	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.350.000,00
463	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.300.000,00
464	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.600.000,00
465	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	28.000.000,00
466	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	35.758.160,00
467	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	116.000.000,00
468	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	7.860.000,00
469	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	56.320.000,00
470	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	54.000.000,00
471	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.000.000,00
472	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	2.500.000,00
473	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	28.656.000,00
474	DINAS PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	99.500.000,00
475	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.748.000,00
476	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	10.780.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
477	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.200.000,00
478	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	17.272.000,00
479	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	56.696.000,00
480	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	8.603.498,00
481	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	22.140.000,00
482	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	62.560.000,00
483	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	45.000.000,00
484	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan	105.000.000,00
485	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	407.634.000,00
486	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	106.632.000,00
487	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	18.000.000,00
488	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	292.180.000,00
489	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	100.206.000,00
490	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00
491	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.250.000,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
492	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.088.520,00
493	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.270.140,00
494	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.500.000,00
495	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	9.402.000,00
496	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	52.450.000,00
497	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	400.000,00
498	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	800.000,00
499	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.500.000,00
500	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.100.000,00
501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	687.946.000,00
502	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	107.625.556,00
503	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	74.228.940,00

NO	NAMA SKPD	NAMA BIDANG URUSAN	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA SUMBER DANA	PAGU
504	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	30.000.000,00
505	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	20.842.440,00
506	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	15.825.000,00
507	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	210.000,00
508	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	16.600.000,00
509	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	135.000.000,00
510	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.200.000,00
511	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	33.060.000,00
512	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.776.000,00
513	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	304.460.000,00
514	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	900.000.000,00
515	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	1.145.000,00
516	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	11.880.000,00
517	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	56.975.000,00
518	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur	30.000.000,00
TOTAL							**104.289.982.262**

Tabel 5.4

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)
DANA OTONOMI KHUSUS YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA [1%] KABUPATEN SARMI
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA VOL	VOLUME DARI SILPA %	VOLUME DARI SILPA VOL	VOLUME DARI SILPA %	TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya jalan dan jembatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah jalan utama										2	km	11.000.000.000,00	-	-	11.000.000.000,00					
Tetap	1.03.10.2.01.0033	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Kab,1.03.10.2.01.0033;Rekonstruksi Jalan	fisik	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2,04					2,04	KM	9.000.000.000,00			9.000.000.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.03.10.2.01.0034	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Kab,1.03.10.2.01.0034;Pemeliharaan Berkala Jalan	fisik	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,00					1	KM	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum (OAP dan Non-OAP)	["DAU"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya jalan dan jembatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah jembatan strategis										3	km	-	-	-	-					
Tetap	1.03.10.2.01.0040	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Kab,1.03.10.2.01.0040;Pembangunan Jembatan	fisik	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3,00					3	Jembatan	-			-	["Tor Atas | Kanderjan"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Layanan Kesehatan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselengaranya program Keluarga Berencana																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah keluarga terbina program KB										150	keluarga	399.999.236,00	-	-	799.998.472,00					
Tetap	2.14.03.2.03.0016	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,2.14.03.2.03.0016;Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	nonfisik	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50,00					50	Orang	199.999.236,00			199.999.236,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.14.04.2.01.0021	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kab,2.14.04.2.01.0021;Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	100,00					100	Laporan	200.000.000,00			200.000.000,00	["Pantai Timur | Betaf"]	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)										27	unit	256.500.000,00	-	-	513.000.000,00					
Tetap	1.04.05.4.01.0009	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	Kab,1.04.05.4.01.0009;Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	fisik	Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	27,00					27	Unit Rumah	256.500.000,00			256.500.000,00	["Tor Atas | Samanente"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya permukiman/perumahan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah pemukiman Perumahan/ Komplek /Rumah susun/Apartement										24	unit	10.743.500.000,00	700.000.000,00	-	22.187.000.000,00					
Semula	1.04.02.2.03.0011	Belanja Infrastruktur	Kab,1.04.02.2.03.0011;Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	fisik	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	27,00					27	Unit Rumah	10.743.500.000,00			10.743.500.000,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Kiren", "Bonggo Timur | Mawesday", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Waskey", "Tor Atas | Samanente"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Menjadi	1.04.02.2.03.0011	Belanja Infrastruktur	Kab,;1.04.02.2.03.0011;Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	fisik	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	28,00	2				30	Unit Rumah	10.743.500.000,00	700.000.000,00		11.443.500.000,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Kiren", "Bonggo Timur | Mawesday", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Waskey", "Tor Atas | Samanente"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Tanah Adat Ulayat Kebudayaan dan Sosial																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya penataan tanah adat																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Pendaftaran Hak Ulayat										20	hektar	5.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00					
Tetap	2.10.05.2.01.0001	Belanja Pertanahan	Kab,;2.10.05.2.01.0001;Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	nonfisik	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1,00					1	Dokumen	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya obat dan alat kesehatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah pengadaan alat kesehatan										68	pcs	1.300.000.000,00	-	-	2.600.000.000,00					
Tetap	1.02.02.2.01.0014	Belanja Kesehatan	Kab,;1.02.02.2.01.0014;Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	fisik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	69,00					69	Unit	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	Dinas Kesehatan	Umum (OAP dan Non-OAP)	["DAU"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya obat dan alat kesehatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah pengadaan obat										1841562	pcs	1.650.000.000,00	-	-	3.300.000.000,00					
Tetap	1.02.02.2.01.0023	Belanja Kesehatan	Kab,;1.02.02.2.01.0023;Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	fisik	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1,00					1	Paket	1.650.000.000,00			1.650.000.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	DINAS KESEHATAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Ruang Kelas/Guru Baru										10	unit	1.100.545.200,00	466.586.422,00	215.890.825,00	2.201.090.400,00					
Tetap	1.01.02.2.01.0047	Belanja Pendidikan	Kab,;1.01.02.2.01.0047;Pembangunan Ruang Kelas Baru	fisik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9,00					9	Ruang	1.100.545.200,00			1.100.545.200,00	["Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Kasukwe", "Tor Atas | Kanderjan"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Menjadi	1.01.02.2.01.0007	Belanja Pendidikan	Kab,;1.01.02.2.01.0007;Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	fisik		-	1				1	Unit		133.902.000,00		133.902.000,00	Kab. Sarmi | Pantai Timur | Sunum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		DAU	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sambungan SPAM																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah sambungan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM)										104	unit	341.770.120,00	-	-	683.540.240,00					
Tetap	1.03.03.2.01.0028	Belanja Infrastruktur Air Bersih	Kab,;1.03.03.2.01.0028;Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	nonfisik	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	25,00					25	Liter/ Detik	341.770.120,00			341.770.120,00	["Sarmi Timur | Waskey"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Unit Sekolah/Satuan Pendidikan Baru										2	unit	2.166.674.000,00	-	-	4.333.348.000,00					
Tetap	1.01.02.2.01.0001	Belanja Pendidikan	Kab,;1.01.02.2.01.0001;Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	fisik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1,00					1	Unit	1.064.795.000,00			1.064.795.000,00	["Pantai Timur | Betaf"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.01.02.3.05.0001	Belanja Pendidikan	Kab,;1.01.02.3.05.0001;Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	fisik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1,00					1	Unit	1.101.879.000,00			1.101.879.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - KONDISI PERLU										0		9.992.937.558,00	-	-	19.985.875.116,00					

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	8.01.05.2.01.0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab;8.01.05.2.01.0004;Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	nonfisik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100,00					100	Orang	393.060.000,00			393.060.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	5.01.02.2.03.0003	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab;5.01.02.2.03.0003;Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2,00					2	Laporan	951.418.662,00			951.418.662,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Tetom", "Bonggo Timur | Tamar Sari", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Sewan", "Tor Atas | Samanente"]	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.11.11.2.01.0015	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	Kab;2.11.11.2.01.0015;Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	nonfisik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10,00					10	Unit	899.800.496,00			899.800.496,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.02.2.03.0001	Belanja Sosial	Kab;2.08.02.2.03.0001;Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	nonfisik	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2,00					2	Lembaga	150.099.242,00			150.099.242,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.03.2.03.0001	Belanja Sosial	Kab;2.08.03.2.03.0001;Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00					1	Dokumen	100.099.828,00			100.099.828,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.03.2.02.0002	Belanja Sosial	Kab;2.08.03.2.02.0002;Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	nonfisik	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00					5	Layanan	50.099.500,00			50.099.500,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.02.2.01.0002	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab;2.08.02.2.01.0002;Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00					1	Dokumen	100.099.133,00			100.099.133,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.07.2.01.0003	Belanja Sosial	Kab;2.08.07.2.01.0003;Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	nonfisik	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1,00					1	Kegiatan	150.087.225,00			150.087.225,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.06.05.2.02.0003	Belanja Sosial	Kab;1.06.05.2.02.0003;Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	nonfisik	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200,00					200	Keluarga	653.378.651,00			653.378.651,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	1.06.04.2.01.0003	Belanja Sosial	Kab,1.06.04.2.01.0003;Penyediaan Alat Bantu	nonfisik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25,00					25	Orang	-			-	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.06.04.2.01.0001	Belanja Sosial	Kab,1.06.04.2.01.0001;Penyediaan Permakanan	nonfisik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250,00					250	Orang	221.919.539,00			221.919.539,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.06.04.2.01.0002	Belanja Sosial	Kab,1.06.04.2.01.0002;Penyediaan Sandang	nonfisik	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250,00					250	Orang	184.630.441,00			184.630.441,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.07.03.2.01.0004	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kab,2.07.03.2.01.0004;Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	nonfisik	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	60,00					60	Orang	899.998.392,00			899.998.392,00	["Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo"]	DINAS TENAGA KERJA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	6.01.02.2.01.0007	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,6.01.02.2.01.0007;Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2,00					2	Dokumen	499.998.256,00			499.998.256,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	INSPEKTORAT DAERAH	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	6.01.02.2.01.0002	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,6.01.02.2.01.0002;Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32,00					32	Laporan	799.925.000,00			799.925.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	INSPEKTORAT DAERAH	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.03.05.2.01.0029	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,1.03.05.2.01.0029;Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	fisik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	13,00					13	Unit	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	["Apawer Hulu | Wamariri", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.04.03.2.03.0002	Belanja Infrastruktur	Kab,1.04.03.2.03.0002;Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	fisik	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30,00					30	Unit Rumah	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	["Sarmi | Sarmo"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	5.04.02.2.01.0003	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,5.04.02.2.01.0003;Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	nonfisik	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	158,00					158	Orang	1.299.999.832,00			1.299.999.832,00	["Bonggo Timur | Gwinjaya", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo"]	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	8.01.03.2.01.0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,8.01.03.2.01.0004;Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	nonfisik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200,00					200	Orang	205.940.130,00			205.940.130,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	5.01.02.2.04.0001	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,5.01.02.2.04.0001;Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	nonfisik	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1,00					1	Dokumen	282.183.726,00			282.183.726,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	2.08.07.2.02.0007	Belanja Sosial	Kab.;2.08.07.2.02.0007;Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	nonfisik	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	3,00					3	Layanan	50.100.000,00			50.100.000,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Tetom", "Bonggo Timur | Gwinjaya", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Sewan", "Tor Atas | Samanente"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.06.2.01.0001	Belanja Sosial	Kab.;2.08.06.2.01.0001;Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	nonfisik	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5,00					5	Organisasi	100.099.505,00			100.099.505,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Layanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya kegiatan pembinaan perpustakaan dan budaya membaca																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA CERDAS										0		464.832.930,00	-	-	929.665.860,00					
Tetap	1.01.02.3.05.0017	Belanja Pendidikan	Kab.;1.01.02.3.05.0017;Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	fisik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1,00					1	Unit	464.832.930,00			464.832.930,00	["Pantai Barat | Webro"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA PRODUKTIF																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Percepatan Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya lahan pemerintahan ibu kota DOB																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA PRODUKTIF										0		1.171.996.968,00	-	-	2.343.993.936,00					
Tetap	2.19.02.2.01.0011	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	Kab.;2.19.02.2.01.0011;Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	nonfisik	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20,00					20	Orang	563.544.090,00			563.544.090,00	["Bonggo | Tetom", "Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.14.02.2.01.0009	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab.;2.14.02.2.01.0009;Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	nonfisik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2,00					2	Satuan Pendidikan	99.999.475,00			99.999.475,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe", "Sarmi Timur | Sewan"]	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.13.05.2.01.0003	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat	Kab.;2.13.05.2.01.0003;Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	nonfisik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	92,00					92	Lembaga	508.453.403,00			508.453.403,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Kiren", "Bonggo Timur | Mawesday", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Waskey", "Tor Atas | Samanente"]	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Mobile Health Services																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya layanan kesehatan bergerak (mobile)																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA SEHAT										0		4.479.754.000,00	1.234.550.301,00	-	10.194.058.301,00					

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	1.02.02.2.02.0033	Belanja Kesehatan	Kab,1.02.02.2.02.0033;Operasional Pelayanan Puskesmas	nonfisik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	11,00					11	Dokumen	1.350.000.000,00			1.350.000.000,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Krim Podena", "Bonggo | Tetom", "Bonggo Timur | Gwinjaya", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Bagaisewar II", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Kasukwe", "Tor Atas | Samanente"]	Dinas Kesehatan	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Menjadi	1.02.02.2.02.0024	Belanja Kesehatan	Kab,1.02.02.2.02.0024;Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1,00	1				2	Dokumen	1.529.764.000,00	1.234.550.301,00		2.764.314.301,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	DINAS KESEHATAN	OAP	["DAU"]	Tidak
Tetap	2.13.05.2.01.0009	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kab,2.13.05.2.01.0009;Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10,00					10	Dokumen	1.599.990.000,00			1.599.990.000,00	["Bonggo | Kiren", "Bonggo Timur | Mawesday", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Waskey", "Tor Atas | Samanente"]	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Tata Kelola Pembangunan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sistem pendataan Orang Asli Papua by name by addres																				
AKTIVITAS UTAMA	Pengintegrasian Data OAP dengan Layanan Publik										1		900.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00					
Tetap	2.12.02.2.03.0003	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,2.12.02.2.03.0003;Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1,00					1	Laporan	100.000.000,00			100.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.12.02.2.03.0002	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,2.12.02.2.03.0002;Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1,00					1	Dokumen	350.000.000,00			350.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.12.03.2.02.0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,2.12.03.2.02.0004;Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1,00					1	Laporan	350.000.000,00			350.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.12.02.2.03.0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,2.12.02.2.03.0004;Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	nonfisik	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	1,00					1	Dokumen	100.000.000,00			100.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA PRODUKTIF																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Manajemen Talenta Papua																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial																				
AKTIVITAS UTAMA	Terbinanya Komunitas Adat Terpencil (KAT)										5	kelompok masyarakat	690.187.072,00	-	-	1.380.374.144,00					
Tetap	1.06.02.2.01.0001	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kab,1.06.02.2.01.0001;Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	nonfisik	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250,00					250	Keluarga	690.187.072,00			690.187.072,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Layanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya kegiatan pembinaan perpustakaan dan budaya membaca																				
AKTIVITAS UTAMA	Terselenggaranya kegiatan pembinaan budaya membaca										1	kegiatan	474.993.916,00	-	-	949.987.832,00					
Tetap	2.23.02.2.02.0009	Belanja Pendidikan	Kab,2.23.02.2.02.0009;Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	nonfisik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	120,00					120	Orang	149.999.916,00			149.999.916,00	["Sarmi | Sarmo"]	Dinas Kearsipan	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	2.23.02.2.01.0018	Belanja Pendidikan	Kab.;2.23.02.2.01.0018;Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	nonfisik	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6.185,00					6185	Eksemplar	324.994.000,00			324.994.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Layanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya kegiatan pembinaan perpustakaan dan budaya membaca																				
AKTIVITAS UTAMA	Terselenggaranya kegiatan pembinaan perpustakaan										1	kegiatan	124.995.000,00	-	-	249.990.000,00					
Tetap	2.23.02.2.01.0004	Belanja Pendidikan	Kab.;2.23.02.2.01.0004;Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	nonfisik	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	65,00					65	Perpustakaan	124.995.000,00			124.995.000,00	["Pantai Barat | Arbais", "Pantai Barat | Niwerawar", "Sarmi | Bagaisewar II", "Sarmi | Sarmo"]	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Ruang Kelas/Guru Baru																				
Baru	1.01.02.2.01.0007	Belanja Pendidikan	1.01.02.2.01.0007;Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	fisik	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan		1				1	Unit	-	133.902.000,00	-	133.902.000,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA CERDAS																				
Baru	1.01.02.2.01.0014	Belanja Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Non Fisik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia						3	Paket		143.069.000,00	-	143.069.000,00	Armopa, Krim Podena, Muara Tor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Baru	1.01.02.2.02.0025	Belanja Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Non Fisik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia						2	Paket		215.890.825,00		215.890.825,00	Arbais, Gwin Jaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Baru	1.01.02.3.05.0036	Belanja Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Non Fisik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia						2	Paket		326.409.866,00		326.409.866,00	Sarmi, Keder	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Baru	1.01.02.3.05.0002	Belanja Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	fisik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1				1	Unit		332.684.422,00		332.684.422,00	Beneraf	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Peningkatan Layanan Kesehatan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Jumlah Penhembangan dan rehabilitasi Rumah Sakit																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA SEHAT																				
Baru	1.02.02.2.01.0003	Belanja Kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fisik	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang terbangun		1				1	Unit		521.600.000,00		521.600.000,00					
JUMLAH SEMULA													**52.258.686.000,00**	**-**	**-**						
JUMLAH MENJADI													**52.258.686.000,00**	**2.922.736.723,00**	**685.369.691,00**	**55.866.792.414,00**					

Tabel 5.5

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) DANA OTONOMI KHUSUS YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA [1%] KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA VOL	VOLUME DARI SILPA %	VOLUME DARI SILPA VOL	VOLUME DARI SILPA %	TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya jalan dan jembatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah jalan utama										2	km	11.000.000.000,00	-	-	11.000.000.000,00					
Tetap	1.03.10.2.01.0033	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Kab,1.03.10.2.01.0033;Rekonstruksi Jalan	fisik	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2,04					2,04	KM	9.000.000.000,00			9.000.000.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.03.10.2.01.0034	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Kab,1.03.10.2.01.0034;Pemeliharaan Berkala Jalan	fisik	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,00					1	KM	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum (OAP dan Non-OAP)	["DAU"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya jalan dan jembatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah jembatan strategis										3	km	-	-	-	-					
Tetap	1.03.10.2.01.0040	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Kab,1.03.10.2.01.0040;Pembangunan Jembatan	fisik	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3,00					3	Jembatan	-			-	["Tor Atas | Kanderjan"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Layanan Kesehatan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselengaranya program Keluarga Berencana																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah keluarga terbina program KB										150	keluarga	399.999.236,00	-	-	799.998.472,00					
Tetap	2.14.03.2.03.0016	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,2.14.03.2.03.0016;Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	nonfisik	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	50,00					50	Orang	199.999.236,00			199.999.236,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.14.04.2.01.0021	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kab,2.14.04.2.01.0021;Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKA)	100,00					100	Laporan	200.000.000,00			200.000.000,00	["Pantai Timur | Betaf"]	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)										27	unit	256.500.000,00	-	-	513.000.000,00					
Tetap	1.04.05.4.01.0009	Belanja Infrastruktur Energi Listrik	Kab,1.04.05.4.01.0009;Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	fisik	Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	27,00					27	Unit Rumah	256.500.000,00			256.500.000,00	["Tor Atas | Samanente"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya permukiman/perumahan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah pemukiman Perumahan/ Komplek /Rumah susun/Apartement										24	unit	10.743.500.000,00	700.000.000,00	-	22.187.000.000,00					
Semula	1.04.02.2.03.0011	Belanja Infrastruktur	Kab,1.04.02.2.03.0011;Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	fisik	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	27,00					27	Unit Rumah	10.743.500.000,00			10.743.500.000,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Kiren", "Bonggo Timur | Mawesday", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Waskey", "Tor Atas | Samanente"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Menjadi	1.04.02.2.03.0011	Belanja Infrastruktur	Kab;1.04.02.2.03.0011;Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	fisik	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	28,00	2				30	Unit Rumah	10.743.500.000,00	700.000.000,00		11.443.500.000,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Kiren", "Bonggo Timur | Mawesday", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Waskey", "Tor Atas | Samanente"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Tanah Adat Ulayat Kebudayaan dan Sosial																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya penataan tanah adat																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Pendaftaran Hak Ulayat										20	hektar	5.000.000.000,00	-	-	10.000.000.000,00					
Tetap	2.10.05.2.01.0001	Belanja Pertanahan	Kab;2.10.05.2.01.0001;Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	nonfisik	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1,00					1	Dokumen	5.000.000.000,00			5.000.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya obat dan alat kesehatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah pengadaan alat kesehatan										68	pcs	1.300.000.000,00	-	-	2.600.000.000,00					
Tetap	1.02.02.2.01.0014	Belanja Kesehatan	Kab;1.02.02.2.01.0014;Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	fisik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	69,00					69	Unit	1.300.000.000,00			1.300.000.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	Dinas Kesehatan	Umum (OAP dan Non-OAP)	["DAU"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya obat dan alat kesehatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah pengadaan obat										1841562	pcs	1.650.000.000,00	-	-	3.300.000.000,00					
Tetap	1.02.02.2.01.0023	Belanja Kesehatan	Kab;1.02.02.2.01.0023;Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	fisik	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1,00					1	Paket	1.650.000.000,00			1.650.000.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	DINAS KESEHATAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Ruang Kelas/Guru Baru										10	unit	1.100.545.200,00	466.586.422,00	215.890.825,00	2.201.090.400,00					
Tetap	1.01.02.2.01.0047	Belanja Pendidikan	Kab;1.01.02.2.01.0047;Pembangunan Ruang Kelas Baru	fisik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9,00					9	Ruang	1.100.545.200,00			1.100.545.200,00	["Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Kasukwe", "Tor Atas | Kanderjan"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Menjadi	1.01.02.2.01.0007	Belanja Pendidikan	Kab;1.01.02.2.01.0007;Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	fisik		-	1				1	Unit		133.902.000,00		133.902.000,00	Kab. Sarmi | Pantai Timur | Sunum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		DAU	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sambungan SPAM																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah sambungan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM)										104	unit	341.770.120,00	-	-	683.540.240,00					
Tetap	1.03.03.2.01.0028	Belanja Infrastruktur Air Bersih	Kab;1.03.03.2.01.0028;Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	nonfisik	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	25,00					25	Liter/ Detik	341.770.120,00			341.770.120,00	["Sarmi Timur | Waskey"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Unit Sekolah/Satuan Pendidikan Baru										2	unit	2.166.674.000,00	-	-	4.333.348.000,00					
Tetap	1.01.02.2.01.0001	Belanja Pendidikan	Kab;1.01.02.2.01.0001;Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	fisik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1,00					1	Unit	1.064.795.000,00			1.064.795.000,00	["Pantai Timur | Betaf"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.01.02.3.05.0001	Belanja Pendidikan	Kab;1.01.02.3.05.0001;Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	fisik	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1,00					1	Unit	1.101.879.000,00			1.101.879.000,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - KONDISI PERLU										0		9.992.937.558,00	-	-	19.985.875.116,00					

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	8.01.05.2.01.0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,8.01.05.2.01.0004;Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	nonfisik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100,00					100	Orang	393.060.000,00			393.060.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	5.01.02.2.03.0003	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,5.01.02.2.03.0003;Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2,00					2	Laporan	951.418.662,00			951.418.662,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Tetom", "Bonggo Timur | Tamar Sari", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Sewan", "Tor Atas | Samanente"]	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.11.11.2.01.0015	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	Kab,2.11.11.2.01.0015;Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	nonfisik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10,00					10	Unit	899.800.496,00			899.800.496,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.02.2.03.0001	Belanja Sosial	Kab,2.08.02.2.03.0001;Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	nonfisik	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2,00					2	Lembaga	150.099.242,00			150.099.242,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.03.2.03.0001	Belanja Sosial	Kab,2.08.03.2.03.0001;Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00					1	Dokumen	100.099.828,00			100.099.828,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.03.2.02.0002	Belanja Sosial	Kab,2.08.03.2.02.0002;Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	nonfisik	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,00					5	Layanan	50.099.500,00			50.099.500,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.02.2.01.0002	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,2.08.02.2.01.0002;Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00					1	Dokumen	100.099.133,00			100.099.133,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.07.2.01.0003	Belanja Sosial	Kab,2.08.07.2.01.0003;Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	nonfisik	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1,00					1	Kegiatan	150.087.225,00			150.087.225,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.06.05.2.02.0003	Belanja Sosial	Kab,1.06.05.2.02.0003;Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	nonfisik	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200,00					200	Keluarga	653.378.651,00			653.378.651,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	1.06.04.2.01.0003	Belanja Sosial	Kab,1.06.04.2.01.0003;Penyediaan Alat Bantu	nonfisik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25,00					25	Orang	-			-	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.06.04.2.01.0001	Belanja Sosial	Kab,1.06.04.2.01.0001;Penyediaan Permakanan	nonfisik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250,00					250	Orang	221.919.539,00			221.919.539,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.06.04.2.01.0002	Belanja Sosial	Kab,1.06.04.2.01.0002;Penyediaan Sandang	nonfisik	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250,00					250	Orang	184.630.441,00			184.630.441,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.07.03.2.01.0004	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kab,2.07.03.2.01.0004;Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	nonfisik	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	60,00					60	Orang	899.998.392,00			899.998.392,00	["Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo"]	DINAS TENAGA KERJA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	6.01.02.2.01.0007	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,6.01.02.2.01.0007;Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2,00					2	Dokumen	499.998.256,00			499.998.256,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	INSPEKTORAT DAERAH	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	6.01.02.2.01.0002	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,6.01.02.2.01.0002;Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32,00					32	Laporan	799.925.000,00			799.925.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	INSPEKTORAT DAERAH	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.03.05.2.01.0029	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,1.03.05.2.01.0029;Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	fisik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	13,00					13	Unit	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	["Apawer Hulu | Wamariri", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	1.04.03.2.03.0002	Belanja Infrastruktur	Kab,1.04.03.2.03.0002;Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	fisik	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30,00					30	Unit Rumah	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	["Sarmi | Sarmo"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	5.04.02.2.01.0003	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,5.04.02.2.01.0003;Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	nonfisik	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	158,00					158	Orang	1.299.999.832,00			1.299.999.832,00	["Bonggo Timur | Gwinjaya", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo"]	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	8.01.03.2.01.0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,8.01.03.2.01.0004;Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	nonfisik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200,00					200	Orang	205.940.130,00			205.940.130,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	5.01.02.2.04.0001	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,5.01.02.2.04.0001;Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	nonfisik	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1,00					1	Dokumen	282.183.726,00			282.183.726,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	2.08.07.2.02.0007	Belanja Sosial	Kab,:2.08.07.2.02.0007;Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	nonfisik	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	3,00					3	Layanan	50.100.000,00			50.100.000,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Tetom", "Bonggo Timur | Gwinjaya", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Sewan", "Tor Atas | Samanente"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.08.06.2.01.0001	Belanja Sosial	Kab,:2.08.06.2.01.0001;Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	nonfisik	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5,00					5	Organisasi	100.099.505,00			100.099.505,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Layanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya kegiatan pembinaan perpustakaan dan budaya membaca																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA CERDAS										0		464.832.930,00	-	-	929.665.860,00					
Tetap	1.01.02.3.05.0017	Belanja Pendidikan	Kab,:1.01.02.3.05.0017;Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	fisik	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1,00					1	Unit	464.832.930,00			464.832.930,00	["Pantai Barat | Webro"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA PRODUKTIF																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Percepatan Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya lahan pemerintahan ibu kota DOB																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA PRODUKTIF										0		1.171.996.968,00	-	-	2.343.993.936,00					
Tetap	2.19.02.2.01.0011	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	Kab,:2.19.02.2.01.0011;Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	nonfisik	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20,00					20	Orang	563.544.090,00			563.544.090,00	["Bonggo | Tetom", "Sarmi | Sarmo"]	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.14.02.2.01.0009	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab,:2.14.02.2.01.0009;Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	nonfisik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2,00					2	Satuan Pendidikan	99.999.475,00			99.999.475,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe", "Sarmi Timur | Sewan"]	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.13.05.2.01.0003	Belanja Pemberdayaan Masyarakat Adat	Kab,:2.13.05.2.01.0003;Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	nonfisik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	92,00					92	Lembaga	508.453.403,00			508.453.403,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Kiren", "Bonggo Timur | Mawesday", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Waskey", "Tor Atas | Samanente"]	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Mobile Health Services																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya layanan kesehatan bergerak (mobile)																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA SEHAT										0		4.479.754.000,00	1.234.550.301,00	-	10.194.058.301,00					

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	1.02.02.2.02.0033	Belanja Kesehatan	Kab;1.02.02.2.02.0033;Operasional Pelayanan Puskesmas	nonfisik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	11,00					11	Dokumen	1.350.000.000,00			1.350.000.000,00	["Apawer Hulu | Aurimi", "Bonggo | Krim Podena", "Bonggo | Tetom", "Bonggo Timur | Gwinjaya", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Bagaisewar II", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Kasukwe", "Tor Atas | Samanente"]	Dinas Kesehatan	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Menjadi	1.02.02.2.02.0024	Belanja Kesehatan	Kab;1.02.02.2.02.0024;Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1,00	1				2	Dokumen	1.529.764.000,00	1.234.550.301,00		2.764.314.301,00	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	DINAS KESEHATAN	OAP	["DAU"]	Tidak
Tetap	2.13.05.2.01.0009	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kab;2.13.05.2.01.0009;Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10,00					10	Dokumen	1.599.990.000,00			1.599.990.000,00	["Bonggo | Kiren", "Bonggo Timur | Mawesday", "Pantai Barat | Arbais", "Pantai Timur | Betaf", "Sarmi | Sarmo", "Sarmi Selatan | Wapo", "Sarmi Timur | Waskey", "Tor Atas | Samanente"]	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Tata Kelola Pembangunan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sistem pendataan Orang Asli Papua by name by addres																				
AKTIVITAS UTAMA	Pengintegrasian Data OAP dengan Layanan Publik										1		900.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00					
Tetap	2.12.02.2.03.0003	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab;2.12.02.2.03.0003;Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1,00					1	Laporan	100.000.000,00			100.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.12.02.2.03.0002	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab;2.12.02.2.03.0002;Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	nonfisik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1,00					1	Dokumen	350.000.000,00			350.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.12.03.2.02.0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab;2.12.03.2.02.0004;Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	nonfisik	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1,00					1	Laporan	350.000.000,00			350.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.12.02.2.03.0004	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab;2.12.02.2.03.0004;Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	nonfisik	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	1,00					1	Dokumen	100.000.000,00			100.000.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA PRODUKTIF																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Manajemen Talenta Papua																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial																				
AKTIVITAS UTAMA	Terbinanya Komunitas Adat Terpencil (KAT)										5	kelompok masyarakat	690.187.072,00	-	-	1.380.374.144,00					
Tetap	1.06.02.2.01.0001	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kab;1.06.02.2.01.0001;Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	nonfisik	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250,00					250	Keluarga	690.187.072,00			690.187.072,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS SOSIAL	OAP	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Layanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya kegiatan pembinaan perpustakaan dan budaya membaca																				
AKTIVITAS UTAMA	Terselenggaranya kegiatan pembinaan budaya membaca										1	kegiatan	474.993.916,00	-	-	949.987.832,00					
Tetap	2.23.02.2.02.0009	Belanja Pendidikan	Kab;2.23.02.2.02.0009;Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	nonfisik	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	120,00					120	Orang	149.999.916,00			149.999.916,00	["Sarmi | Sarmo"]	Dinas Kearsipan	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)							PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	SINERGI DANA LAIN	MULTI-YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA		VOLUME DARI SILPA		TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL					
							VOL	%	VOL	%											
Tetap	2.23.02.2.01.0018	Belanja Pendidikan	Kab.;2.23.02.2.01.0018;Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	nonfisik	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6.185,00					6185	Eksemplar	324.994.000,00			324.994.000,00	["Sarmi Selatan | Wapo"]	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Peningkatan Layanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Terselenggaranya kegiatan pembinaan perpustakaan dan budaya membaca																				
AKTIVITAS UTAMA	Terselenggaranya kegiatan pembinaan perpustakaan										1	kegiatan	124.995.000,00	-	-	249.990.000,00					
Tetap	2.23.02.2.01.0004	Belanja Pendidikan	Kab.;2.23.02.2.01.0004;Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	nonfisik	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	65,00					65	Perpustakaan	124.995.000,00			124.995.000,00	["Pantai Barat | Arbais", "Pantai Barat | Niwerawar", "Sarmi | Bagaisewar II", "Sarmi | Sarmo"]	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Ruang Kelas/Guru Baru																				
Baru	1.01.02.2.01.0007	Belanja Pendidikan	1.01.02.2.01.0007;Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	fisik	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan		1				1	Unit	-	133.902.000,00	-	133.902.000,00	["Sarmi | Sarmo"]	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA CERDAS																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA CERDAS																				
Baru	1.01.02.2.01.0014	Belanja Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Non Fisik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia						3	Paket		143.069.000,00	-	143.069.000,00	Armopa, Krim Podena, Muara Tor	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Baru	1.01.02.2.02.0025	Belanja Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Non Fisik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia						2	Paket		215.890.825,00		215.890.825,00	Arbais, Gwin Jaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Baru	1.01.02.3.05.0036	Belanja Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Non Fisik	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia						2	Paket		326.409.866,00		326.409.866,00	Sarmi, Keder	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
Baru	1.01.02.3.05.0002	Belanja Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	fisik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1				1	Unit		332.684.422,00		332.684.422,00	Beneraf	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Umum (OAP dan Non-OAP)	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	PAPUA SEHAT																				
PROGRAM PRIORITAS	Peningkatan Layanan Kesehatan																				
TARGET KELUARAN STRATEGIS	Jumlah Penhembangan dan rehabilitasi Rumah Sakit																				
AKTIVITAS UTAMA	NON-PROGRAM PRIORITAS - PAPUA SEHAT																				
Baru	1.02.02.2.01.0003	Belanja Kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Fisik	Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang terbangun		1				1	Unit		521.600.000,00		521.600.000,00					
JUMLAH SEMULA													**52.258.686.000,00**	**-**	**-**						
JUMLAH MENJADI													**52.258.686.000,00**	**2.922.736.723,00**	**685.369.691,00**	**55.866.792.414,00**					

Tabel 5.6

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR KAB. SARMI TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	SUBKEGIATAN	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN (OUTPUT)						PAGU ALOKASI				LOKASI	OPD	PENERIMA MANFAAT	PPSB	SINERGI DANA LAIN	MULT YEARS
						VOLUME DI TAHUN BERJALAN	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) VOL	%	VOLUME DARI SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) VOL	%	TOTAL VOL	SATUAN	TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL						
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN (OUTPUT) STRATEGIS	Tersedianya jalan dan jembatan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah jalan utama										17,73	km									
Menjadi	1.03.10.2.01.0033	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Kab.;1.03.10.2.01.0033; Rekonstruksi Jalan	fisik	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2771					2771	KM	11.213.035.000		200.000.000	11.413.035.000	["Sarmi | Lembah Naidam"]	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum (OAP dan Non-OAP)	Terkait Langsung ke Penerima Manfaat	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN (OUTPUT) STRATEGIS	Tersedianya infrastruktur ketenagalistrikan																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah pembangkit listrik tenaga diesel										9	Unt									
Baru	1.04.05.3.01.0006	Belanja Infrastruktur energi listrik	Kab. 1.04.05.3.01.0006 Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	fisik	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	9					9	Unit Rumah	0		90.862.700	90.862.700	["Pantai Barat | Arbais", "Sarmi | Bagaisewar II", "Sarmi Selatan | Kasukwe", "Sarmi Timur | Binger", "Sarmi Timur | Sewan", "Sarmi Timur | Tanjung Batu", "Tor Atas | Samanente"]	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	OAP	Terkait Langsung ke Penerima Manfaat	["Tidak Ada"]	Tidak
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN (OUTPUT) STRATEGIS	Tersedianya infrastuktur telekomunikasi																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Menara Telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station) 4G/5G										36,00	unit	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000						
	2.16.03.2.02.0004	Belanja Infrastruktur Telekomunikasi	2.16.03.2.02.0004;Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	fisik	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1					1	Dokumen	1.000.000.000			1.000.000.000	["Pantai Barat | Arbais", "Sarmi | Bagaisewar II", "Sarmi Selatan | Kasukwe", "Sarmi Timur | Binger", "Sarmi Timur | Sewan", "Sarmi Timur | Tanjung Batu", "Tor Atas | Samanente"]					
TEMA PEMBANGUNAN	KONDISI PERLU																				
PROGRAM PRIORITAS	Program Pendukung Infrastruktur Dasar dan Konektivitas																				
TARGET KELUARAN (OUTPUT) STRATEGIS	Tersedianya infrastruktur transportasi																				
AKTIVITAS UTAMA	Jumlah Prasarana Trasnsportasi Darat										1,00	unit	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000						
Tetap	2.15.02.2.02.0002	Belanja Infrastruktur Perhubungan	Kab.;2.15.02.2.02.0002; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	fisik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1					1	Unit	572.000.000			572.000.000	["Sarmi | Lembah Neidam"]	DINAS PERHUBUNGAN		Subkegiatan Pendukung	["Tidak Ada"]	Tidak
Tetap	2.15.02.2.02.0001	Belanja Administrasi Pemerintahan	Kab.;2.15.02.2.02.0001; Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	fisik	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1					1	Unit	428.000.000			428.000.000	["Sarmi Selatan | Kasukwe"]	DINAS PERHUBUNGAN		Subkegiatan Pendukung	["Tidak Ada"]	Tidak
JUMLAH SEMULA													**13.213.035.000**	**-**	**-**	**13.213.035.000**						
JUMLAH MENJADI													**13.213.035.000**	**-**	**290.862.700**	**13.503.897.700**						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. SARMI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**198.081.737.532,00**	**198.081.732.734,00**	**202.841.312.278,00**	**4.759.574.746,00**							**194.679.690.932,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**79.505.362.825,00**	**80.642.758.747,00**	**85.671.492.983,00**	**-570.000.000,00**							**78.935.362.825,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	118.000.000,00	117.998.089,00	0,00	-118.000.000,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-			59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	58.999.044,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	59.000.000,00	58.999.045,00	0,00	-59.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	74.700.000.000,00	76.312.389.498,00	82.384.526.782,00	7.684.526.782,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-			74.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				520 Orang/ bulan	520 Orang/ bulan	74.380.000.000,00	75.992.390.008,00	82.064.527.292,00	7.684.527.292,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-TKG PNSD DAK NON FISIK-TPG PNSD DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			74.580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	170.000.000,00	169.999.745,00	169.999.745,00	-255,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	149.999.745,00	149.999.745,00	-255,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	199.994.723,00	199.994.723,00	-5.277,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	199.994.723,00	199.994.723,00	-5.277,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.060.000.000,00	1.059.445.264,00	554.445.305,00	-505.554.695,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		1.060.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000,00	84.652.745,00	84.652.745,00	-347.255,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				20 Dokumen	20 Dokumen	470.000.000,00	469.792.560,00	469.792.560,00	-207.440,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				17 Orang	17 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	180 Orang	0,00	504.999.959,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidarn	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.312.000.000,00	1.911.583.993,00	1.491.178.993,00	-820.821.007,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		2.312.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	24.919.500,00	24.919.500,00	-80.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	39.949.285,00	39.949.285,00	39.949.285,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	0,00	449.962.500,00	449.962.500,00	449.962.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	0,00	19.999.708,00	19.999.708,00	19.999.708,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	840.000.000,00	839.753.000,00	419.348.000,00	-420.652.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			840.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	772.000.000,00	372.000.000,00	372.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			772.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Finyabor Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	920.000.000,00	846.471.625,00	846.471.625,00	-73.528.375,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		209.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	0,00	36.472.625,00	36.472.625,00	36.472.625,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	174.000.000,00	173.999.000,00	173.999.000,00	-1.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			174.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	636.000.000,00	636.000.000,00	636.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	195.362.825,00	194.875.555,00	194.875.555,00	-487.270,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		195.362.825,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	29.755.555,00	29.755.555,00	-244.445,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	165.120.000,00	165.120.000,00	165.120.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			165.362.825,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**NON URUSAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				2 Ha	2 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**197.386.737.532,00**	**197.386.832.804,00**	**202.146.412.348,00**	**4.759.674.816,00**							**193.869.690.932,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	-				-		**117.546.374.707,00**	**116.409.405.191,00**	**116.140.250.499,00**	**-3.487.046.600,00**							**114.059.328.107,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-		55.057.457.095,00	54.352.729.509,00	55.947.643.571,00	890.186.476,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		53.171.328.025,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	2 Unit	1.065.000.000,00	1.064.795.000,00	1.664.795.000,00	599.795.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.065.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	4.909.800.000,00	4.335.014.200,00	4.335.014.200,00	-574.785.800,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Wamariri Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			4.909.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 Unit	7 Unit	1.470.000.000,00	1.469.395.000,00	1.469.395.000,00	-605.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	3.340.000.000,00	2.642.770.000,00	2.842.512.000,00	-497.488.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Subu Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Tor Atas, Denender Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Keder Lama	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			3.340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	3 Paket	326.584.368,00	326.145.000,00	542.035.825,00	215.451.457,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Komra	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			326.584.368,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	785.026.000,00	724.545.182,00	621.141.997,00	-163.884.003,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			785.026.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				347 Orang	347 Orang	13.363.200.000,00	13.363.200.000,00	13.363.200.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			12.643.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				230 Orang	230 Orang	1.333.708.000,00	1.333.707.900,00	1.333.707.900,00	-100,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.333.708.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	1.754.000.000,00	1.854.317.480,00	1.854.317.480,00	100.317.480,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.654.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				69 Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan	8.859.058.000,00	9.079.058.000,00	9.079.058.000,00	220.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			8.616.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				140 Orang	140 Orang	200.000.000,00	199.999.800,00	199.999.800,00	-200,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.020.000.000,00	1.019.580.000,00	1.019.580.000,00	-420.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.020.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				-	176 Orang	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				30 Dokumen	30 Dokumen	715.000.000,00	716.312.000,00	716.312.000,00	1.312.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	100 Buku	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Waaf	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				6570 Paket	6570 Paket	5.600.000.000,00	5.599.988.728,00	5.599.988.728,00	-11.272,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			5.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				9 0	10 0	3.101.231.070,00	3.410.035.200,00	3.742.719.622,00	641.488.552,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Finyabor Dua	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			3.127.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	918.000.000,00	917.999.144,00	917.999.144,00	-856,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			918.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	6 Ruang	4.405.000.000,00	4.404.310.000,00	4.404.310.000,00	-690.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Ansudu Kab. Sarmi, Bonggo, Tarontha Srum Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			3.705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				920 Peserta Didik	920 Peserta Didik	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	591.849.657,00	591.556.875,00	591.556.875,00	-292.782,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			591.849.657,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	19.794.772.748,00	19.936.907.418,00	21.554.682.355,00	1.759.909.607,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		19.533.616.748,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	744.700.000,00	744.061.300,00	744.061.300,00	-638.700,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			744.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2 Unit	890.000.000,00	889.310.000,00	1.539.310.000,00	649.310.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Waaf Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			890.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	649.850.000,00	649.850.000,00	-150.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Finyabor Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2 Unit	250.000.000,00	300.700.000,00	361.450.000,00	111.450.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				120 Paket	120 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2100 Peserta Didik	2100 Peserta Didik	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.009.791.000,00	1.009.790.976,00	863.178.406,00	-146.612.594,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.009.791.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				258 Orang	258 Orang	5.302.000.000,00	5.300.958.125,00	5.300.958.125,00	-1.041.875,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			5.302.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				160 Orang	160 Orang	579.187.000,00	579.186.389,00	579.186.389,00	-611,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			579.187.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	719.000.000,00	779.000.000,00	779.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			719.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	4.939.076.000,00	5.134.826.000,00	5.780.520.362,00	841.444.362,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOS KINERJA DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			4.677.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	149.999.448,00	149.999.448,00	-552,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				200 Dokumen	200 Dokumen	630.000.000,00	468.173.541,00	468.173.541,00	-161.826.459,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			630.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	316.850.000,00	316.850.000,00	316.850.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			316.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Webro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				24485 Buku	24485 Buku	1.377.560.000,00	1.377.637.800,00	1.377.637.800,00	77.800,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.377.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2540 Paket	2540 Paket	672.815.000,00	672.804.475,00	952.804.475,00	279.989.475,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			672.815.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	0,00	127.943.145,00	127.943.145,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	763.793.748,00	763.759.364,00	763.759.364,00	-34.384,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			763.793.748,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	8.111.376.934,00	8.920.989.212,00	9.279.707.212,00	1.168.330.278,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		8.973.636.934,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	489.264.339,00	489.217.500,00	489.217.500,00	-46.839,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			489.264.339,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				560 Paket	560 Paket	780.000.000,00	690.420.034,00	690.420.034,00	-89.579.966,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1200 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				21 Orang	21 Orang	586.800.000,00	586.800.000,00	586.800.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			586.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				240 Orang	240 Orang	690.302.595,00	690.301.678,00	690.301.678,00	-917,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			690.302.595,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	0,00	1.301.963.000,00	1.301.963.000,00	1.301.963.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.042.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	420.000.000,00	419.580.000,00	419.580.000,00	-420.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	8 Ruang	4.065.010.000,00	3.842.707.000,00	4.101.425.000,00	36.415.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari Kab. Sarmi, Pantai Timur, Yamben Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Timron/Keder	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			4.065.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	20 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	6.052.100.000,00	5.735.469.228,00	5.735.469.228,00	-316.630.772,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		6.052.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	69.999.628,00	69.999.628,00	-372,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmo	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	556.100.000,00	549.470.000,00	549.470.000,00	-6.630.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Arare	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			556.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				320 Paket	320 Paket	80.000.000,00	79.999.600,00	79.999.600,00	-400,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Arare Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	5.346.000.000,00	5.036.000.000,00	5.036.000.000,00	-310.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			5.346.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-				-	-	12.205.282.930,00	12.203.674.758,00	12.228.445.953,00	23.163.023,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		11.115.659.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.202.000.000,00	2.201.758.000,00	2.201.758.000,00	-242.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Webro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.102.532.930,00	1.101.182.930,00	1.101.182.930,00	-1.350.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Webro	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.118.529.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0036	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	200 Paket	0,00	0,00	324.756.000,00	324.756.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1937 Peserta didik	1937 Peserta didik	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	199.999.710,00	199.999.710,00	-290,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				80 Peserta Didik	80 Peserta Didik	300.000.000,00	299.984.805,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				125 Orang	125 Orang	2.976.000.000,00	2.976.000.000,00	2.976.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			2.976.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				75 Orang	75 Orang	150.000.000,00	149.999.313,00	149.999.313,00	-687,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	578.000.000,00	578.000.000,00	578.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			578.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	4.446.750.000,00	4.446.750.000,00	4.446.750.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			4.442.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.05.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-				-	-	3.963.348.000,00	2.897.598.066,00	3.284.527.874,00	-678.820.126,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		2.850.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.3.06.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																		
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	536.929.874,00	536.929.874,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				150 Paket	150 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-SMK DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.640.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	400.000.000,00	400.000.066,00	250.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.06.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.273.348.000,00	857.598.000,00	857.598.000,00	-415.750.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			810.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.08	Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	*undefined*				-	undefined undefined	12.362.037.000,00	12.362.037.000,00	8.109.774.306,00	-4.252.262.694,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		12.362.037.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.08.0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				-	6 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	913.797.306,00	913.797.306,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Timron/Keder	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.3.08.0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				72 Satuan Pendidikan	72 Satuan Pendidikan	12.362.037.000,00	12.362.037.000,00	7.195.977.000,00	-5.166.060.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			12.362.037.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**-**				**-**	**-**	**335.000.000,00**	**334.668.866,00**	**334.668.866,00**	**540.000.000,00**							**875.000.000,00**	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	335.000.000,00	334.668.866,00	334.668.866,00	-331.134,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				140 Peserta Didik	140 Peserta Didik	335.000.000,00	334.668.866,00	334.668.866,00	-331.134,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**695.000.000,00**	**694.899.930,00**	**694.899.930,00**	**-100.070,00**							**810.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**695.000.000,00**	**694.899.930,00**	**694.899.930,00**	**-100.070,00**							**810.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Bagaiserwar Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**				**-**	**-**	**380.000.000,00**	**379.998.080,00**	**379.998.080,00**	**0,00**							**380.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	380.000.000,00	379.998.080,00	379.998.080,00	-1.920,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				540 Orang	540 Orang	200.000.000,00	199.999.020,00	199.999.020,00	-980,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				6 Sertifikat	6 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				65 Lembaga	65 Lembaga	180.000.000,00	179.999.060,00	179.999.060,00	-940,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			180.000.000,00	
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**115.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**230.000.000,00**	**229.901.850,00**	**229.901.850,00**	**0,00**							**230.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	229.901.850,00	229.901.850,00	-98.150,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				15 Objek	15 Objek	100.000.000,00	99.999.920,00	99.999.920,00	-80,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				16 Objek	16 Objek	130.000.000,00	129.901.930,00	129.901.930,00	-98.070,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**134.210.526.592,00**	**131.217.098.075,00**	**148.351.862.518,00**	**14.141.335.926,00**							**17.506.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**134.210.526.592,00**	**131.217.098.075,00**	**148.351.862.518,00**	**14.141.335.926,00**							**17.506.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**134.210.526.592,00**	**131.217.098.075,00**	**148.351.862.518,00**	**14.141.335.926,00**							**17.506.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**67.370.592.570,00**	**62.247.904.767,00**	**43.266.511.573,00**	**-57.180.592.570,00**							**10.190.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.027.500.000,00	1.027.498.916,00	596.146.646,00	-431.353.354,00			-	- -	-		222.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	72.000.000,00	-128.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.500,00	40.000.250,00	-59.999.750,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	833.000,00	-49.167.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	226.740.056,00	92.888.056,00	-157.111.944,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	355.500.000,00	378.759.360,00	340.425.340,00	-15.074.660,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	43.173.868.938,00	39.725.151.045,00	33.086.684.868,00	-10.087.184.070,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				986 Orang/ bulan	986 Orang/ bulan	42.873.868.938,00	39.425.151.375,00	32.906.685.198,00	-9.967.183.740,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	199.999.670,00	79.999.670,00	-120.000.330,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	487.000.000,00	487.000.000,00	487.000.000,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	187.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	6.578.023.632,00	6.104.220.267,00	1.949.807.870,00	-4.628.215.762,00			-	-	-		931.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	936.669.632,00	499.999.694,00	0,00	-936.669.632,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	94.109.931,00	76.129.201,00	-23.870.799,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	500.000.000,00	499.947.433,00	288.717.460,00	-211.282.540,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	49.999.609,00	49.999.609,00	-391,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	143.869.000,00	143.869.000,00	143.869.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.916.485.000,00	3.886.721.000,00	886.092.000,00	-3.030.393.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.331.200.000,00	14.331.136.000,00	6.678.924.775,00	-7.652.275.225,00			-	-	-		8.764.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	29.999.100,00	29.999.100,00	-900,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	199.976.700,00	199.976.700,00	-23.300,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.437.200.000,00	5.437.200.000,00	4.245.200.000,00	-1.192.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	468.000.000,00	467.947.414,00	467.947.414,00	-52.586,00			-	-	-		168.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	299.991.605,00	299.991.605,00	-8.395,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**64.439.934.022,00**	**66.569.194.169,00**	**103.285.351.806,00**	**-57.123.934.022,00**							**7.316.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	22.354.863.368,00	22.891.402.044,00	41.299.485.246,00	18.944.621.878,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		4.010.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				-	4 Unit	0,00	0,00	11.202.700.307,00	11.202.700.307,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				10 Unit	6 Unit	6.076.240.000,00	6.076.240.000,00	3.173.280.000,00	-2.902.960.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				6 Unit	18 Unit	4.784.654.000,00	5.232.350.820,00	8.656.910.820,00	3.872.256.820,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	4 Unit	1.448.969.368,00	1.437.916.114,00	1.659.294.309,00	210.324.941,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Arare Kab. Sarmi, Pantai Barat, Mertewar	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disedlakan				14 Unit	14 Unit	2.750.000.000,00	2.749.995.280,00	2.750.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				1 Unit	4 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	269.350.000,00	184.350.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	100 Paket	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	7.479.346.000,00	4.479.346.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				44 Paket	44 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	549.999.836,00	349.999.836,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	39.486.058.000,00	40.619.630.975,00	58.927.705.410,00	19.441.647.410,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		3.306.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	600 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	500.000.000,00	549.999.816,00	549.999.816,00	49.999.816,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14500 Orang	14500 Orang	350.000.000,00	349.999.530,00	349.999.530,00	-470,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	149.999.498,00	149.999.498,00	-502,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10000 Orang	10000 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1250 Orang	1250 Orang	300.000.000,00	299.996.000,00	299.996.000,00	-4.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Airoran Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 0	60 0	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40000 Orang	40000 Orang	206.000.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			206.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				325 Orang	520 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	261 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000,00	1.999.999.200,00	2.398.250.206,00	398.250.206,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	249.999.869,00	249.999.869,00	-131,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.999.250,00	199.999.250,00	-750,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	252.000.000,00	251.999.929,00	251.999.929,00	-71,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				2 Dokumen	5 Dokumen	1.800.000.000,00	2.121.964.000,00	3.356.514.301,00	1.556.514.301,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	5 Dokumen	8.071.160.000,00	8.699.860.000,00	9.282.959.305,00	1.211.799.305,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				11 Dokumen	11 Dokumen	10.949.329.000,00	10.949.329.000,00	23.423.042.687,00	12.473.713.687,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	8.802.569.000,00	8.802.569.000,00	4.641.753.012,00	-4.160.815.988,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				300 Orang	300 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				95 Orang	95 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2000 Orang	2000 Orang	800.000.000,00	800.000.000,00	1.050.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi, Bagaiserwar II Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.999.914,00	199.999.914,00	-86,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	257.993.219,00	257.993.219,00	132.993.219,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.599.012.654,00	3.058.161.150,00	3.058.161.150,00	459.148.496,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik				11 Unit/Fasyanikes	11 Unit/Fasyanikes	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya																		
			Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	1.349.012.654,00	1.808.161.150,00	1.808.161.150,00	459.148.496,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0064	Penanggulangan penyakit Kusta																		
			Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0065	Penanggulangan penyakit Filariasis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis				2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0067	Penanggulangan penyakit Frambusia																		
			Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.3.02.0068	Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi																		
			Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi				5 Dokumen	5 Dokumen	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-				-	-	**1.700.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**-1.700.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	600.000.000,00	-600.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				40 Orang	40 Orang	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	600.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-				-	-	**700.000.000,00**	**699.999.139,00**	**699.999.139,00**	**-700.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	700.000.000,00	699.999.139,00	699.999.139,00	-861,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	699.999.139,00	699.999.139,00	-861,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							**134.210.526.592,00**	**131.217.098.075,00**	**148.351.862.518,00**	**14.141.335.926,00**							**17.506.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**134.210.526.592,00**	**131.217.098.075,00**	**148.351.862.518,00**	**14.141.335.926,00**							**17.506.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**134.210.526.592,00**	**131.217.098.075,00**	**148.351.862.518,00**	**14.141.335.926,00**							**17.506.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**67.370.592.570,00**	**62.247.904.767,00**	**43.266.511.573,00**	**-57.180.592.570,00**							**10.190.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.027.500.000,00	1.027.498.916,00	596.146.646,00	-431.353.354,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		222.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	6.578.023.632,00	6.104.220.267,00	1.949.807.870,00	-4.628.215.762,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		931.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.977.100,00	9.977.100,00	-22.900,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	299.600.000,00	90.000.000,00	-210.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	199.990.000,00	199.990.000,00	-10.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	20.986.500,00	20.986.500,00	-13.500,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	149.586.000,00	59.415.000,00	-90.585.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	250.000.000,00	249.434.000,00	124.632.000,00	-125.368.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.305.000.000,00	104.951.125,00	0,00	-1.305.000.000,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	105.000.000,00	104.951.125,00	0,00	-105.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	-	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan				0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	14.331.200.000,00	14.331.136.000,00	6.678.924.775,00	-7.652.275.225,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-			8.764.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan				10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	268.500.000,00	268.500.000,00	51.650.000,00	-216.850.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan				268.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.385.500.000,00	8.385.470.200,00	2.142.108.975,00	-6.243.391.025,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan				8.485.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	468.000.000,00	467.947.414,00	467.947.414,00	-52.586,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-			168.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	70.000.000,00	69.981.000,00	69.981.000,00	-19.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan				70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	98.000.000,00	97.974.809,00	97.974.809,00	-25.191,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan				98.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**64.439.934.022,00**	**66.569.194.169,00**	**103.285.351.806,00**	**-57.123.934.022,00**							**7.316.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	22.354.863.368,00	22.891.402.044,00	41.299.485.246,00	18.944.621.878,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-			4.010.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	4 Unit	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	2.648.704.144,00	1.448.704.144,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan				1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				110 Unit	110 Unit	110.000.000,00	109.900.000,00	109.900.000,00	-100.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	2.700.000.000,00	2.799.999.830,00	2.799.999.830,00	99.999.830,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			2.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	39.486.058.000,00	40.619.630.975,00	58.927.705.410,00	19.441.647.410,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		3.306.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				170 Dokumen	170 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	0,00	325.721.999,00	325.721.999,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00	449.922.750,00	6.403.473.135,00	5.953.473.135,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	90 Orang	0,00	0,00	543.951.197,00	543.951.197,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	60 Orang	0,00	0,00	47.553.197,00	47.553.197,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	50 Orang	0,00	0,00	158.499.346,00	158.499.346,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**165.961.192.126,00**	**164.131.691.061,00**	**47.464.221.485,00**	**-118.496.970.641,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**165.961.192.126,00**	**164.131.691.061,00**	**47.464.221.485,00**	**-118.496.970.641,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**165.961.192.126,00**	**164.131.691.061,00**	**47.464.221.485,00**	**-118.496.970.641,00**							**0,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**21.053.214.733,00**	**19.279.147.328,00**	**11.490.130.389,00**	**-21.053.214.733,00**							**0,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	565.000.000,00	564.878.568,00	0,00	-565.000.000,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000,00	399.995.675,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	44.995.125,00	0,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	29.989.768,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	90.000.000,00	89.898.000,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.484.801.126,00	7.714.604.061,00	8.104.937.902,00	-1.379.863.224,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	9.364.801.126,00	7.595.270.061,00	8.104.937.902,00	-1.259.863.224,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	39.977.500,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	-	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	79.356.500,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	149.987.841,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	149.987.841,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.900.000.000,00	1.899.482.767,00	0,00	-1.900.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	299.998.767,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	1.600.000.000,00	1.599.484.000,00	0,00	-1.600.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.154.089.505,00	4.153.931.685,00	1.748.242.505,00	-2.405.847.000,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.985.983,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	99.995.195,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	275.000.000,00	274.986.752,00	0,00	-275.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	99.998.250,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	550.000.000,00	549.944.000,00	499.944.000,00	-50.056.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	499.932.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	2.609.089.505,00	2.609.089.505,00	1.248.298.505,00	-1.360.791.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.434.662.102,00	2.434.640.881,00	0,00	-2.434.662.102,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				124 Unit	124 Unit	424.662.102,00	424.640.881,00	0,00	-424.662.102,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.010.000.000,00	2.010.000.000,00	0,00	-2.010.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.214.662.000,00	2.213.611.525,00	1.535.709.982,00	-678.952.018,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	36.500.000,00	36.499.950,00	36.499.950,00	-50,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	160.362.000,00	160.291.700,00	160.291.700,00	-70.300,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.869.875,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				114 Laporan	122 Laporan	0,00	1.996.950.000,00	1.338.918.332,00	1.338.918.332,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**165.961.192.126,00**	**164.131.691.061,00**	**47.464.221.485,00**	**-118.496.970.641,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**165.961.192.126,00**	**164.131.691.061,00**	**47.464.221.485,00**	**-118.496.970.641,00**							**0,00**	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**165.961.192.126,00**	**164.131.691.061,00**	**47.464.221.485,00**	**-118.496.970.641,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**165.961.192.126,00**	**164.131.691.061,00**	**47.464.221.485,00**	**-118.496.970.641,00**							**0,00**	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	150.000.000,00	148.010.000,00	101.240.000,00	-48.760.000,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	42 Unit	120.000.000,00	118.120.000,00	74.840.000,00	-45.160.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	30.000.000,00	29.890.000,00	26.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	-	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**8.980.250.000,00**	**8.369.239.000,00**	**1.000.000.000,00**	**-8.980.250.000,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.980.250.000,00	8.369.239.000,00	1.000.000.000,00	-7.980.250.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku																		
			Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.5 KM	0.5 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				0 Lembaga	0 Lembaga	265.000.000,00	264.994.000,00	0,00	-265.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				7 KM	7 KM	4.293.250.000,00	4.096.000.000,00	0,00	-4.293.250.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Dua Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo, Maweswares Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Ansudu Dua	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	880.000.000,00	825.000.000,00	0,00	-880.000.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Wamariri	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.5 KM	0.5 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,5 KM	0,5 KM	900.000.000,00	899.995.000,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0.75 KM	0.75 KM	700.000.000,00	699.995.000,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				7 Dokumen	7 Dokumen	1.942.000.000,00	1.583.255.000,00	0,00	-1.942.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	-				-	-	**15.573.621.000,00**	**15.147.174.730,00**	**4.712.091.096,00**	**-15.573.621.000,00**							**0,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.573.621.000,00	15.147.174.730,00	4.712.091.096,00	-10.861.529.904,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				25 Liter/Detik	25 Liter/Detik	15.573.621.000,00	15.147.174.730,00	4.712.091.096,00	-10.861.529.904,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENGUSAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	-				-	-	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**0,00**	**-450.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	-450.000.000,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**1.870.000.000,00**	**1.869.997.354,00**	**1.000.000.000,00**	**-1.870.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.870.000.000,00	1.869.997.354,00	1.000.000.000,00	-870.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				0 Unit	5 Unit	1.870.000.000,00	1.869.997.354,00	1.000.000.000,00	-870.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTRUKTUR DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**1.658.350.000,00**	**1.563.200.000,00**	**0,00**	**-1.658.350.000,00**							**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.658.350.000,00	1.563.200.000,00	0,00	-1.658.350.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				700 M	700 M	1.658.350.000,00	1.563.200.000,00	0,00	-1.658.350.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				5 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1500 Sistem Drainase Perkotaan	1500 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**499.990.000,00**	**0,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	500.000.000,00	499.990.000,00	0,00	-500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				30 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	499.990.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**17.735.000.000,00**	**18.337.200.000,00**	**2.999.965.000,00**	**-17.735.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	17.735.000.000,00	18.337.200.000,00	2.999.965.000,00	-14.735.035.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				27 Kawasan	28 Kawasan	17.735.000.000,00	18.337.200.000,00	2.999.965.000,00	-14.735.035.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**94.940.756.393,00**	**95.415.756.393,00**	**25.812.035.000,00**	**-94.940.756.393,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	94.940.756.393,00	95.415.756.393,00	25.812.035.000,00	-69.128.721.393,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				17,728 KM	17,728 KM	78.228.406.000,00	75.719.886.000,00	20.792.035.000,00	-57.436.371.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Arare Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Tor Atas, Saffon Tane Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Amsira Kab. Sarmi, Sarmi, Bagaiserwar Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Angkasa Dua Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Ebram Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				11,157 KM	11,157 KM	8.920.000.000,00	10.314.000.000,00	3.550.000.000,00	-5.370.000.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Wamariri Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Kapitiau Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Amsira Kab. Sarmi, Tor Atas, Omte Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Biryer Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DBH SAWIT DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				202,135 KM	202,135 KM	1.150.000.000,00	665.640.000,00	0,00	-1.150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				11 Jembatan	11 Jembatan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.000.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Tor Atas, Kanderjan Kab. Sarmi, Tor Atas, Omte Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Wamariri Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Amsira Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Biryer	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				9 Jembatan	9 Jembatan	2.120.000.000,00	4.195.000.000,00	350.000.000,00	-1.770.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Anus Kab. Sarmi, Pantai Barat, Waim Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				288,011 KM	288,011 KM	1.120.000.000,00	1.118.880.000,00	120.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				155 KM	155 KM	2.102.350.393,00	2.102.350.393,00	0,00	-2.102.350.393,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Ebram Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Amsira Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Tor Atas, Safron Tane Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	-				-	-	**500.000.000,00**	**499.997.450,00**	**0,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	500.000.000,00	499.997.450,00	0,00	-500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	500.000.000,00	499.997.450,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**2.700.000.000,00**	**2.699.988.806,00**	**450.000.000,00**	**-2.700.000.000,00**							**0,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	450.000.000,00	-2.050.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	450.000.000,00	-2.050.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				8 Orang	8 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	199.988.806,00	0,00	-200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				4 Kasus	4 Kasus	200.000.000,00	199.988.806,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				0 Kasus	0 Kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**24.754.650.391,00**	**26.151.650.392,00**	**30.528.315.156,00**	**5.773.664.765,00**							**23.338.397.251,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.575.160.391,00**	**18.797.650.392,00**	**21.174.315.156,00**	**1.599.154.765,00**							**18.075.794.751,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**19.575.160.391,00**	**18.797.650.392,00**	**21.174.315.156,00**	**1.599.154.765,00**							**18.075.794.751,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**6.764.938.951,00**	**6.747.513.392,00**	**6.133.315.390,00**	**-855.925.000,00**							**5.909.013.951,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	38.040.000,00	26.940.000,00	16.960.000,00	-21.080.000,00			-	- -	-		38.040.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11.190.000,00	8.480.000,00	8.480.000,00	-2.710.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			11.190.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.950.000,00	9.980.000,00	0,00	-12.950.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.950.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.900.000,00	8.480.000,00	8.480.000,00	-5.420.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.514.910.391,00	4.906.610.042,00	4.631.338.715,00	116.428.324,00			-	- -	-		3.823.210.391,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.206.630.391,00	4.652.350.042,00	4.381.078.715,00	174.448.324,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.514.930.391,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	148.500.000,00	139.000.000,00	165.000.000,00	16.500.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			148.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	159.780.000,00	115.260.000,00	85.260.000,00	-74.520.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			159.780.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	18.900.000,00	0,00	0,00	-18.900.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.900.000,00	0,00	0,00	-18.900.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.830.000,00	47.410.000,00	47.410.000,00	-103.420.000,00			-	-	-		70.505.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	80.325.000,00	0,00	0,00	-80.325.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	70.505.000,00	47.410.000,00	47.410.000,00	-23.095.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.505.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	783.515.000,00	667.452.000,00	332.391.000,00	-451.124.000,00			-	-	-		728.515.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	235.000.000,00	192.330.000,00	42.330.000,00	-192.670.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	121.320.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-16.320.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	427.195.000,00	370.122.000,00	185.061.000,00	-242.134.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			427.195.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.148.743.560,00	981.371.350,00	987.485.675,00	-161.257.885,00			-	-	-		1.148.743.560,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.105.743.560,00	934.571.350,00	940.685.675,00	-165.057.885,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.105.743.560,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	110.000.000,00	117.730.000,00	117.730.000,00	7.730.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	117.730.000,00	117.730.000,00	17.730.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**11.493.623.280,00**	**11.345.744.000,00**	**12.045.744.000,00**	**-1.063.482.280,00**							**10.430.141.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	33.300.000,00	28.540.000,00	28.540.000,00	-4.760.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		33.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				27 Dokumen	27 Dokumen	33.300.000,00	28.540.000,00	28.540.000,00	-4.760.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			33.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	10.743.500.000,00	10.743.500.000,00	11.443.500.000,00	700.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		9.212.080.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				27 Unit Rumah	30 Unit Rumah	10.743.500.000,00	10.743.500.000,00	11.443.500.000,00	700.000.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTR UKTUR SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			9.212.080.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0003	Pembangunan Rumah Khusus																		
			Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				-	-	716.823.280,00	573.704.000,00	573.704.000,00	-143.119.280,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		1.184.761.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				27 Laporan	27 Laporan	716.823.280,00	573.704.000,00	573.704.000,00	-143.119.280,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			1.184.761.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**525.098.160,00**	**169.893.000,00**	**2.369.893.000,00**	**474.901.840,00**							**1.000.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	225.098.160,00	169.893.000,00	169.893.000,00	-55.205.160,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	225.098.160,00	169.893.000,00	169.893.000,00	-55.205.160,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	300.000.000,00	0,00	2.200.000.000,00	1.900.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				-	30 Unit Rumah	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTR UKTUR LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	-				-	-	**791.500.000,00**	**534.500.000,00**	**625.362.766,00**	**-54.860.200,00**							**736.639.800,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	235.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-207.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	14.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	221.000.000,00	0,00	0,00	-221.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.3.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	556.500.000,00	506.500.000,00	597.362.766,00	40.862.766,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		736.639.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.3.01.0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat																		
			Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik				27 Unit Rumah	30 Unit Rumah	556.500.000,00	506.500.000,00	597.362.766,00	40.862.766,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTR UKTUR ENERGI LISTRIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			736.639.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.179.490.000,00**	**7.354.000.000,00**	**9.354.000.000,00**	**4.174.510.000,00**							**5.262.602.500,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**5.179.490.000,00**	**7.354.000.000,00**	**9.354.000.000,00**	**4.174.510.000,00**							**5.262.602.500,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	-				-	-	**5.179.490.000,00**	**7.354.000.000,00**	**9.354.000.000,00**	**83.112.500,00**							**5.262.602.500,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.179.490.000,00	7.354.000.000,00	9.354.000.000,00	4.174.510.000,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		5.262.602.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				20 Dokumen	20 Dokumen	5.000.000.000,00	7.300.000.000,00	9.300.000.000,00	4.300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PERTANAHAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			5.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	179.490.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	-125.490.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			262.602.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**6.692.836.053,00**	**6.884.997.093,00**	**7.167.178.801,00**	**474.342.748,00**							**6.399.128.630,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.692.836.053,00**	**6.884.997.093,00**	**7.167.178.801,00**	**474.342.748,00**							**6.399.128.630,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**6.692.836.053,00**	**6.884.997.093,00**	**7.167.178.801,00**	**474.342.748,00**							**6.399.128.630,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**6.122.436.053,00**	**6.393.817.093,00**	**6.476.023.880,00**	**-23.507.423,00**							**6.098.928.630,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.600.000,00	16.800.000,00	8.800.000,00	-8.800.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		26.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.011.176.053,00	3.240.237.093,00	3.529.053.775,00	517.877.722,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		3.011.176.053,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.011.176.053,00	3.240.237.093,00	3.529.053.775,00	517.877.722,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			3.011.176.053,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	238.560.000,00	100.000.000,00	0,00	-238.560.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	110 Paket	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	28.560.000,00	0,00	0,00	-28.560.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	402.000.000,00	492.544.000,00	402.206.000,00	206.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		402.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	100.000.000,00	190.544.000,00	100.206.000,00	206.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.378.100.000,00	2.519.235.000,00	2.510.963.105,00	132.863.105,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		2.416.452.577,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.373.600.000,00	2.514.735.000,00	2.506.463.105,00	132.863.105,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.411.952.577,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.000.000,00	25.001.000,00	25.001.000,00	1.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		142.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.001.000,00	25.001.000,00	1.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			142.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**266.380.000,00**	**466.354.921,00**	**-49.800.000,00**							**300.200.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	166.380.000,00	166.380.000,00	-83.620.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.980.000,00	49.980.000,00	-20.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				3 laporan	3 laporan	100.000.000,00	116.400.000,00	116.400.000,00	16.400.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	299.974.921,00	199.974.921,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		150.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	299.974.921,00	199.974.921,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			150.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**220.400.000,00**	**224.800.000,00**	**224.800.000,00**	**-220.400.000,00**							**0,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	220.400.000,00	224.800.000,00	224.800.000,00	4.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	180.400.000,00	184.800.000,00	184.800.000,00	4.400.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				6 Orang	6 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**5.811.475.001,00**	**3.093.163.067,00**	**3.099.317.278,00**	**-2.712.157.723,00**							**3.029.288.948,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.811.475.001,00**	**3.093.163.067,00**	**3.099.317.278,00**	**-2.712.157.723,00**							**3.029.288.948,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.811.475.001,00**	**3.093.163.067,00**	**3.099.317.278,00**	**-2.712.157.723,00**							**3.029.288.948,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.649.288.948,00**	**3.093.163.067,00**	**3.099.317.278,00**	**-620.000.000,00**							**3.029.288.948,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.044.288.948,00	2.108.180.526,00	2.309.148.937,00	264.859.989,00			-	- -	-		2.044.288.948,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.029.288.948,00	2.093.180.801,00	2.294.149.212,00	264.860.264,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.029.288.948,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	14.999.725,00	14.999.725,00	-275,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	24.600.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	29 Paket	25.000.000,00	24.600.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.030.800.000,00	531.182.541,00	370.968.341,00	-659.831.659,00			-	- -	-		530.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.983.250,00	9.514.050,00	-485.950,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.998.291,00	4.998.291,00	-1.709,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	195.800.000,00	195.800.000,00	195.800.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			195.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	820.000.000,00	320.401.000,00	160.656.000,00	-659.344.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	409.200.000,00	409.200.000,00	409.200.000,00	0,00			-	- -	-		409.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	409.200.000,00	409.200.000,00	409.200.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			409.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	-				-	-	**2.162.186.053,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.162.186.053,00**							**0,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				30 Orang	30 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	1.362.186.053,00	0,00	0,00	-1.362.186.053,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				30 Orang	30 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	262.186.053,00	0,00	0,00	-262.186.053,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**6.728.366.543,00**	**6.896.467.522,00**	**6.552.730.957,00**	**-175.635.586,00**							**6.275.683.774,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.728.366.543,00**	**6.896.467.522,00**	**6.552.730.957,00**	**-175.635.586,00**							**6.275.683.774,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**6.728.366.543,00**	**6.896.467.522,00**	**6.552.730.957,00**	**-175.635.586,00**							**6.275.683.774,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**4.428.366.543,00**	**4.596.485.467,00**	**4.487.601.261,00**	**-250.000.000,00**							**4.178.366.543,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.327.746.543,00	3.533.658.294,00	3.670.962.858,00	343.216.315,00			-	- -	-		3.327.746.543,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.327.746.543,00	3.533.658.294,00	3.670.962.858,00	343.216.315,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.327.746.543,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.000.000,00	349.926.000,00	247.848.000,00	-102.152.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		280.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.926.000,00	97.848.000,00	-102.152.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	670.620.000,00	632.913.049,00	488.802.279,00	-181.817.721,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		390.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	27.568.948,00	7.000.000,00	0,00	-27.568.948,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			8.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.844.025,00	9.453.000,00	-40.547.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	583.051.052,00	566.069.024,00	469.349.279,00	-113.701.773,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			376.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	79.988.124,00	79.988.124,00	-11.876,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	79.988.124,00	79.988.124,00	-11.876,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			180.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**827.937.500,00**	**827.926.453,00**	**768.947.732,00**	**-100.000.000,00**							**727.937.500,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-				-	-	727.937.500,00	727.926.848,00	690.187.072,00	-37.750.428,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		727.937.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Keluarga	250 Keluarga	727.937.500,00	727.926.848,00	690.187.072,00	-37.750.428,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			727.937.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	99.999.605,00	78.760.660,00	-21.239.340,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	99.999.605,00	78.760.660,00	-21.239.340,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**652.682.769,00**	**652.677.239,00**	**506.547.906,00**	**-52.682.769,00**							**600.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	552.682.769,00	552.679.313,00	406.549.980,00	-146.132.789,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	250.000.000,00	249.997.664,00	221.919.539,00	-28.080.461,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	200.000.000,00	199.999.980,00	184.630.441,00	-15.369.559,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	102.682.769,00	102.681.669,00	0,00	-102.682.769,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	100.000.000,00	99.997.926,00	99.997.926,00	-2.074,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	99.997.926,00	99.997.926,00	-2.074,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**669.379.731,00**	**669.378.651,00**	**653.378.651,00**	**0,00**							**669.379.731,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	669.379.731,00	669.378.651,00	653.378.651,00	-16.001.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		669.379.731,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Keluarga	200 Keluarga	669.379.731,00	669.378.651,00	653.378.651,00	-16.001.080,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			669.379.731,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**149.999.712,00**	**136.255.407,00**	**-50.000.000,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	149.999.712,00	136.255.407,00	-13.744.593,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	149.999.712,00	136.255.407,00	-13.744.593,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA							**5.868.830.262,00**	**5.977.228.588,00**	**5.883.454.144,00**	**14.623.882,00**							**6.154.830.771,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.868.830.262,00**	**5.977.228.588,00**	**5.883.454.144,00**	**14.623.882,00**							**6.154.830.771,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.868.830.262,00**	**5.977.228.588,00**	**5.883.454.144,00**	**14.623.882,00**							**6.154.830.771,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**4.055.019.462,00**	**4.169.926.606,00**	**4.176.152.812,00**	**286.000.509,00**							**4.341.019.971,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.070.130,00	19.051.874,00	0,00	-19.070.130,00			-	- -	-		19.070.130,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.535.065,00	9.522.749,00	0,00	-9.535.065,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.535.065,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.535.065,00	9.529.125,00	0,00	-9.535.065,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.535.065,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.145.779.462,00	3.250.643.466,00	3.426.591.971,00	280.812.509,00			-	- -	-		3.426.591.971,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.145.779.462,00	3.250.643.466,00	3.418.481.971,00	272.702.509,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.418.481.971,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	17 Laporan	0,00	0,00	8.110.000,00	8.110.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			8.110.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	46.750.000,00	45.445.800,00	0,00	-46.750.000,00			-	- -	-		46.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	46.750.000,00	45.445.800,00	0,00	-46.750.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	313.254.870,00	326.226.966,00	208.102.341,00	-105.152.529,00			-	- -	-		313.254.870,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	13.631.500,00	13.631.500,00	13.631.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.072.976,00	4.066.000,00	4.066.000,00	-6.976,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.072.976,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	114.690.000,00	-65.310.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.117.466,00	5.117.466,00	5.480.841,00	363.375,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.117.466,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	111.264.428,00	110.612.000,00	57.434.000,00	-53.830.428,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.264.428,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	507.165.000,00	506.058.500,00	520.458.500,00	13.293.500,00			-	-	-		514.353.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.840.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.725.000,00	3.630.500,00	3.630.500,00	-1.094.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.725.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	477.600.000,00	477.588.000,00	491.988.000,00	14.388.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			484.788.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	23.000.000,00	22.500.000,00	21.000.000,00	-2.000.000,00			-	-	-		21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	23.000.000,00	22.500.000,00	21.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**1.144.950.000,00**	**1.139.023.042,00**	**1.039.022.392,00**	**0,00**							**1.144.950.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	1.144.950.000,00	1.139.023.042,00	1.039.022.392,00	-105.927.608,00			-	-	-		1.144.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	1 Lembaga	144.950.000,00	139.024.000,00	139.024.000,00	-5.926.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			144.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi																		
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				100 Orang	100 Orang	1.000.000.000,00	999.999.042,00	899.998.392,00	-100.001.608,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**668.860.800,00**	**668.278.940,00**	**668.278.940,00**	**0,00**							**668.860.800,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	23.000.000,00	22.520.000,00	22.520.000,00	-480.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				3 Perusahaan	3 Perusahaan	23.000.000,00	22.520.000,00	22.520.000,00	-480.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	645.860.800,00	645.758.940,00	645.758.940,00	-101.860,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		645.860.800,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara	3 Perkara	23.000.000,00	22.936.056,00	22.936.056,00	-63.944,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	23.000.000,00	22.962.084,00	22.962.084,00	-37.916,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			23.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				3246 Orang	3246 Orang	599.860.800,00	599.860.800,00	599.860.800,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			599.860.800,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**4.639.203.285,00**	**4.859.290.331,00**	**4.426.540.827,00**	**-212.662.458,00**							**892.498.238,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.639.203.285,00**	**4.859.290.331,00**	**4.426.540.827,00**	**-212.662.458,00**							**892.498.238,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**4.639.203.285,00**	**4.859.290.331,00**	**4.426.540.827,00**	**-212.662.458,00**							**892.498.238,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.839.203.285,00**	**4.059.293.363,00**	**3.726.544.359,00**	**-3.746.705.047,00**							**92.498.238,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	21.760.000,00	27.486.000,00	7.720.000,00	-14.040.000,00			-	- -	-		7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	6.760.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	6.892.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.074.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.760.000,00	6.760.000,00	3.860.000,00	-2.900.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.761.425.000,00	2.994.440.444,00	3.151.214.788,00	389.789.788,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.740.675.000,00	2.973.690.444,00	3.136.464.788,00	395.789.788,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	20.750.000,00	20.750.000,00	14.750.000,00	-6.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	146.165.637,00	99.999.891,00	0,00	-146.165.637,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	27 Paket	24.165.637,00	0,00	0,00	-24.165.637,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	99.999.891,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.947.900,00	350.640.392,00	108.492.168,00	-242.455.732,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.300.000,00	21.000.000,00	7.500.000,00	-13.800.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.570.900,00	8.570.392,00	3.226.168,00	-5.344.732,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	321.077.000,00	321.070.000,00	97.766.000,00	-223.311.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	69.637.383,00	69.604.308,00	69.604.308,00	-33.075,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	69.637.383,00	69.604.308,00	69.604.308,00	-33.075,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	404.269.127,00	435.933.936,00	376.473.095,00	-27.796.032,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	396.269.127,00	420.433.936,00	365.973.095,00	-30.296.032,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	84.998.238,00	81.188.392,00	13.040.000,00	-71.958.238,00			-	- -	-		84.998.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-250.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**4.639.203.285,00**	**4.859.290.331,00**	**4.426.540.827,00**	**-212.662.458,00**							**892.498.238,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.639.203.285,00**	**4.859.290.331,00**	**4.426.540.827,00**	**-212.662.458,00**							**892.498.238,00**	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.639.203.285,00**	**4.859.290.331,00**	**4.426.540.827,00**	**-212.662.458,00**							**892.498.238,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**4.639.203.285,00**	**4.859.290.331,00**	**4.426.540.827,00**	**-212.662.458,00**							**892.498.238,00**	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	6.700.000,00	3.290.000,00	-6.710.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	54.998.238,00	54.988.392,00	0,00	-54.998.238,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			54.998.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	-				-	-	**250.000.000,00**	**249.998.375,00**	**249.998.375,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	99.999.133,00	99.999.133,00	-867,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.133,00	99.999.133,00	-867,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	149.999.242,00	149.999.242,00	-758,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				2 Lembaga	2 Lembaga	150.000.000,00	149.999.242,00	149.999.242,00	-758,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	-				-	-	**200.000.000,00**	**199.999.828,00**	**149.999.328,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	49.999.500,00	-50.000.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Layanan	5 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	49.999.500,00	-50.000.500,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	99.999.828,00	99.999.828,00	-172,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.828,00	99.999.828,00	-172,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**99.999.505,00**	**99.999.505,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	99.999.505,00	99.999.505,00	-495,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				0 0	0 0	100.000.000,00	99.999.505,00	99.999.505,00	-495,00	-	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**249.999.260,00**	**199.999.260,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	149.999.260,00	149.999.260,00	-740,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	149.999.260,00	149.999.260,00	-740,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				3 Layanan	3 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**6.682.911.669,00**	**6.924.777.714,00**	**6.691.904.183,00**	**8.992.514,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.682.911.669,00**	**6.924.777.714,00**	**6.691.904.183,00**	**8.992.514,00**							**0,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**6.682.911.669,00**	**6.924.777.714,00**	**6.691.904.183,00**	**8.992.514,00**							**0,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.682.911.669,00**	**3.924.778.034,00**	**3.646.904.503,00**	**-3.682.911.669,00**							**0,00**	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.663.954.902,00	2.950.358.331,00	3.182.290.084,00	518.335.182,00			-	- -	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.663.954.902,00	2.950.358.331,00	3.182.290.084,00	518.335.182,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	272.000.000,00	271.954.172,00	146.264.172,00	-125.735.828,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	9.999.172,00	9.999.172,00	-828,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	249.955.000,00	124.265.000,00	-125.735.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	2.500.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	683.956.767,00	636.972.784,00	252.857.500,00	-431.099.267,00			-	- -	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	11.620.000,00	11.610.000,00	11.610.000,00	-10.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	672.336.767,00	625.362.784,00	241.247.500,00	-431.089.267,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.000.000,00	12.992.747,00	12.992.747,00	-7.253,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	13.000.000,00	12.992.747,00	12.992.747,00	-7.253,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan**				**4 unit**	**4 unit**	**1.000.000.000,00**	**999.999.680,00**	**939.999.680,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lumbung Pangan yang tersedia*				4 unit	4 unit	1.000.000.000,00	999.999.680,00	939.999.680,00	-60.000.320,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	999.999.680,00	939.999.680,00	-60.000.320,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Arare Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**jumlah pemberdayaan kelompok masya rakat dlm penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal**				**4 kelompok**	**4 kelompok**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.175.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*jumlah pemberdayaan kelompok masya rakat dlm penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal*				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				-	2 laporan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*jumlah pemberdayaan kelompok masya rakat dlm penganeka ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal*				1 laporan	1 laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	930.000.000,00	-70.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	930.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Dua Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**jumlah pengadaan,pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota**				**12 bulan**	**12 bulan**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**930.000.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah pengadaan,pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kabupaten/kota*				6 kelompok	6 kelompok	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	930.000.000,00	-70.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Pangan		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	930.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Maweswares Kab. Sarmi, Bonggo, Rimsersari Kab. Sarmi, Bonggo, Tarontha Srum Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**12.300.038.220,00**	**12.716.819.828,00**	**13.923.415.792,00**	**1.623.377.572,00**							**9.649.365.158,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.300.038.220,00**	**12.716.819.828,00**	**13.923.415.792,00**	**1.623.377.572,00**							**9.649.365.158,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**12.300.038.220,00**	**12.716.819.828,00**	**13.923.415.792,00**	**1.623.377.572,00**							**9.649.365.158,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**7.050.652.220,00**	**6.694.650.490,00**	**7.731.253.118,00**	**-301.287.062,00**							**6.749.365.158,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	147.411.105,00	147.411.105,00	107.411.105,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	147.411.105,00	147.411.105,00	127.411.105,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.865.353.686,00	2.903.424.085,00	3.543.481.213,00	678.127.527,00			-	- -	-		2.833.066.624,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.833.066.624,00	2.903.424.085,00	3.543.481.213,00	710.414.589,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.833.066.624,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	32.287.062,00	0,00	0,00	-32.287.062,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	105.419.959,00	42.075.000,00	0,00	-105.419.959,00			-	- -	-		75.419.959,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 0	2 0	75.419.959,00	42.075.000,00	0,00	-75.419.959,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.419.959,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	861.142.171,00	509.640.300,00	207.860.800,00	-653.281.371,00			-	- -	-		851.142.171,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	351.142.171,00	266.080.300,00	79.682.800,00	-271.459.371,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			351.142.171,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	243.560.000,00	128.178.000,00	-371.822.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**NON URUSAN**							**12.300.038.220,00**	**12.716.819.828,00**	**13.923.415.792,00**	**1.623.377.572,00**							**9.649.365.158,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**12.300.038.220,00**	**12.716.819.828,00**	**13.923.415.792,00**	**1.623.377.572,00**							**9.649.365.158,00**	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.300.038.220,00**	**12.716.819.828,00**	**13.923.415.792,00**	**1.623.377.572,00**							**9.649.365.158,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**12.300.038.220,00**	**12.716.819.828,00**	**13.923.415.792,00**	**1.623.377.572,00**							**9.649.365.158,00**	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.978.736.404,00	3.092.100.000,00	3.802.500.000,00	823.763.596,00			-	- -	-		2.969.736.404,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.943.736.404,00	3.057.600.000,00	3.768.000.000,00	824.263.596,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.929.736.404,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**1.400.000.000,00**	**1.399.998.537,00**	**1.399.998.537,00**	**0,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	1.400.000.000,00	1.399.998.537,00	1.399.998.537,00	-1.463,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -	-		1.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	699.999.202,00	699.999.202,00	-798,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	699.999.335,00	699.999.335,00	-665,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**2.004.489.687,00**	**1.963.405.591,00**	**2.034.817.182,00**	**-2.004.489.687,00**							**0,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	341.887.812,00	330.041.771,00	401.453.362,00	59.565.550,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	341.887.812,00	330.041.771,00	401.453.362,00	59.565.550,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen Kab. Sarmi, Pantai Timur, Yamben	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	1.662.601.875,00	1.633.363.820,00	1.633.363.820,00	-29.238.055,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.662.601.875,00	1.633.363.820,00	1.633.363.820,00	-29.238.055,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Masep	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**121.440.000,00**	**140.496.142,00**	**150.203.142,00**	**-121.440.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	121.440.000,00	140.496.142,00	150.203.142,00	28.763.142,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Ha	12 Ha	121.440.000,00	140.496.142,00	150.203.142,00	28.763.142,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	-				-	-	**250.000.000,00**	**61.837.185,00**	**61.837.185,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	61.837.185,00	61.837.185,00	-188.162.815,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	12.736.185,00	12.736.185,00	-187.263.815,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	50.000.000,00	49.101.000,00	49.101.000,00	-899.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	-				-	-	**423.456.313,00**	**401.432.285,00**	**320.309.626,00**	**-423.456.313,00**							**0,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	423.456.313,00	401.432.285,00	320.309.626,00	-103.146.687,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	216.658.513,00	200.263.802,00	200.263.802,00	-16.394.711,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				50 Lembaga	50 Lembaga	206.797.800,00	201.168.483,00	120.045.824,00	-86.751.976,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	-				-	-	**50.000.000,00**	**41.200.000,00**	**41.200.000,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	-8.800.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengaduan	5 Pengaduan	50.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-				-	-	**1.000.000.000,00**	**2.013.799.598,00**	**2.183.797.002,00**	**200.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	1.000.000.000,00	2.013.799.598,00	2.183.797.002,00	1.183.797.002,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				11 Unit	11 Unit	0,00	813.996.506,00	1.083.996.506,00	1.083.996.506,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				1 Unit	1 Unit	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				20 Unit	20 Unit	1.000.000.000,00	999.803.092,00	899.800.496,00	-100.199.504,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-INFRASTR UKTUR SANITASI LINGKUNGAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.788.112.092,00**	**5.067.854.681,00**	**5.287.748.526,00**	**499.636.434,00**							**4.788.112.092,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.788.112.092,00**	**5.067.854.681,00**	**5.287.748.526,00**	**499.636.434,00**							**4.788.112.092,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.788.112.092,00**	**5.067.854.681,00**	**5.287.748.526,00**	**499.636.434,00**							**4.788.112.092,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.788.112.092,00**	**4.067.854.681,00**	**4.387.748.526,00**	**0,00**							**3.788.112.092,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.830.882.092,00	3.110.652.681,00	3.608.843.704,00	777.961.612,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		2.830.882.092,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.830.882.092,00	3.110.652.681,00	3.608.843.704,00	777.961.612,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			2.830.882.092,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	233.630.000,00	233.602.000,00	133.720.000,00	-99.910.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		233.630.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.630.000,00	33.630.000,00	33.630.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			33.630.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.972.000,00	100.090.000,00	-99.910.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	673.600.000,00	673.600.000,00	595.184.822,00	-78.415.178,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		673.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	623.600.000,00	623.600.000,00	545.184.822,00	-78.415.178,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			623.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	**550.000.000,00**	**0,00**							**650.000.000,00**	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	650.000.000,00	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		650.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	350.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINIST RASI PEMERIN TAHAN	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINIST RASI PEMERIN TAHAN	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINIST RASI PEMERIN TAHAN	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**0,00**							**350.000.000,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG							**9.879.104.567,00**	**8.865.239.664,00**	**8.648.329.474,00**	**-1.230.775.093,00**							**3.800.560.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.879.104.567,00**	**8.865.239.664,00**	**8.648.329.474,00**	**-1.230.775.093,00**							**3.800.560.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**9.879.104.567,00**	**8.865.239.664,00**	**8.648.329.474,00**	**-1.230.775.093,00**							**3.800.560.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**6.879.104.567,00**	**5.865.344.550,00**	**5.784.167.151,00**	**-5.078.544.567,00**							**1.800.560.000,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	29.976.615,00	29.976.615,00	-23.385,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	29.976.615,00	29.976.615,00	-23.385,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.048.544.567,00	4.165.270.137,00	4.011.139.526,00	-1.037.405.041,00			-	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.048.544.567,00	4.165.270.137,00	4.011.139.526,00	-1.037.405.041,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.128.000.000,00	997.547.000,00	1.057.236.000,00	-70.764.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		1.128.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	1.128.000.000,00	997.547.000,00	1.057.236.000,00	-70.764.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			1.128.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	672.560.000,00	672.550.798,00	685.815.010,00	13.255.010,00			-	- -	-		672.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	672.560.000,00	672.550.798,00	685.815.010,00	13.255.010,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			672.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	-				-	-	**300.000.000,00**	**299.940.000,00**	**299.940.000,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	300.000.000,00	299.940.000,00	299.940.000,00	-60.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				25 Desa	25 Desa	300.000.000,00	299.940.000,00	299.940.000,00	-60.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	-				-	-	**500.000.000,00**	**499.992.729,00**	**455.778.920,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	500.000.000,00	499.992.729,00	455.778.920,00	-44.221.080,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				114 Orang	114 Orang	250.000.000,00	249.997.624,00	225.737.440,00	-24.262.560,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				114 Orang	114 Orang	250.000.000,00	249.995.105,00	230.041.480,00	-19.958.520,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**2.200.000.000,00**	**2.199.962.385,00**	**2.108.443.403,00**	**-200.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.200.000.000,00	2.199.962.385,00	2.108.443.403,00	-91.556.597,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				92 Lembaga	92 Lembaga	600.000.000,00	599.972.385,00	508.453.403,00	-91.546.597,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				105 Dokumen	105 Dokumen	1.600.000.000,00	1.599.990.000,00	1.599.990.000,00	-10.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.600.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.3.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
	2.13.05.3.01.0014	Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik																		
			Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik				-	80 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**8.251.913.749,00**	**8.456.659.836,00**	**8.325.331.356,00**	**73.417.607,00**							**1.745.420.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.251.913.749,00**	**8.456.659.836,00**	**8.325.331.356,00**	**73.417.607,00**							**1.745.420.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**8.251.913.749,00**	**8.456.659.836,00**	**8.325.331.356,00**	**73.417.607,00**							**1.745.420.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**2.912.763.749,00**	**3.297.512.567,00**	**3.366.184.562,00**	**-1.167.343.749,00**							**1.745.420.000,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	52.800.000,00	52.800.000,00	30.000.000,00	-22.800.000,00			-	- -	-		52.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	3.600.000,00	-9.600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			13.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.147.343.749,00	2.135.690.409,00	2.321.495.699,00	1.174.151.950,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.147.343.749,00	2.135.690.409,00	2.321.495.699,00	1.174.151.950,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	15.020.000,00	144.426.000,00	79.824.000,00	64.804.000,00			-	- -	-		15.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	-	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.020.000,00	15.020.000,00	15.620.000,00	600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			15.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	-	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	129.406.000,00	64.204.000,00	64.204.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.697.600.000,00	964.596.158,00	934.864.863,00	-762.735.137,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		1.677.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.673.600.000,00	940.596.158,00	910.864.863,00	-762.735.137,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			1.673.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	-				-	-	**500.400.000,00**	**500.399.950,00**	**300.399.475,00**	**-500.400.000,00**							**0,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	300.000.000,00	299.999.950,00	99.999.475,00	-200.000.525,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	299.999.950,00	99.999.475,00	-200.000.525,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINIST RASI PEMERIN TAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.400.000,00	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**3.803.750.000,00**	**3.803.747.319,00**	**3.933.747.319,00**	**-3.803.750.000,00**							**0,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	1.060.000.000,00	1.059.998.583,00	1.059.998.583,00	-1.417,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	59.999.513,00	59.999.513,00	-487,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Laporan	10 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				10 Laporan	10 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.070,00	99.999.070,00	-930,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2 Organisasi	2 Organisasi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	961.000.000,00	961.000.000,00	1.091.000.000,00	130.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	530.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				276 Orang	276 Orang	561.000.000,00	561.000.000,00	561.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.063.500.000,00	1.063.498.736,00	1.719.498.736,00	655.998.736,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				379 Orang	379 Orang	186.000.000,00	185.999.500,00	185.999.500,00	-500,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Unit	12 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	670.000.000,00	656.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				10 Laporan	10 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	199.999.236,00	199.999.236,00	-764,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	719.250.000,00	719.250.000,00	63.250.000,00	-656.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				21 Unit	21 Unit	656.000.000,00	656.000.000,00	0,00	-656.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				6 Kampung	6 Kampung	63.250.000,00	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**1.035.000.000,00**	**855.000.000,00**	**725.000.000,00**	**-1.035.000.000,00**							**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	330.000.000,00	330.000.000,00	200.000.000,00	-130.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	705.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	-180.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				282 laporan	282 laporan	282.000.000,00	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				94 laporan	94 laporan	423.000.000,00	243.000.000,00	243.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.3.03	Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.3.03.0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan																		
			Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan				14 unit	14 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**7.962.997.628,00**	**7.073.172.164,00**	**7.535.406.097,00**	**-427.591.531,00**							**6.520.448.908,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.962.997.628,00**	**7.073.172.164,00**	**7.535.406.097,00**	**-427.591.531,00**							**6.520.448.908,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**7.962.997.628,00**	**7.073.172.164,00**	**7.535.406.097,00**	**-427.591.531,00**							**6.520.448.908,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**6.762.997.628,00**	**5.873.343.290,00**	**6.095.577.223,00**	**-1.197.548.720,00**							**5.565.448.908,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.791.097.628,00	3.885.194.670,00	4.207.432.978,00	416.335.350,00			-	- -	-		3.769.997.628,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.716.097.628,00	3.810.204.464,00	4.132.442.772,00	416.345.144,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.716.097.628,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	74.990.206,00	74.990.206,00	-9.794,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			53.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	982.448.720,00	815.748.620,00	595.744.245,00	-386.704.475,00			-	- -	-		56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	382.448.720,00	215.748.620,00	295.844.245,00	-86.604.475,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	299.900.000,00	-300.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.739.451.280,00	1.172.400.000,00	1.292.400.000,00	-447.051.280,00			-	- -	-		1.739.451.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				51 Laporan	51 Laporan	1.739.451.280,00	1.172.400.000,00	1.292.400.000,00	-447.051.280,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.739.451.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	-				-	-	**1.200.000.000,00**	**1.199.828.874,00**	**1.439.828.874,00**	**-245.000.000,00**							**955.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	1.000.000.000,00	999.961.624,00	999.961.624,00	-38.376,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		955.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	428.000.000,00	427.965.000,00	427.965.000,00	-35.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			428.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	572.000.000,00	571.996.624,00	571.996.624,00	-3.376,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			527.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	199.867.250,00	199.867.250,00	-132.750,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	199.867.250,00	199.867.250,00	-132.750,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				-	2 Laporan	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**6.542.121.068,00**	**6.704.850.146,00**	**6.899.965.650,00**	**357.844.582,00**							**2.499.311.068,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.542.121.068,00**	**6.704.850.146,00**	**6.899.965.650,00**	**357.844.582,00**							**2.499.311.068,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6.392.121.068,00**	**6.554.932.455,00**	**6.750.047.959,00**	**357.926.891,00**							**2.499.311.068,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**5.392.121.068,00**	**5.555.031.089,00**	**5.750.054.984,00**	**-2.892.810.000,00**							**2.499.311.068,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.493.311.068,00	2.756.691.279,00	3.199.674.174,00	706.363.106,00			-	- -	-		2.493.311.068,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/ bulan	350 Orang/ bulan	2.493.311.068,00	2.756.691.279,00	3.199.674.174,00	706.363.106,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.493.311.068,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.497.215.000,00	1.396.698.000,00	1.208.739.000,00	-288.476.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.490.005.000,00	1.013.900.000,00	1.013.900.000,00	-476.105.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.210.000,00	7.210.000,00	7.210.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	375.588.000,00	187.629.000,00	187.629.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.401.595.000,00	1.401.641.810,00	1.341.641.810,00	-59.953.190,00			-	- -	-		6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**NON URUSAN**							**6.542.121.068,00**	**6.704.850.146,00**	**6.899.965.650,00**	**357.844.582,00**							**2.499.311.068,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.392.121.068,00**	**6.554.932.455,00**	**6.750.047.959,00**	**357.926.891,00**							**2.499.311.068,00**	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.542.121.068,00**	**6.704.850.146,00**	**6.899.965.650,00**	**357.844.582,00**							**2.499.311.068,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6.392.121.068,00**	**6.554.932.455,00**	**6.750.047.959,00**	**357.926.891,00**							**2.499.311.068,00**	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.335.595.000,00	1.335.641.810,00	1.275.641.810,00	-59.953.190,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**149.940.000,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	149.940.000,00	0,00	-150.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	1 Permohonan	150.000.000,00	149.940.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTI-PAPUA-TELEKOMUNIKASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	-				-	-	**850.000.000,00**	**849.961.366,00**	**999.992.975,00**	**-850.000.000,00**							**0,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	850.000.000,00	849.961.366,00	999.992.975,00	149.992.975,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	850.000.000,00	849.961.366,00	999.992.975,00	149.992.975,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Tanjung Batu Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Bagaiserwar Dua Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DTI-PAPUA-TELEKOMUNIKASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**82.000.000,00**	**81.996.898,00**	**81.996.898,00**	**-3.102,00**							**0,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.392.121.068,00**	**5.555.031.089,00**	**5.750.054.984,00**	**-2.892.810.000,00**							**2.499.311.068,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**82.000.000,00**	**81.996.898,00**	**81.996.898,00**	**-82.000.000,00**							**0,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	82.000.000,00	81.996.898,00	81.996.898,00	-3.102,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	82.000.000,00	81.996.898,00	81.996.898,00	-3.102,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**68.000.000,00**	**67.920.793,00**	**67.920.793,00**	**-79.207,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**68.000.000,00**	**67.920.793,00**	**67.920.793,00**	**-68.000.000,00**							**0,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	68.000.000,00	67.920.793,00	67.920.793,00	-79.207,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	68.000.000,00	67.920.793,00	67.920.793,00	-79.207,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM							**7.479.859.540,00**	**7.740.342.385,00**	**7.432.277.181,00**	**-47.582.359,00**							**6.479.859.540,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.116.483.540,00**	**5.376.968.445,00**	**5.148.833.241,00**	**32.349.701,00**							**4.116.483.540,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5.116.483.540,00**	**5.376.968.445,00**	**5.148.833.241,00**	**32.349.701,00**							**4.116.483.540,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.929.009.071,00**	**4.189.583.096,00**	**4.195.407.775,00**	**-710.000.000,00**							**3.219.009.071,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	44.898.000,00	14.966.000,00	-30.034.000,00			-	- -	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.966.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.966.000,00	14.966.000,00	-34.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.966.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.422.593.804,00	2.707.934.478,00	2.882.137.592,00	459.543.788,00			-	- -	-		2.422.593.804,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.422.593.804,00	2.707.934.478,00	2.882.137.592,00	459.543.788,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.422.593.804,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	160.000.000,00	159.624.057,00	59.844.057,00	-100.155.943,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	60.000.000,00	59.844.057,00	59.844.057,00	-155.943,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	100.000.000,00	99.780.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	450.000.000,00	449.824.609,00	479.828.159,00	29.828.159,00			-	- -	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.996.450,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	49.931.469,00	49.931.469,00	-68.531,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	29.968.690,00	29.968.690,00	-31.310,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	299.928.000,00	299.928.000,00	-72.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	851.415.267,00	827.301.952,00	758.631.967,00	-92.783.300,00			-	- -	-		516.415.267,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00	-5.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	29.955.000,00	29.955.000,00	-45.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.977.632,00	99.977.632,00	-22.368,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	701.415.267,00	677.374.320,00	608.704.335,00	-92.710.932,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			475.415.267,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang teregistrasi dan koperasi aktif**				**43 Unit Usaha**	**43 Unit Usaha**	**85.974.469,00**	**85.974.375,00**	**32.049.375,00**	**0,00**							**85.974.469,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan*				43 Unit Usaha	43 Unit Usaha	85.974.469,00	85.974.375,00	32.049.375,00	-53.925.094,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Unit Koperasi Masyarakat		85.974.469,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				43 Unit Usaha	43 Unit Usaha	53.045.000,00	53.045.000,00	0,00	-53.045.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			53.045.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				43 Unit Usaha	43 Unit Usaha	32.929.469,00	32.929.375,00	32.049.375,00	-880.094,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			32.929.469,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
3.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan**				**10 Unit**	**10 Unit**	**951.500.000,00**	**951.490.974,00**	**892.134.091,00**	**-190.000.000,00**							**761.500.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah unit usaha mikro yang diberdayakan*				10 Unit	10 Unit	951.500.000,00	951.490.974,00	892.134.091,00	-59.365.909,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Kelompok usaha (UMKM)		761.500.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	51.500.000,00	51.495.000,00	121.495.000,00	69.995.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			51.500.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	850.000.000,00	849.995.974,00	770.639.091,00	-79.360.909,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			660.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
4.	**2.17.09**	**PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**149.920.000,00**	**29.242.000,00**	**-100.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.17.09.3.01	Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.	-				-	-	150.000.000,00	149.920.000,00	29.242.000,00	-120.758.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	2.17.09.3.01.0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi				35 Kelompok	35 Kelompok	150.000.000,00	149.920.000,00	29.242.000,00	-120.758.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.363.376.000,00**	**2.363.373.940,00**	**2.283.443.940,00**	**-79.932.060,00**							**2.363.376.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2.263.376.000,00**	**2.263.374.000,00**	**2.213.544.000,00**	**-49.832.000,00**							**2.263.376.000,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Margin perdagangan barang kebutuhan pokok dan Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya**				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**150.170.000,00**	**0,00**							**200.000.000,00**	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah laporan pengendalian stok yang tersedia*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	150.170.000,00	-49.830.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Kelompok usaha UKM		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	150.170.000,00	-49.830.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
2.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**2.000.000.000,00**	**1.999.998.000,00**	**1.999.998.000,00**	**0,00**							**2.000.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	2.000.000.000,00	1.999.998.000,00	1.999.998.000,00	-2.000,00			-	- -	-		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	1.999.998.000,00	1.999.998.000,00	-2.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	- -			2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dan Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti**				**50 Unit**	**50 Unit**	**63.376.000,00**	**63.376.000,00**	**63.376.000,00**	**0,00**							**63.376.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah alat ukur pelaksanaan metrologi legal yang tersedia*				50 Unit	50 Unit	63.376.000,00	63.376.000,00	63.376.000,00	0,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Kelompok usaha UKM		63.376.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				50 Unit	50 Unit	63.376.000,00	63.376.000,00	63.376.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			63.376.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**100.000.000,00**	**99.999.940,00**	**69.899.940,00**	**-30.100.060,00**							**100.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**"Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome); Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana IKM; Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota serta Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Me**				**1 Unit**	**1 Unit**	**100.000.000,00**	**99.999.940,00**	**69.899.940,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.999.940,00	69.899.940,00	-30.100.060,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Para pelaku industri kecil		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.940,00	69.899.940,00	-30.100.060,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTERIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**4.157.744.871,00**	**4.192.729.716,00**	**4.631.006.684,00**	**473.261.813,00**							**104.931.015,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.157.744.871,00**	**4.192.729.716,00**	**4.631.006.684,00**	**473.261.813,00**							**104.931.015,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.157.744.871,00**	**4.192.729.716,00**	**4.631.006.684,00**	**473.261.813,00**							**104.931.015,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				**-**	**-**	**3.848.744.871,00**	**3.883.055.216,00**	**4.321.332.184,00**	**-3.743.813.856,00**							**104.931.015,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	29.089.500,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.942.250,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.147.250,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.216.494.871,00	3.252.153.716,00	3.436.019.082,00	219.524.211,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.196.494.871,00	3.234.279.591,00	3.418.144.957,00	221.650.086,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	17.874.125,00	17.874.125,00	-2.125.875,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	9.690.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	9.690.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-100.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-100.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	94.500.000,00	94.500.000,00	189.000.000,00	94.500.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	94.500.000,00	94.500.000,00	189.000.000,00	94.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	487.750.000,00	487.722.000,00	581.482.087,00	93.732.087,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.379.401,00	3.375.000,00	3.375.000,00	-4.401,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	469.370.599,00	469.347.000,00	563.107.087,00	93.736.488,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	104.931.015,00	104.931.015,00			-	- -	-		104.931.015,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	104.931.015,00	104.931.015,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	- -			104.931.015,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi, Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Perumusan Kebijakan mengenai Peraturan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**103.000.000,00**	**102.954.000,00**	**102.954.000,00**	**-103.000.000,00**							**0,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00	102.954.000,00	102.954.000,00	-46.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00	102.954.000,00	102.954.000,00	-46.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN**				**17 Kegiatan Usaha**	**17 Kegiatan Usaha**	**103.000.000,00**	**102.741.625,00**	**102.741.625,00**	**-103.000.000,00**							**0,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan*				17 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	103.000.000,00	102.741.625,00	102.741.625,00	-258.375,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			17 Kegiatan Usaha	17 Kegiatan Usaha	103.000.000,00	102.741.625,00	102.741.625,00	-258.375,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**103.000.000,00**	**103.978.875,00**	**103.978.875,00**	**-103.000.000,00**							**0,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yangDiolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00	103.978.875,00	103.978.875,00	978.875,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha yangTerintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00	103.978.875,00	103.978.875,00	978.875,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**4.757.018.305,00**	**5.112.329.651,00**	**5.062.140.821,00**	**305.122.516,00**							**1.550.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.757.018.305,00**	**5.112.329.651,00**	**5.062.140.821,00**	**305.122.516,00**							**1.550.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**4.757.018.305,00**	**5.112.329.651,00**	**5.062.140.821,00**	**305.122.516,00**							**1.550.000.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**2.867.038.305,00**	**3.023.613.531,00**	**3.133.428.927,00**	**-2.867.038.305,00**							**0,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-35.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.249.038.305,00	2.619.994.782,00	2.762.063.678,00	513.025.373,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.214.038.305,00	2.619.994.782,00	2.762.063.678,00	548.025.373,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	32.257.500,00	0,00	-70.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	70.000.000,00	32.257.500,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	225.000.000,00	124.961.249,00	124.965.249,00	-100.034.751,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.961.249,00	25.465.249,00	465.249,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	- -			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	49.500.000,00	-150.500.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	278.000.000,00	236.400.000,00	236.400.000,00	-41.600.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	236.400.000,00	236.400.000,00	-3.600.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	-				-	-	**750.000.000,00**	**663.548.316,00**	**563.544.090,00**	**-350.000.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	750.000.000,00	663.548.316,00	563.544.090,00	-186.455.910,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				20 Orang	20 Orang	700.000.000,00	663.548.316,00	563.544.090,00	-136.455.910,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				50 Kegiatan	50 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**1.139.980.000,00**	**1.425.167.804,00**	**1.365.167.804,00**	**10.020.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	85.187.837,00	85.187.837,00	-364.812.163,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				0 Unit	0 Unit	450.000.000,00	85.187.837,00	85.187.837,00	-364.812.163,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	0,00	1.150.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00			-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan	-		1.150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesolahragaan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	1.150.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			1.150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	389.980.000,00	189.979.967,00	689.979.967,00	299.999.967,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	189.980.000,00	189.979.967,00	189.979.967,00	-33,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				-	1 Unit	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	-				-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.669.643.509,00**	**2.804.982.449,00**	**2.882.357.369,00**	**-2.669.643.509,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.961.623.509,00	2.171.386.504,00	2.362.910.323,00	401.286.814,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	0,00	2.171.386.504,00	2.362.910.323,00	2.362.910.323,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	19.417.500,00	19.417.500,00	-582.500,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.417.500,00	19.417.500,00	-582.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	181.420.000,00	156.650.000,00	73.485.000,00	-107.935.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	86.650.000,00	43.470.000,00	43.470.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**NON URUSAN**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	371.600.000,00	323.516.744,00	292.532.845,00	-79.067.155,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	24.996.000,00	24.996.000,00	24.996.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	69.982.139,00	69.982.139,00	-17.861,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	29.989.150,00	29.989.150,00	29.989.150,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.169.643.509,00**	**5.288.201.864,00**	**5.265.425.784,00**	**95.782.275,00**							**0,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.348.043.509,00**	**4.532.432.141,00**	**4.580.624.960,00**	**232.581.451,00**							**0,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.200.000.000,00**	**2.199.992.987,00**	**2.099.841.987,00**	**-2.200.000.000,00**							**0,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.650.000.000,00	1.649.995.378,00	1.549.844.378,00	-100.155.622,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				65 Perpustakaan	65 Perpustakaan	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	150.000.000,00	149.998.633,00	149.998.633,00	-1.367,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	200.000.000,00	199.999.169,00	199.999.169,00	-831,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				40 Dokumen	40 Dokumen	148.000.000,00	148.000.558,00	148.000.558,00	558,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Kiren Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	862.500.000,00	862.497.018,00	762.346.018,00	-100.153.982,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	550.000.000,00	549.997.609,00	549.997.609,00	-2.391,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	200.000.000,00	199.998.357,00	199.998.357,00	-1.643,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Mertewar Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Gwinjaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	149.999.916,00	149.999.916,00	-84,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				25 Lokus	25 Lokus	200.000.000,00	199.999.336,00	199.999.336,00	-664,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Mertewar Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Gwinjaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**821.600.000,00**	**755.769.723,00**	**684.800.824,00**	**-136.799.176,00**							**0,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.669.643.509,00**	**2.804.982.449,00**	**2.882.357.369,00**	**-2.669.643.509,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	181.420.000,00	156.650.000,00	73.485.000,00	-107.935.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	30.015.000,00	-39.985.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.029.562,00	39.029.562,00	-970.438,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 0	1 0	40.000.000,00	39.029.562,00	39.029.562,00	-970.438,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	371.600.000,00	323.516.744,00	292.532.845,00	-79.067.155,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	346.600.000,00	298.520.744,00	267.536.845,00	-79.063.155,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	69.982.139,00	69.982.139,00	-17.861,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	39.992.989,00	39.992.989,00	-7.011,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**300.000.000,00**	**283.226.428,00**	**283.226.428,00**	**-300.000.000,00**							**0,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	92.900.000,00	92.900.000,00	-7.100.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	92.900.000,00	92.900.000,00	-7.100.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	190.326.428,00	190.326.428,00	-9.673.572,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	190.326.428,00	190.326.428,00	-9.673.572,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**12.927.734.502,00**	**13.291.134.970,00**	**13.306.422.404,00**	**378.687.902,00**							**3.545.641.502,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.927.734.502,00**	**13.291.134.970,00**	**13.306.422.404,00**	**378.687.902,00**							**3.545.641.502,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**12.927.734.502,00**	**13.291.134.970,00**	**13.306.422.404,00**	**378.687.902,00**							**3.545.641.502,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**8.527.734.502,00**	**8.891.262.548,00**	**8.816.300.780,00**	**-4.982.093.000,00**							**3.545.641.502,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	-1.100.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	-1.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.565.641.502,00	3.943.444.125,00	4.408.831.294,00	843.189.792,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		3.545.641.502,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.545.641.502,00	3.923.444.875,00	4.388.832.044,00	843.190.542,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			3.545.641.502,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.999.250,00	19.999.250,00	-750,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	18.807.000,00	18.807.000,00	-11.193.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	18.807.000,00	18.807.000,00	-11.193.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	691.093.000,00	653.844.761,00	447.037.761,00	-244.055.239,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	121.093.000,00	88.900.761,00	88.900.761,00	-32.192.239,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	45.000.000,00	74.400.000,00	24.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.020.000,00	20.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	499.944.000,00	263.717.000,00	-236.283.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.250.000.000,00	3.290.256.937,00	3.000.000.000,00	-250.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	290.256.937,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	921.000.000,00	918.159.725,00	874.874.725,00	-46.125.275,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00	-5.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	50.590.000,00	36.705.000,00	-14.295.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	850.000.000,00	847.574.725,00	818.174.725,00	-31.825.275,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.000.000,00	47.850.000,00	47.850.000,00	-2.150.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	47.850.000,00	47.850.000,00	-2.150.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Tersedianya jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia, jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia,Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia**				**4 unit**	**4 unit**	**1.800.000.000,00**	**1.799.983.581,00**	**2.289.137.253,00**	**-1.800.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia, jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia,Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia*				4 unit	4 unit	400.000.000,00	399.997.848,00	1.789.144.529,00	1.389.144.529,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Jumlah produksi perikanan tangkap, Cakupan bina kelompok nelayan tangkap			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.888,00	99.999.888,00	-112,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				10 Unit	13 Unit	300.000.000,00	299.997.960,00	1.689.144.641,00	1.389.144.641,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Kapitiau Kab. Sarmi, Pantai Barat, Subu Kab. Sarmi, Pantai Barat, Masep Kab. Sarmi, Bonggo, Armopa Kab. Sarmi, Bonggo, Anus Kab. Sarmi, Bonggo, Taronitha Srum	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya jumlah nelayan kecil yang meningkatkan kapasitasnya, Tersedianya jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya*				65 Kelompok	65 Kelompok	1.000.000.000,00	999.986.920,00	299.993.040,00	-700.006.960,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Cakupan bina kelompok nelayan tangkap			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	600.000.000,00	599.994.880,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde Kab. Sarmi, Bonggo, Anus Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Kapitiau Kab. Sarmi, Pantai Timur, Sunum	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				5 Kelompok	5 Kelompok	400.000.000,00	399.992.040,00	299.993.040,00	-100.006.960,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Sunum Kab. Sarmi, Bonggo, Krim Podena Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Wakde Kab. Sarmi, Bonggo, Anus Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Kapitiau	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan, Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.999.129,00	0,00	-200.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Jumlah produksi perikanan tangkap, Cakupan bina kelompok nelayan tangkap		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.999.129,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha tangkap yang menjadi kewenangan kabupaten/kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.999.684,00	199.999.684,00	-316,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Jumlah produksi perikanan tangkap, Cakupan bina kelompok nelayan tangkap		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.999.684,00	199.999.684,00	-316,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Tersedianya jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan**				**21 Kelompok**	**21 Kelompok**	**1.200.000.000,00**	**1.199.972.110,00**	**899.967.578,00**	**-1.200.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Tersedianya jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas, jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan*				21 Kelompok	21 Kelompok	900.000.000,00	899.991.545,00	599.987.013,00	-300.012.987,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Jumlah produksi perikanan Budidaya, Cakupan bina kelompok nelayan Budidaya		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	400.000.000,00	399.999.082,00	299.990.347,00	-100.009.653,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Sarmi, Tefarewar	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				20 Kelompok	20 Kelompok	300.000.000,00	299.996.666,00	299.996.666,00	-3.334,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Tor Atas, Omte Kab. Sarmi, Tor Atas, Safrom Tane Kab. Sarmi, Tor Atas, Kanderjan Kab. Sarmi, Bonggo, Maweswares Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Dabe Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi, Tefarewar Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	4 Kelompok	200.000.000,00	199.995.797,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Tersedianya jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*				16 Unit	16 Unit	300.000.000,00	299.980.565,00	299.980.565,00	-19.435,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Jumlah produksi perikanan Budidaya, Cakupan bina kelompok nelayan Budidaya		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	299.980.565,00	299.980.565,00	-19.435,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Omte Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Kab. Sarmi, Bonggo, Bebon Jaya Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari Kab. Sarmi, Bonggo, Maweswares Kab. Sarmi, Sarmi, Tefarewar Kab. Sarmi, Tor Atas, Safron Tane Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Sarmi, Marareana	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tersedianya jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah usaha pelaku perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi**				**3 unit**	**3 unit**	**1.400.000.000,00**	**1.399.916.731,00**	**1.301.016.793,00**	**-1.400.000.000,00**							**0,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, jumlah usaha pelaku perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi*				3 Unit	3 Unit	700.000.000,00	699.995.056,00	699.995.056,00	-4.944,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Konsumsi ikan/Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	700.000.000,00	699.995.056,00	699.995.056,00	-4.944,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Sunum	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.3.04	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	*Tersedianya jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil*				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	300.000.000,00	299.999.339,00	201.099.401,00	-98.900.599,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Konsumsi ikan/Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.3.04.0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	300.000.000,00	299.999.339,00	201.099.401,00	-98.900.599,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.3.06	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	*Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil*				200 kg/kap/ tahun	200 kg/kap/ tahun	400.000.000,00	399.922.336,00	399.922.336,00	-77.664,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Konsumsi ikan/Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.3.06.0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil																		
			Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil				200 kg/kap/ tahun	200 kg/kap/ tahun	400.000.000,00	399.922.336,00	399.922.336,00	-77.664,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Marareana Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmo Kab. Sarmi, Sarmi, Tefarewar	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**7.259.615.796,00**	**7.445.150.101,00**	**7.526.491.824,00**	**266.876.028,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.259.615.796,00**	**7.445.150.101,00**	**7.526.491.824,00**	**266.876.028,00**							**0,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**7.259.615.796,00**	**7.445.150.101,00**	**7.526.491.824,00**	**266.876.028,00**							**0,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.247.757.208,00**	**4.435.698.925,00**	**4.426.525.329,00**	**-4.247.757.208,00**							**0,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	42.100.000,00	40.800.000,00	19.400.000,00	-22.700.000,00			-	- -	Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	22.700.000,00	21.400.000,00	0,00	-22.700.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	19.400.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.463.630.267,00	2.959.417.190,00	3.171.072.426,00	707.442.159,00			-	- -	Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.444.230.267,00	2.940.017.190,00	3.151.672.426,00	707.442.159,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	19.400.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	190.000.000,00	257.668.500,00	99.996.000,00	-90.004.000,00			-	- -	Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				28 Paket	28 Paket	42.000.000,00	40.672.500,00	0,00	-42.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	48.000.000,00	117.000.000,00	0,00	-48.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	100.000.000,00	99.996.000,00	99.996.000,00	-4.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	564.000.000,00	548.491.637,00	506.735.305,00	-57.264.695,00			-	- -	Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	199.999.023,00	199.999.023,00	-977,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	199.984.349,00	199.984.349,00	-15.651,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	-5.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.999.265,00	15.176.933,00	176.933,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	99.000.000,00	83.514.000,00	41.580.000,00	-57.420.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	15.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	11.250.000,00			-	- -	Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	954.470.160,00	590.850.000,00	590.850.000,00	-363.620.160,00			-	- -	Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-50.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.970.160,00	11.700.000,00	11.700.000,00	-1.270.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	921.500.000,00	559.200.000,00	559.200.000,00	-362.300.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	18.556.781,00	12.221.598,00	12.221.598,00	-6.335.183,00			-	- -	Dinas Pariwisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	12.381.531,00	12.221.598,00	12.221.598,00	-159.933,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	6.175.250,00	0,00	0,00	-6.175.250,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	-				-	-	**1.511.858.588,00**	**1.509.476.676,00**	**1.799.991.995,00**	**-1.511.858.588,00**							**0,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*				40 Orang 5 Unit	40 Orang 5 Unit	511.858.588,00	509.478.768,00	899.998.087,00	388.139.499,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Tempat Wisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	11.858.588,00	9.480.681,00	400.000.000,00	388.141.412,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	499.998.087,00	499.998.087,00	-1.913,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan/Pengembangan(Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi*				6 Unit	6 Unit	1.000.000.000,00	999.997.908,00	899.993.908,00	-100.006.092,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Masyarakat dan Tempat Wisata		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	1.000.000.000,00	999.997.908,00	899.993.908,00	-100.006.092,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	-				-	-	**1.500.000.000,00**	**1.499.974.500,00**	**1.299.974.500,00**	**-1.500.000.000,00**							**0,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	- *Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*				40 Orang	40 Orang	1.000.000.000,00	999.991.388,00	799.991.388,00	-200.008.612,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	Masyarakat Pengrajin Ekonomi Kreatif		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	1.000.000.000,00	999.991.388,00	799.991.388,00	-200.008.612,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif*				40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	499.983.112,00	499.983.112,00	-16.888,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Masyarakat Pengrajin Ekonomi Kreatif		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	499.983.112,00	499.983.112,00	-16.888,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Lembah Neidam Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.867.343.627,00**	**9.173.383.007,00**	**10.026.531.091,00**	**1.334.656.373,00**							**10.202.000.000,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	-	-	- -			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.984.543.627,00	8.244.020.007,00	9.097.168.091,00	1.112.624.464,00			-	- -	-		8.555.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	7.960.543.627,00	8.222.260.007,00	9.075.408.091,00	1.114.864.464,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	21.760.000,00	21.760.000,00	21.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	277.500.000,00	277.463.000,00	277.463.000,00	-37.000,00			-	- -	-		896.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			61.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	249.963.000,00	249.963.000,00	-37.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			750.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	605.300.000,00	651.900.000,00	651.900.000,00	46.600.000,00			-	- -	-		750.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**17.367.343.627,00**	**17.629.057.967,00**	**18.771.687.199,00**	**1.404.343.572,00**							**25.934.462.398,00**	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	578.600.000,00	625.200.000,00	625.200.000,00	46.600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**4.916.001.000,00**	**4.915.494.500,00**	**4.788.089.500,00**	**3.683.999.000,00**							**8.600.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	3.316.001.000,00	3.315.969.000,00	3.261.734.000,00	-54.267.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		5.650.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	682.986.000,00	682.986.000,00	665.281.000,00	-17.705.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Kapitiau	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	300.020.000,00	300.020.000,00	268.020.000,00	-32.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Aruswar Kab. Sarmi, Pantai Barat, Mertewar Kab. Sarmi, Pantai Barat, Niwerawar Kab. Sarmi, Pantai Barat, Wari Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				1,1 Ton	1,1 Ton	947.404.000,00	947.400.000,00	947.400.000,00	-4.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Tanjung Batu Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Dua Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Finyabor Dua Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Mertewar Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Holmafen Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				6250 Batang	6250 Batang	499.995.000,00	499.967.000,00	495.437.000,00	-4.558.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			700.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				1750 Batang	1750 Batang	885.596.000,00	885.596.000,00	885.596.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	249.548.000,00	241.048.000,00	-8.952.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		450.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	249.548.000,00	241.048.000,00	-8.952.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	370.000.000,00	369.997.500,00	345.327.500,00	-24.672.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				1 Laporan	1 Laporan	370.000.000,00	369.997.500,00	345.327.500,00	-24.672.500,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	980.000.000,00	979.980.000,00	939.980.000,00	-40.020.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				610 Ekor	610 Ekor	980.000.000,00	979.980.000,00	939.980.000,00	-40.020.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**490.060.000,00**	**904.027.398,00**	**582.462.398,00**							**1.082.462.398,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	500.000.000,00	490.060.000,00	754.027.398,00	254.027.398,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		887.462.398,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				13 Ha	13 Ha	500.000.000,00	490.060.000,00	416.565.000,00	-83.435.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sawar Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Binyer	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				-	3 Unit	0,00	0,00	337.462.398,00	337.462.398,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Dua Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			337.462.398,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		195.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	1 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			195.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**399.990.000,00**	**399.990.000,00**	**100.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	399.990.000,00	399.990.000,00	-10.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	399.990.000,00	399.990.000,00	-10.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	-				-	-	**349.999.999,00**	**349.945.000,00**	**329.755.000,00**	**650.000.001,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	349.999.999,00	349.945.000,00	329.755.000,00	-20.244.999,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				30 Ha	30 Ha	349.999.999,00	349.945.000,00	329.755.000,00	-20.244.999,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Kapitiau Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawesday	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	-				-	-	**2.333.999.001,00**	**2.300.185.460,00**	**2.323.294.210,00**	**2.216.000.999,00**							**4.550.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	2.333.999.001,00	2.300.185.460,00	2.323.294.210,00	-10.704.791,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		4.550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	499.999.001,00	466.194.160,00	466.194.160,00	-33.804.841,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Kanderjan Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			550.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	5 Unit	988.108.750,00	988.104.750,00	951.358.750,00	-36.750.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	5 Unit	845.891.250,00	845.886.550,00	809.741.300,00	-36.149.950,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Maweswares Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Tamar Sari Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Sewan Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke Dua	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			2.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	16 Orang	0,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**81.393.390.774,00**	**81.393.077.621,00**	**96.460.705.968,00**	**15.067.315.194,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**81.393.390.774,00**	**81.393.077.621,00**	**96.460.705.968,00**	**15.067.315.194,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**81.393.390.774,00**	**81.393.077.621,00**	**96.460.705.968,00**	**15.067.315.194,00**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**54.768.390.774,00**	**54.768.078.362,00**	**70.422.406.709,00**	**-54.768.390.774,00**							**0,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.640.734.561,00	20.640.734.561,00	20.058.072.898,00	-582.661.663,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2520 Orang /bulan	2520 Orang /bulan	20.240.734.561,00	20.240.734.561,00	19.658.072.898,00	-582.661.663,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	812.000.000,00	811.689.290,00	1.879.079.300,00	1.067.079.300,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	112.000.000,00	111.689.990,00	179.080.000,00	67.080.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	330.553.298,00	330.552.800,00	1.330.552.800,00	999.999.502,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	369.446.702,00	369.446.500,00	369.446.500,00	-202,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.210.000.000,00	4.210.000.000,00	8.115.000.000,00	3.905.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	960.000.000,00	960.000.000,00	1.310.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	390.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.720.000.000,00	1.720.000.000,00	3.220.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	3.195.000.000,00	1.695.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.519.600.000,00	19.600.000,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.519.600.000,00	19.600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.371.866.702,00	8.371.865.000,00	12.379.865.000,00	4.007.998.298,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	1.272.000.000,00	1.162.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	436.000.000,00	386.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.181.866.702,00	8.181.865.000,00	10.581.865.000,00	2.399.998.298,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	3.737.000.000,00	2.697.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	100 Unit	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	1.487.000.000,00	447.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	3 Unit	0,00	0,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	13.313.789.511,00	13.313.789.511,00	13.313.789.511,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	413.789.511,00	413.789.511,00	413.789.511,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	480.000.000,00	480.000.000,00	3.020.000.000,00	2.540.000.000,00			-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar Optimalisasi dan Penyediaan infrastruktur dasar			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	480.000.000,00	480.000.000,00	2.020.000.000,00	1.540.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	5.100.000.000,00	2.000.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	4.400.000.000,00	2.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	-				-	-	**25.625.000.000,00**	**25.625.000.000,00**	**25.038.300.000,00**	**-25.625.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	15.400.000.000,00	15.400.000.000,00	14.188.300.000,00	-1.211.700.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00	11.688.300.000,00	-1.211.700.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00	10.150.000.000,00	1.625.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	8.525.000.000,00	8.525.000.000,00	10.150.000.000,00	1.625.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	700.000.000,00	-1.000.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				200 Dokumen	200 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				3 Kasus	3 Kasus	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Infomasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-				-	-	**1.000.000.000,00**	**999.999.259,00**	**999.999.259,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.000.000.000,00	999.999.259,00	999.999.259,00	-741,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				20 Orang	20 Orang	350.000.000,00	349.999.259,00	349.999.259,00	-741,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**32.676.819.770,00**	**31.298.971.795,00**	**30.315.146.168,00**	**-1.349.999.730,00**							**31.326.820.040,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	160.000.000,00	145.380.000,00	104.640.000,00	-55.360.000,00			-	- -	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00	-10.800.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	23.100.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	17.640.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	35.840.000,00	35.840.000,00	35.840.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.751.000.000,00	5.338.815.156,00	6.250.805.005,00	1.499.805.005,00			-	- -	-		4.751.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	0,00	5.162.455.156,00	6.074.445.005,00	6.074.445.005,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	176.360.000,00	176.360.000,00	176.360.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			151.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	870.000.000,00	1.106.393.900,00	0,00	-870.000.000,00			-	- -	-		870.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	98.465.900,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	0,00	1.007.928.000,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.945.525.413,00	1.578.139.140,00	1.253.823.520,00	-1.691.701.893,00			-	-	-		2.945.524.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	13.387.500,00	13.387.500,00	13.387.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	149.742.940,00	73.274.320,00	73.274.320,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**59.594.718.806,00**	**58.831.262.653,00**	**59.534.735.026,00**	**-59.983.780,00**							**58.744.717.076,00**	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.524.900,00	82.829.700,00	150.413.700,00	49.888.800,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.524.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1.750.000.513,00	632.179.000,00	316.748.000,00	-1.433.252.513,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.716.143.600,00	4.046.864.835,00	3.720.280.435,00	4.136.835,00			-	-	-		3.716.143.870,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	49.995.000,00	49.995.000,00	-5.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	141.143.600,00	170.795.000,00	170.795.000,00	29.651.400,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.143.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	3.967.185,00	3.967.185,00	-46.032.815,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	7 Laporan	3.475.000.000,00	3.822.107.650,00	3.495.523.250,00	20.523.250,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.475.000.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	797.875.000,00	196.170.000,00	1.142.970.000,00	345.095.000,00			-	-	-		397.875.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	217.875.000,00	159.570.000,00	106.370.000,00	-111.505.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			217.875.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	180.000.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	-143.400.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	15.429.276.270,00	17.134.771.764,00	15.759.412.208,00	330.135.938,00			-	-	-		15.429.276.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	14.079.276.270,00	15.562.339.764,00	14.186.980.208,00	107.703.938,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.079.276.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	500.000.000,00	543.375.000,00	543.375.000,00	43.375.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	850.000.000,00	1.029.057.000,00	1.029.057.000,00	179.057.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	3.256.999.487,00	1.752.437.000,00	2.083.215.000,00	-1.173.784.487,00			-	-	-		3.057.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	-27.680.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				4 Laporan	4 Laporan	157.000.000,00	157.705.000,00	157.705.000,00	705.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				2 Laporan	4 Laporan	1.549.999.487,00	1.272.412.000,00	1.603.190.000,00	53.190.513,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-1.200.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	-				-	-	**26.917.899.036,00**	**27.532.290.858,00**	**29.219.588.858,00**	**499.998.000,00**							**27.417.897.036,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	2.137.749.036,00	2.260.484.514,00	2.260.484.514,00	122.735.478,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		2.137.747.036,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	598.611.006,00	598.611.006,00	-1.388.994,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	887.749.036,00	885.048.000,00	885.048.000,00	-2.701.036,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			887.747.036,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	299.985.508,00	299.985.508,00	-14.492,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	76.840.000,00	76.840.000,00	26.840.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	1.096.000.000,00	888.591.475,00	888.591.475,00	-207.408.525,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		1.096.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	54.617.527,00	54.617.527,00	-382.473,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	54.517.527,00	54.517.527,00	-482.473,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	298.945.207,00	298.945.207,00	-1.054.793,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	296.869.207,00	296.869.207,00	-3.130.793,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	57.900.000,00	57.900.000,00	-92.100.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	236.000.000,00	125.742.007,00	125.742.007,00	-110.257.993,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			236.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	8.810.265.000,00	9.145.087.785,00	9.145.087.785,00	334.822.785,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		8.810.265.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	2.520.000.000,00	2.659.736.968,00	2.659.736.968,00	139.736.968,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	2.835.000.000,00	3.023.872.839,00	3.023.872.839,00	188.872.839,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.835.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	961.500.000,00	933.245.656,00	933.245.656,00	-28.254.344,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			961.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	961.500.000,00	933.245.656,00	933.245.656,00	-28.254.344,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			961.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	3 Laporan	961.500.000,00	933.245.656,00	933.245.656,00	-28.254.344,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			961.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	188.265.000,00	410.146.000,00	410.146.000,00	221.881.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			188.265.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	-82.200.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			135.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	247.500.000,00	198.795.010,00	198.795.010,00	-48.704.990,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			247.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	4.444.125.000,00	4.093.549.980,00	4.429.737.980,00	-14.387.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		4.444.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.319.125.000,00	876.875.000,00	876.875.000,00	-442.250.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.319.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000.000,00	2.455.708.000,00	2.791.896.000,00	291.896.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	4 Orang	240.000.000,00	238.800.000,00	238.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				4 Orang	4 Orang	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	159.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-41.600.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	69.766.980,00	69.766.980,00	19.766.980,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	8.975.000.000,00	9.728.339.350,00	11.079.449.350,00	2.104.449.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		9.475.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				2 Laporan	8 Laporan	720.000.000,00	704.835.000,00	2.055.945.000,00	1.335.945.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			720.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				75 Dokumen	75 Dokumen	8.200.000.000,00	8.989.504.350,00	8.989.504.350,00	789.504.350,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			8.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	53.000.000,00	52.578.000,00	52.578.000,00	-422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		53.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000,00	52.578.000,00	52.578.000,00	-422.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			53.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	1.401.760.000,00	1.363.659.754,00	1.363.659.754,00	-38.100.246,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		1.401.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.047.000.000,00	625.122.000,00	625.122.000,00	-421.878.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			1.047.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	204.760.000,00	683.379.242,00	683.379.242,00	478.619.242,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			204.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	55.158.512,00	55.158.512,00	-94.841.488,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**17.958.470.640,00**	**17.758.470.018,00**	**17.619.432.661,00**	**-339.037.979,00**							**600.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.958.470.640,00**	**17.758.470.018,00**	**17.619.432.661,00**	**-339.037.979,00**							**600.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**17.958.470.640,00**	**17.758.470.018,00**	**17.619.432.661,00**	**-339.037.979,00**							**600.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**9.620.670.684,00**	**9.420.683.558,00**	**8.748.043.716,00**	**-9.520.670.684,00**							**100.000.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	170.000.000,00	169.963.665,00	129.999.665,00	-40.000.335,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.665,00	49.999.665,00	-335,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	39.964.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.379.476.821,00	5.940.136.821,00	5.858.485.870,00	479.009.049,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.339.476.821,00	5.900.136.821,00	5.753.344.717,00	413.867.896,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	105.141.153,00	65.141.153,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	985.270.000,00	807.623.994,00	384.052.000,00	-601.218.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	154.270.000,00	39.520.000,00	0,00	-154.270.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				150 Orang	150 Orang	831.000.000,00	768.103.994,00	384.052.000,00	-446.948.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.406.402.900,37	1.183.218.932,00	1.083.454.932,00	-322.947.968,37			-	- - -	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	239.332.932,00	239.332.932,00	239.332.932,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- - -			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	363.342.900,37	173.350.000,00	387.350.000,00	24.007.099,63	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	43.060.000,00	43.060.000,00	93.060.000,00	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	1.000.000.000,00	727.476.000,00	363.712.000,00	-636.288.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	239.790.962,63	0,00	0,00	-239.790.962,63			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	239.790.962,63	0,00	0,00	-239.790.962,63	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.112.190.000,00	1.102.488.897,00	1.142.070.000,00	29.880.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola penerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	157.100.000,00	157.092.000,00	157.092.000,00	-8.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	0,00	930.396.897,00	969.978.000,00	969.978.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**17.958.470.640,00**	**17.758.470.018,00**	**17.619.432.661,00**	**-339.037.979,00**							**600.000.000,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**17.958.470.640,00**	**17.758.470.018,00**	**17.619.432.661,00**	**-339.037.979,00**							**600.000.000,00**	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**17.958.470.640,00**	**17.758.470.018,00**	**17.619.432.661,00**	**-339.037.979,00**							**600.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**17.958.470.640,00**	**17.758.470.018,00**	**17.619.432.661,00**	**-339.037.979,00**							**600.000.000,00**	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	327.540.000,00	217.251.249,00	149.981.249,00	-177.558.751,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola penerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	149.981.249,00	149.981.249,00	-18.751,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola penerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	-	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	67.540.000,00	67.270.000,00	0,00	-67.540.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	-				**-**	**-**	**6.087.799.956,00**	**6.087.792.634,00**	**5.821.395.990,00**	**-5.587.799.956,00**							**500.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	2.600.000.000,00	2.599.997.948,00	2.599.997.948,00	-2.052,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	599.999.450,00	599.999.450,00	-550,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				3 Berita Acara	3 Berita Acara	550.000.000,00	549.999.760,00	549.999.760,00	-240,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				12 Berita Acara	12 Berita Acara	1.000.000.000,00	999.999.522,00	999.999.522,00	-478,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00	449.999.216,00	449.999.216,00	-784,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	1.000.000.000,00	999.996.448,00	999.996.448,00	-3.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	699.999.369,00	699.999.369,00	-631,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				32 Orang	32 Orang	300.000.000,00	299.997.079,00	299.997.079,00	-2.921,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	1.705.615.956,00	1.705.614.512,00	1.439.217.868,00	-266.398.088,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				3 Kerja Sama	3 Kerja Sama	487.800.000,00	487.799.206,00	487.799.206,00	-794,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	1.217.815.956,00	1.217.815.306,00	951.418.662,00	-266.397.294,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	782.184.000,00	782.183.726,00	782.183.726,00	-274,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	282.184.000,00	282.183.726,00	282.183.726,00	-274,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.250.000.000,00**	**2.249.993.826,00**	**3.049.992.955,00**	**-2.250.000.000,00**							**0,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	1.750.000.000,00	1.749.993.826,00	2.249.992.955,00	499.992.955,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	799.999.378,00	1.299.998.507,00	499.998.507,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	449.999.846,00	449.999.846,00	-154,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	499.994.602,00	499.994.602,00	-5.398,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	800.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	800.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**183.975.085.851,00**	**180.755.427.075,00**	**193.189.621.906,00**	**9.214.536.055,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**183.975.085.851,00**	**180.755.427.075,00**	**193.189.621.906,00**	**9.214.536.055,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**183.975.085.851,00**	**180.755.427.075,00**	**193.189.621.906,00**	**9.214.536.055,00**							**0,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**19.327.793.651,00**	**18.922.804.133,00**	**22.159.824.382,00**	**-19.327.793.651,00**							**0,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.995.374,00	49.995.374,00	-4.626,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	24.998.205,00	24.998.205,00	-1.795,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	24.997.169,00	24.997.169,00	-2.831,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.260.593.651,00	7.775.449.482,00	8.207.064.223,00	-5.053.529.428,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	13.210.593.651,00	7.725.428.515,00	8.157.043.256,00	-5.053.550.395,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	24.994.097,00	24.994.097,00	-5.903,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.026.870,00	25.026.870,00	26.870,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.995.540,00	199.995.540,00	149.995.540,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.995.540,00	199.995.540,00	149.995.540,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000.000,00	2.090.976.243,00	2.527.536.596,00	527.536.596,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	291.097.647,00	493.138.000,00	293.138.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	290.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.004.936,00	194.004.936,00	94.004.936,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	499.969.000,00	499.969.000,00	-31.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	999.905.000,00	1.000.425.000,00	425.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.999.660,00	49.999.660,00	-340,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.787.200.000,00	8.776.428.909,00	9.265.274.064,00	5.478.074.064,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.010.000,00	20.010.000,00	10.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	228.762.000,00	308.762.000,00	108.762.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	0 Laporan	0,00	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.447.200.000,00	8.527.656.909,00	8.591.502.064,00	5.144.302.064,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	180.000.000,00	179.958.585,00	1.909.958.585,00	1.729.958.585,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	0 Unit	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	79.960.000,00	109.960.000,00	29.960.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.998.585,00	299.998.585,00	199.998.585,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	-				-	-	**163.447.292.200,00**	**160.632.718.985,00**	**169.239.893.567,00**	**-163.447.292.200,00**							**0,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-				-	-	2.397.500.000,00	2.383.006.092,00	2.653.006.092,00	255.506.092,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	49.997.770,00	49.997.770,00	-5.002.230,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	46.607.290,00	46.607.290,00	-8.392.710,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	137.500.000,00	135.432.254,00	135.432.254,00	-2.067.746,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				60 Dokumen	60 Dokumen	100.000.000,00	99.989.060,00	134.989.060,00	34.989.060,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	100.000.000,00	99.978.424,00	99.978.424,00	-21.576,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	100.000.000,00	99.990.328,00	134.990.328,00	34.990.328,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	799.997.660,00	799.997.660,00	-2.340,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	699.999.750,00	899.999.750,00	199.999.750,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	99.999.201,00	99.999.201,00	-799,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	51.032.410,00	51.032.410,00	1.032.410,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.982.143,00	49.982.143,00	-17.857,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	149.999.802,00	149.999.802,00	-198,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	1.350.000.000,00	1.349.924.378,00	1.049.956.358,00	-300.043.642,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	100.000.000,00	99.995.490,00	99.995.490,00	-4.510,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				240 Dokumen	240 Dokumen	150.000.000,00	149.962.830,00	149.962.830,00	-37.170,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	199.999.340,00	199.999.340,00	-660,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				112 Laporan	112 Laporan	250.000.000,00	249.980.000,00	249.980.000,00	-20.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				45 Dokumen	45 Dokumen	50.000.000,00	49.987.465,00	49.987.465,00	-12.535,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	41 Orang	600.000.000,00	599.999.253,00	300.031.233,00	-299.968.767,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	1.750.000.000,00	1.749.998.835,00	1.899.998.835,00	149.998.835,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	49.999.695,00	49.999.695,00	-50.000.305,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				20 Laporan	20 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	549.999.580,00	549.999.580,00	399.999.580,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000,00	699.999.560,00	699.999.560,00	-440,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				-	0 Dokumen	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	157.749.792.200,00	154.949.792.200,00	163.436.934.802,00	5.687.142.602,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	151.749.792.200,00	149.949.792.200,00	154.536.934.802,00	2.787.142.602,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000.000,00	5.000.000.000,00	8.900.000.000,00	2.900.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	-	200.000.000,00	199.997.480,00	199.997.480,00	-2.520,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.997.480,00	99.997.480,00	-2.520,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	41 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	-				-	-	**1.200.000.000,00**	**1.199.903.957,00**	**1.789.903.957,00**	**-1.200.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	1.200.000.000,00	1.199.903.957,00	1.789.903.957,00	589.903.957,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	249.963.901,00	549.963.901,00	299.963.901,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	99.980.000,00	389.980.000,00	189.980.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	300.000.000,00	399.999.226,00	399.999.226,00	99.999.226,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	149.996.000,00	149.996.000,00	-4.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	199.964.830,00	199.964.830,00	-35.170,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**6.173.098.146,00**	**6.285.499.717,00**	**7.238.367.072,00**	**1.065.268.926,00**							**5.866.383.635,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.173.098.146,00**	**6.285.499.717,00**	**7.238.367.072,00**	**1.065.268.926,00**							**5.866.383.635,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**6.173.098.146,00**	**6.285.499.717,00**	**7.238.367.072,00**	**1.065.268.926,00**							**5.866.383.635,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				**-**	**-**	**5.386.098.146,00**	**5.498.923.413,00**	**5.951.790.768,00**	**-306.714.511,00**							**5.079.383.635,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.331.498.146,00	4.533.519.269,00	5.150.170.869,00	818.672.723,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		4.331.498.146,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.286.498.146,00	4.488.521.269,00	5.105.172.869,00	818.674.723,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			4.286.498.146,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.998.000,00	19.998.000,00	-2.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	275.000.000,00	28.101.500,00	18.101.500,00	-256.898.500,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	18.101.500,00	18.101.500,00	-6.898.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	47 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	265.000.000,00	254.772.440,00	162.860.440,00	-102.139.560,00			-	- -	-		205.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	50.000.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00	-10.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2319 Paket	2319 Paket	25.000.000,00	24.976.440,00	24.976.440,00	-23.560,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	180.000.000,00	179.806.000,00	87.894.000,00	-92.106.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			180.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	317.885.489,00	532.538.124,00	520.665.879,00	202.780.390,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	-		317.885.489,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	36.000.000,00	35.990.000,00	35.990.000,00	-10.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			36.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	276.885.489,00	491.553.124,00	479.680.879,00	202.795.390,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			276.885.489,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	71.714.511,00	49.992.080,00	49.992.080,00	-21.722.431,00			-	- -	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.992.080,00	49.992.080,00	-7.920,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	21.714.511,00	0,00	0,00	-21.714.511,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Jumlah Laporan PelaksanaanPenyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**				**5 Laporan**	**5 Laporan**	**787.000.000,00**	**786.576.304,00**	**1.286.576.304,00**	**0,00**							**787.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-				-	-	787.000.000,00	786.576.304,00	1.286.576.304,00	499.576.304,00			-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat	Wajib Pajak		787.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	245.000.000,00	244.999.304,00	244.999.304,00	-696,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			245.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				-	10 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				9 Laporan	9 Laporan	100.000.000,00	99.580.000,00	99.580.000,00	-420.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				100 Obyek Pajak	100 Obyek Pajak	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				100 Dokumen	100 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	242.000.000,00	241.998.000,00	241.998.000,00	-2.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			242.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	29.999.000,00	29.999.000,00	-1.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat Pengembangan Potensi Ekonomi masyarakat			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				-	1 Laporan	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Kasukwe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM							**9.119.013.076,00**	**9.567.508.312,00**	**9.512.716.597,00**	**393.703.521,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.119.013.076,00**	**9.567.508.312,00**	**9.512.716.597,00**	**393.703.521,00**							**0,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**7.219.013.076,00**	**7.686.635.100,00**	**7.831.843.385,00**	**612.830.309,00**							**0,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**5.153.013.076,00**	**5.901.898.720,00**	**6.280.761.515,00**	**-5.153.013.076,00**							**0,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	24.948.596,00	24.948.596,00	-51.404,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.948.596,00	4.948.596,00	-51.404,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.548.599.351,00	4.185.104.055,00	4.659.992.850,00	1.111.393.499,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.538.573.076,00	4.175.083.365,00	4.649.972.160,00	1.111.399.084,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.026.275,00	10.020.690,00	10.020.690,00	-5.585,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00	-110.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	19.890.000,00	19.890.000,00	-110.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	725.000.000,00	724.655.736,00	532.629.736,00	-192.370.264,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	19.995.776,00	19.995.776,00	-4.224,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	45.000.000,00	44.999.960,00	44.999.960,00	-40,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	600.000.000,00	599.660.000,00	407.634.000,00	-192.366.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	466.413.725,00	466.395.425,00	562.395.425,00	95.981.700,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	8.000.000,00	7.995.000,00	7.995.000,00	-5.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	278.413.725,00	278.400.425,00	374.400.425,00	95.986.700,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	368.000.000,00	480.904.908,00	480.904.908,00	112.904.908,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	0,00	53.379.708,00	53.379.708,00	53.379.708,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	0,00	59.531.200,00	59.531.200,00	59.531.200,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	368.000.000,00	367.994.000,00	367.994.000,00	-6.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	-				-	-	**2.066.000.000,00**	**1.784.736.380,00**	**1.551.081.870,00**	**-2.066.000.000,00**							**0,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	300.000.000,00	276.745.455,00	443.568.460,00	143.568.460,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	239.943.725,00	340.587.000,00	90.587.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	36.801.730,00	102.981.460,00	52.981.460,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	150.000.000,00	149.992.750,00	149.992.750,00	-7.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				60 Dokumen	60 Dokumen	150.000.000,00	149.992.750,00	149.992.750,00	-7.250,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	1.566.000.000,00	1.307.998.350,00	778.778.350,00	-787.221.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				35 Orang	35 Orang	50.000.000,00	49.998.350,00	49.998.350,00	-1.650,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.516.000.000,00	1.258.000.000,00	728.780.000,00	-787.220.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	50.000.000,00	49.999.825,00	178.742.310,00	128.742.310,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	49.999.825,00	178.742.310,00	128.742.310,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.900.000.000,00**	**1.880.873.212,00**	**1.680.873.212,00**	**-219.126.788,00**							**0,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	-				**-**	**-**	**1.900.000.000,00**	**1.880.873.212,00**	**1.680.873.212,00**	**-1.900.000.000,00**							**0,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	1.500.000.000,00	1.499.999.832,00	1.299.999.832,00	-200.000.168,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				80 Orang	80 Orang	1.500.000.000,00	1.499.999.832,00	1.299.999.832,00	-200.000.168,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PA PUA-ADMINIST RASI PEMERIN TAHAN	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	400.000.000,00	380.873.380,00	380.873.380,00	-19.126.620,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.969.880,00	99.969.880,00	-30.120,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	280.903.500,00	280.903.500,00	-19.096.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		INSPEKTORAT DAERAH							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.297.948.111,00**	**7.342.645.325,00**	**6.629.063.500,00**	**-1.081.120.000,00**							**6.216.828.111,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	199.997.540,00	99.998.770,00	-100.001.230,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.998.770,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.998.770,00	99.998.770,00	-1.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.521.828.111,00	4.752.449.511,00	5.080.640.058,00	558.811.947,00			-	-	-		4.521.828.111,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	0,00	4.652.516.011,00	4.980.706.558,00	4.980.706.558,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.421.828.111,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	**NON URUSAN**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.933.500,00	99.933.500,00	-66.500,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.990.200,00	49.990.200,00	-9.800,00			-	-	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.990.200,00	49.990.200,00	-9.800,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	720.000.000,00	718.514.500,00	264.128.000,00	-455.872.000,00			-	-	-		720.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	70.000.000,00	68.722.500,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	650.000.000,00	649.792.000,00	264.128.000,00	-385.872.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.506.120.000,00	854.218.116,00	449.433.073,00	-1.056.686.927,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		525.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	148.612.989,00	32.461.946,00	32.461.946,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	99.985.625,00	99.985.625,00	99.985.625,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	**NON URUSAN**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**11.297.948.111,00**	**11.524.021.653,00**	**10.515.189.828,00**	**-782.758.283,00**							**10.816.828.111,00**	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.250,00	9.999.250,00	-750,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.806.252,00	14.806.252,00	-193.748,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	581.120.000,00	580.814.000,00	292.180.000,00	-288.940.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	99.745.146,00	73.140.896,00	-26.859.104,00			-	- -	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	99.745.146,00	73.140.896,00	-26.859.104,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	200.000.000,00	667.730.312,00	611.732.503,00	411.732.503,00			-	- -	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.989.572,00	49.989.572,00	-10.428,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00	-1.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	99.200.000,00	99.200.000,00	-800.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	2 Laporan	0,00	468.541.740,00	412.543.931,00	412.543.931,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
1.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	-				**-**	**-**	**2.900.000.000,00**	**3.081.383.953,00**	**2.786.133.953,00**	**600.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.500.000.000,00	2.681.384.453,00	2.386.134.453,00	-113.865.547,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		3.100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	199.972.000,00	199.972.000,00	99.972.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				32 Laporan	32 Laporan	1.000.000.000,00	999.975.000,00	799.925.000,00	-200.075.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	181.442.575,00	181.442.575,00	81.442.575,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	199.997.622,00	199.997.622,00	-2.378,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				5 Laporan	5 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	204.800.000,00	-95.200.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				5 Kesepakatan	5 Kesepakatan	300.000.000,00	299.999.000,00	299.999.000,00	-1.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	499.998.256,00	499.998.256,00	-1.744,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	400.000.000,00	399.999.500,00	399.999.500,00	-500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.999.500,00	199.999.500,00	-500,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**1.100.000.000,00**	**1.099.992.375,00**	**1.099.992.375,00**	**0,00**							**1.100.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	500.000.000,00	499.999.000,00	499.999.000,00	-1.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	500.000.000,00	499.999.000,00	499.999.000,00	-1.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	600.000.000,00	599.993.375,00	599.993.375,00	-6.625,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	99.998.250,00	99.998.250,00	-1.750,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				12 perangkat daerah	12 perangkat daerah	500.000.000,00	499.995.125,00	499.995.125,00	-4.875,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		DISTRIK SARMI							**6.577.246.838,00**	**6.431.374.808,00**	**6.104.273.648,00**	**-472.973.190,00**							**6.524.440.332,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.577.246.838,00**	**6.431.374.808,00**	**6.104.273.648,00**	**-472.973.190,00**							**6.524.440.332,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.577.246.838,00**	**6.431.374.808,00**	**6.104.273.648,00**	**-472.973.190,00**							**6.524.440.332,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**6.502.246.838,00**	**5.956.453.267,00**	**5.629.352.107,00**	**-52.806.506,00**							**6.449.440.332,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	-17.700.000,00			-	-	-		17.700.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	-17.700.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.700.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.593.636.838,00	3.711.484.527,00	3.877.835.718,00	1.284.198.880,00			-	-	-		2.593.636.838,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	2.593.636.838,00	3.711.484.527,00	3.877.835.718,00	1.284.198.880,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.593.636.838,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	232.000.000,00	231.656.360,00	0,00	-232.000.000,00			-	-	-		232.000.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				37 Paket	37 Paket	232.000.000,00	231.656.360,00	0,00	-232.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			232.000.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	666.000.000,00	465.880.000,00	343.939.000,00	-322.061.000,00			-	-	-		666.000.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	205.000.000,00	105.000.000,00	155.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			205.000.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	16.999.000,00	-1.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	444.000.000,00	343.880.000,00	171.940.000,00	-272.060.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			444.000.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.977.410.000,00	1.514.270.380,00	1.392.115.389,00	-1.585.294.611,00			-	-	-		2.924.603.494,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	86.060.000,00	36.015.000,00	36.015.000,00	-50.045.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			86.060.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	193.800.000,00	143.800.000,00	48.000.000,00	-145.800.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			193.800.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	2.693.050.000,00	1.329.955.380,00	1.303.600.389,00	-1.389.449.611,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			2.640.243.494,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.500.000,00	15.462.000,00	15.462.000,00	-38.000,00			-	- -	-		15.500.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	15.500.000,00	15.462.000,00	15.462.000,00	-38.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.500.000,00	DISTRIK SARMI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				**-**	**-**	**0,00**	**399.921.541,00**	**399.921.541,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	0,00	399.921.541,00	399.921.541,00	399.921.541,00			-	- -	-		0,00	DISTRIK SARMI
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	399.921.541,00	399.921.541,00	399.921.541,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota Kab. Sarmi, Sarmi, Mararena	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	DISTRIK SARMI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-				**-**	**-**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**							**75.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00			-	- -	-		75.000.000,00	DISTRIK SARMI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DISTRIK SARMI
		DISTRIK PANTAI TIMUR							**3.190.409.996,00**	**3.514.961.666,00**	**3.709.736.081,00**	**519.326.085,00**							**3.190.409.996,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.190.409.996,00**	**3.514.961.666,00**	**3.709.736.081,00**	**519.326.085,00**							**3.190.409.996,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.190.409.996,00**	**3.514.961.666,00**	**3.709.736.081,00**	**519.326.085,00**							**3.190.409.996,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				**-**	**-**	**3.190.409.996,00**	**3.514.961.666,00**	**3.709.736.081,00**	**0,00**							**3.190.409.996,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.015.563.982,00	2.068.174.946,00	2.292.924.311,00	277.360.329,00			-	- -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.015.563.982,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.015.563.982,00	2.068.174.946,00	2.292.924.311,00	277.360.329,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.015.563.982,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	9.240.000,00	131.836.496,00	89.276.496,00	80.036.496,00			-	- -	-		9.240.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.240.000,00	131.836.496,00	89.276.496,00	80.036.496,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			9.240.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	106.576.950,00	243.600.630,00	256.190.630,00	149.613.680,00			-	- -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		106.576.950,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	33.625.880,00	33.625.880,00	13.625.880,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	26.576.950,00	102.174.750,00	140.924.750,00	114.347.800,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			26.576.950,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	107.800.000,00	81.640.000,00	21.640.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.059.029.064,00	1.071.349.594,00	1.071.344.644,00	12.315.580,00			-	- -	-		1.059.029.064,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.053.029.064,00	1.065.349.594,00	1.065.344.644,00	12.315.580,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur, Betaf	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.053.029.064,00	DISTRIK PANTAI TIMUR
		DISTRIK PANTAI BARAT							**3.988.482.686,00**	**4.628.516.021,00**	**4.908.435.628,00**	**919.952.942,00**							**3.669.630.953,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.988.482.686,00**	**4.628.516.021,00**	**4.908.435.628,00**	**919.952.942,00**							**3.669.630.953,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.988.482.686,00**	**4.628.516.021,00**	**4.908.435.628,00**	**919.952.942,00**							**3.669.630.953,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.938.482.686,00**	**4.628.516.021,00**	**4.908.435.628,00**	**-268.851.733,00**							**3.669.630.953,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.223.403.972,00	3.021.316.266,00	3.372.735.873,00	1.149.331.901,00			-	-	-		2.223.403.972,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.223.403.972,00	3.021.316.266,00	3.372.735.873,00	1.149.331.901,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.223.403.972,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	187.600.904,00	266.931.575,00	195.431.575,00	7.830.671,00			-	-	-		137.600.904,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.576.865,00	15.573.575,00	15.573.575,00	-3.290,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.576.865,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	49.998.000,00	99.998.000,00	49.998.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	122.024.039,00	201.360.000,00	79.860.000,00	-42.164.039,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			122.024.039,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	115.635.200,00	0,00	0,00	-115.635.200,00			-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	115.635.200,00	0,00	0,00	-115.635.200,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.321.842.610,00	1.300.286.158,00	1.300.286.158,00	-21.556.452,00			-	-	-		1.308.626.077,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	25 Laporan	23.206.533,00	23.194.124,00	23.194.124,00	-12.409,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.990.000,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.009.122,00	9.014.125,00	9.014.125,00	-994.997,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.009.122,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.288.626.955,00	1.268.077.909,00	1.268.077.909,00	-20.549.046,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.288.626.955,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	40.000.000,00	39.982.022,00	39.982.022,00	-17.978,00			-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	39.982.022,00	39.982.022,00	-17.978,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Barat, Arbais	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DISTRIK PANTAI BARAT
		DISTRIK TOR ATAS							**3.287.855.333,00**	**3.655.825.432,00**	**3.684.319.255,00**	**396.463.922,00**							**3.287.855.333,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.287.855.333,00**	**3.655.825.432,00**	**3.684.319.255,00**	**396.463.922,00**							**3.287.855.333,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.287.855.333,00**	**3.655.825.432,00**	**3.684.319.255,00**	**396.463.922,00**							**3.287.855.333,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.241.827.158,00**	**3.611.425.432,00**	**3.639.919.255,00**	**0,00**							**3.241.827.158,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.161.355.333,00	2.265.915.454,00	2.479.638.497,00	1.318.283.164,00			-	-	-		1.161.355.333,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	1.161.355.333,00	2.265.915.454,00	2.479.638.497,00	1.318.283.164,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.161.355.333,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	99.180.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	99.180.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	490.000.000,00	487.842.760,00	440.867.760,00	-49.132.240,00			-	-	-		490.000.000,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	189.250.160,00	189.250.160,00	-10.749.840,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	39.990.000,00	89.990.000,00	49.990.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	21.602.600,00	21.602.600,00	16.602.600,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	245.000.000,00	237.000.000,00	140.025.000,00	-104.975.000,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			245.000.000,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.409.480.030,00	705.238.830,00	666.164.610,00	-743.315.420,00			-	- -	-		1.409.480.030,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.409.480.030,00	705.238.830,00	666.164.610,00	-743.315.420,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.409.480.030,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.991.795,00	53.248.388,00	53.248.388,00	-27.743.407,00			-	- -	-		80.991.795,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	80.991.795,00	53.248.388,00	53.248.388,00	-27.743.407,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.991.795,00	DISTRIK TOR ATAS
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**46.028.175,00**	**44.400.000,00**	**44.400.000,00**	**0,00**							**46.028.175,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	46.028.175,00	44.400.000,00	44.400.000,00	-1.628.175,00			-	- -	-		46.028.175,00	DISTRIK TOR ATAS
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	46.028.175,00	44.400.000,00	44.400.000,00	-1.628.175,00	Kab. Sarmi, Tor Atas, Samanente	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.028.175,00	DISTRIK TOR ATAS
		DISTRIK BONGGO							**4.064.504.419,00**	**4.825.065.779,00**	**5.052.993.999,00**	**988.489.580,00**							**4.064.504.419,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.064.504.419,00**	**4.825.065.779,00**	**5.052.993.999,00**	**988.489.580,00**							**4.064.504.419,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.064.504.419,00**	**4.825.065.779,00**	**5.052.993.999,00**	**988.489.580,00**							**4.064.504.419,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.931.014.419,00**	**4.691.575.779,00**	**4.919.503.999,00**	**0,00**							**3.931.014.419,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	22.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-4.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	22.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.033.114.419,00	2.931.465.779,00	3.262.010.869,00	1.228.896.450,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		2.033.114.419,00	DISTRIK BONGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.033.114.419,00	2.931.465.779,00	3.262.010.869,00	1.228.896.450,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			2.033.114.419,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	98.700.000,00	98.616.870,00	0,00	-98.700.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		98.700.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	98.700.000,00	98.616.870,00	0,00	-98.700.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			98.700.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	350.000.000,00	258.000.000,00	254.000.000,00	-96.000.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		350.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			150.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	200.000.000,00	108.000.000,00	54.000.000,00	-146.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			200.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000.000,00	15.093.130,00	15.093.130,00	-34.906.870,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		50.000.000,00	DISTRIK BONGGO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	50.000.000,00	15.093.130,00	15.093.130,00	-34.906.870,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			50.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.377.200.000,00	1.370.400.000,00	1.370.400.000,00	-6.800.000,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		1.377.200.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.377.200.000,00	1.370.400.000,00	1.370.400.000,00	-6.800.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			1.377.200.000,00	DISTRIK BONGGO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-				-	-	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,00**							**44.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00			-	- -	-		22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00			-	- -	-		22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta																		
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				0 Unit	0 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,00**							**44.000.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00			-	- -	-		22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00			-	- -	-		22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0 Keluarga	0 Keluarga	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-				-	-	**23.490.000,00**	**23.490.000,00**	**23.490.000,00**	**0,00**							**23.490.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	23.490.000,00	23.490.000,00	23.490.000,00	0,00			-	- -	-		23.490.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	23.490.000,00	23.490.000,00	23.490.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.490.000,00	DISTRIK BONGGO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**							**22.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan	-		22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi penataan dan pengembangan SDM aparatur, Kelembagaan dan Sistem Manajemen pemerintahan			22.000.000,00	DISTRIK BONGGO
		DISTRIK APAWER HULU							**2.746.425.386,00**	**3.255.529.021,00**	**3.273.602.563,00**	**527.177.177,00**							**2.702.425.386,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.746.425.386,00**	**3.255.529.021,00**	**3.273.602.563,00**	**527.177.177,00**							**2.702.425.386,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.746.425.386,00**	**3.255.529.021,00**	**3.273.602.563,00**	**527.177.177,00**							**2.702.425.386,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.746.425.386,00**	**3.255.529.021,00**	**3.273.602.563,00**	**-44.000.000,00**							**2.702.425.386,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	646.945.386,00	1.892.337.363,00	2.082.933.118,00	1.435.987.732,00			-	- -	-		646.945.386,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	632.245.386,00	1.878.337.363,00	2.068.933.118,00	1.436.687.732,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			632.245.386,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.700.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-700.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.700.000,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	35.838.000,00	35.837.000,00	0,00	-35.838.000,00			-	- -	-		35.838.000,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	35.838.000,00	35.837.000,00	0,00	-35.838.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			35.838.000,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	399.243.166,00	354.117.600,00	329.277.600,00	-69.965.566,00			-	- -	-		355.243.166,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	199.995.000,00	249.995.000,00	49.995.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.023.166,00	5.022.600,00	5.022.600,00	-566,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.023.166,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.220.000,00	149.100.000,00	74.260.000,00	-75.960.000,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			150.220.000,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	21.365.182,00	21.269.323,00	21.269.323,00	-95.859,00			-	- -	-		21.365.182,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	21.365.182,00	21.269.323,00	21.269.323,00	-95.859,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.365.182,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.617.096.775,00	926.037.535,00	840.122.522,00	-776.974.253,00			-	- -	-		1.617.096.775,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	16.499.864,00	16.485.000,00	16.485.000,00	-14.864,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Wamariri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.499.864,00	DISTRIK APAWER HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.600.596.911,00	909.552.535,00	823.637.522,00	-776.959.389,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.600.596.911,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	25.936.877,00	25.930.200,00	0,00	-25.936.877,00			-	- -	-		25.936.877,00	DISTRIK APAWER HULU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.936.877,00	25.930.200,00	0,00	-25.936.877,00	Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.936.877,00	DISTRIK APAWER HULU
		DISTRIK SARMI TIMUR							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.480.513.892,00**	**4.008.409.855,00**	**4.097.588.751,00**	**-37.741.286,00**							**3.442.772.606,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.085.072.207,00	2.766.102.813,00	3.069.775.904,00	984.703.697,00			-	- -	-		2.047.330.921,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.027.330.921,00	2.746.113.438,00	3.049.786.529,00	1.022.455.608,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.027.330.921,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	37.741.286,00	0,00	0,00	-37.741.286,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	19.989.375,00	19.989.375,00	19.989.375,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	37.741.286,00	37.740.000,00	19.507.500,00	-18.233.786,00			-	- -	-		37.741.286,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	27 Paket	37.741.286,00	37.740.000,00	19.507.500,00	-18.233.786,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.741.286,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	229.526.600,00	201.538.975,00	251.538.975,00	22.012.375,00			-	- -	-		229.526.600,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.983.475,00	9.983.475,00	-16.525,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	39.151.860,00	39.151.860,00	-848.140,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			40.000.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.906.537,00	19.906.537,00	-93.463,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.026.600,00	50.025.000,00	100.025.000,00	49.998.400,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.026.600,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.972.103,00	19.972.103,00	-27.897,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	89.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	-27.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			89.500.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.049.225.453,00	924.182.162,00	706.982.162,00	-342.243.291,00			-	- -	-		1.049.225.453,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.746.370,00	4.740.000,00	4.740.000,00	-6.370,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.746.370,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	24.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.927.083,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.531.508.968,00**	**4.058.902.876,00**	**4.132.081.772,00**	**600.572.804,00**							**3.493.767.682,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	1.019.552.000,00	894.542.162,00	695.342.162,00	-324.209.838,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.019.552.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	78.948.346,00	78.845.905,00	49.784.210,00	-29.164.136,00			-	- -	-		78.948.346,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	64.189.632,00	64.103.642,00	35.041.947,00	-29.147.685,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			64.189.632,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.758.714,00	14.742.263,00	14.742.263,00	-16.451,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Waskey	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.758.714,00	DISTRIK SARMI TIMUR
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-				-	-	**30.000.000,00**	**29.993.021,00**	**13.993.021,00**	**0,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	30.000.000,00	29.993.021,00	13.993.021,00	-16.006.979,00			-	- -	-		30.000.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	29.993.021,00	13.993.021,00	-16.006.979,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DISTRIK SARMI TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**20.995.076,00**	**20.500.000,00**	**20.500.000,00**	**0,00**							**20.995.076,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	20.995.076,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-495.076,00			-	- -	-		20.995.076,00	DISTRIK SARMI TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	20.995.076,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-495.076,00	Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.995.076,00	DISTRIK SARMI TIMUR
		DISTRIK SARMI SELATAN							**2.563.537.628,00**	**2.726.714.893,00**	**2.896.482.176,00**	**332.944.548,00**							**2.563.537.628,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.563.537.628,00**	**2.726.714.893,00**	**2.896.482.176,00**	**332.944.548,00**							**2.563.537.628,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.563.537.628,00**	**2.726.714.893,00**	**2.896.482.176,00**	**332.944.548,00**							**2.563.537.628,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**2.563.537.628,00**	**2.726.714.893,00**	**2.896.482.176,00**	**0,00**							**2.563.537.628,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	25.888.918,00	25.888.918,00	-4.111.082,00			-	- -	-		30.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	25.888.918,00	25.888.918,00	-4.111.082,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	901.347.628,00	1.774.714.949,00	2.016.655.362,00	1.115.307.734,00			-	- -	-		901.347.628,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	901.347.628,00	1.774.714.949,00	2.016.655.362,00	1.115.307.734,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			901.347.628,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	39.970.000,00	39.652.500,00	0,00	-39.970.000,00			-	- -	-		39.970.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	39.970.000,00	39.652.500,00	0,00	-39.970.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			39.970.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	164.230.000,00	164.223.598,00	178.723.598,00	14.493.598,00			-	- -	-		164.230.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.710.000,00	80.708.375,00	130.708.375,00	49.998.375,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			80.710.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.520.000,00	23.515.223,00	18.015.223,00	-5.504.777,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.520.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7	**NON URUSAN**							**2.563.537.628,00**	**2.726.714.893,00**	**2.896.482.176,00**	**332.944.548,00**							**2.563.537.628,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.563.537.628,00**	**2.726.714.893,00**	**2.896.482.176,00**	**332.944.548,00**							**2.563.537.628,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.563.537.628,00**	**2.726.714.893,00**	**2.896.482.176,00**	**332.944.548,00**							**2.563.537.628,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**2.563.537.628,00**	**2.726.714.893,00**	**2.896.482.176,00**	**332.944.548,00**							**2.563.537.628,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.358.990.000,00	653.242.070,00	643.220.945,00	-715.769.055,00			-	-	-		1.358.990.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.050.000,00	-4.950.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			15.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	37.000.000,00	36.819.900,00	36.819.900,00	-180.100,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.306.990.000,00	601.422.170,00	596.351.045,00	-710.638.955,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.306.990.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.000.000,00	68.992.858,00	31.993.353,00	-37.006.647,00			-	- -	-		69.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	32.000.000,00	31.993.353,00	31.993.353,00	-6.647,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	36.999.505,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Wapo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			37.000.000,00	DISTRIK SARMI SELATAN
		DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT							**4.137.551.746,00**	**5.149.564.941,00**	**5.291.650.595,00**	**1.154.098.849,00**							**3.843.169.877,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.137.551.746,00**	**5.149.564.941,00**	**5.291.650.595,00**	**1.154.098.849,00**							**3.843.169.877,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.137.551.746,00**	**5.149.564.941,00**	**5.291.650.595,00**	**1.154.098.849,00**							**3.843.169.877,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.037.551.746,00**	**5.053.564.941,00**	**5.195.650.595,00**	**-194.381.869,00**							**3.843.169.877,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	-880.000,00			-	- -	-		13.800.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-200.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.900.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	-680.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			6.900.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.079.411.746,00	3.137.955.055,00	3.470.887.204,00	1.391.475.458,00			-	- -	-		1.596.626.519,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	2.061.411.746,00	3.120.735.055,00	3.453.667.204,00	1.392.255.458,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.564.626.519,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	-780.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			32.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	95.000.000,00	94.732.500,00	0,00	-95.000.000,00			-	- -	-		24.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	95.000.000,00	94.732.500,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			24.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	245.000.000,00	244.589.365,00	239.569.365,00	-5.430.635,00			-	- -	-		230.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.961.765,00	14.961.765,00	-38.235,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			20.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105.000.000,00	104.970.000,00	154.970.000,00	49.970.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.977.600,00	14.977.600,00	-22.400,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	109.680.000,00	54.660.000,00	54.660.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7	**NON URUSAN**							**4.137.551.746,00**	**5.149.564.941,00**	**5.291.650.595,00**	**1.154.098.849,00**							**3.843.169.877,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.137.551.746,00**	**5.149.564.941,00**	**5.291.650.595,00**	**1.154.098.849,00**							**3.843.169.877,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.137.551.746,00**	**5.149.564.941,00**	**5.291.650.595,00**	**1.154.098.849,00**							**3.843.169.877,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.137.551.746,00**	**5.149.564.941,00**	**5.291.650.595,00**	**1.154.098.849,00**							**3.843.169.877,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.000.000,00	44.624.991,00	0,00	-45.000.000,00			-	- -	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	45.000.000,00	44.624.991,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.483.140.000,00	1.442.869.530,00	1.406.372.526,00	-76.767.474,00			-	- -	-		1.928.743.358,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.787.960,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	25.529.012,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1.404.140.000,00	1.393.340.518,00	1.382.372.526,00	-21.767.474,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.845.955.398,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	75.000.000,00	74.673.500,00	64.701.500,00	-10.298.500,00			-	- -	-		50.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.827.500,00	19.827.500,00	-172.500,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	54.846.000,00	44.874.000,00	-10.126.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**100.000.000,00**	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	100.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-4.000.000,00			-	- -	-		0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Sarmi, Pantai Timur Bagian Barat, Nengke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DISTRIK PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT
		DISTRIK BONGGO TIMUR							**3.213.671.868,00**	**3.766.976.469,00**	**3.810.696.719,00**	**597.024.851,00**							**3.213.671.868,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.213.671.868,00**	**3.766.976.469,00**	**3.810.696.719,00**	**597.024.851,00**							**3.213.671.868,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.213.671.868,00**	**3.766.976.469,00**	**3.810.696.719,00**	**597.024.851,00**							**3.213.671.868,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**3.213.671.868,00**	**3.766.976.469,00**	**3.810.696.719,00**	**0,00**							**3.213.671.868,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.682.121.868,00	2.554.567.771,00	2.768.532.410,00	1.086.410.542,00			-	- -	-		1.682.121.868,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	1.682.121.868,00	2.554.567.771,00	2.768.532.410,00	1.086.410.542,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.682.121.868,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	44.300.000,00	43.477.500,00	0,00	-44.300.000,00			-	- -	-		44.300.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Paket	43 Paket	44.300.000,00	43.477.500,00	0,00	-44.300.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			44.300.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	454.830.000,00	434.304.750,00	340.124.750,00	-114.705.250,00			-	-	-		454.830.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.800.000,00	22.668.750,00	22.668.750,00	-17.131.250,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.800.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	119.030.000,00	119.016.000,00	169.016.000,00	49.986.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			119.030.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	290.000.000,00	289.620.000,00	145.440.000,00	-144.560.000,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			290.000.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	890.343.572,00	721.560.448,00	696.984.559,00	-193.359.013,00			-	-	-		890.343.572,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.725.150,00	4.725.150,00	-274.850,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	882.343.572,00	713.835.298,00	689.259.409,00	-193.084.163,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			882.343.572,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	142.076.428,00	13.066.000,00	5.055.000,00	-137.021.428,00			-	-	-		142.076.428,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	25.655.644,00	5.055.000,00	5.055.000,00	-20.600.644,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.655.644,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	116.420.784,00	8.011.000,00	0,00	-116.420.784,00	Kab. Sarmi, Bonggo Timur, Mawes Mukti	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			116.420.784,00	DISTRIK BONGGO TIMUR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**7.744.669.209,00**	**8.000.382.145,00**	**7.416.832.058,00**	**-327.837.151,00**							**0,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**7.744.669.209,00**	**8.000.382.145,00**	**7.416.832.058,00**	**-327.837.151,00**							**0,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**7.744.669.209,00**	**8.000.382.145,00**	**7.416.832.058,00**	**-327.837.151,00**							**0,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**4.491.769.275,00**	**4.755.164.040,00**	**4.593.448.938,00**	**-4.491.769.275,00**							**0,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	-15.000.000,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.343.759.275,00	3.635.466.402,00	3.924.797.249,00	581.037.974,00			-	-	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.313.759.275,00	3.605.472.362,00	3.894.803.209,00	581.043.934,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.998.040,00	14.998.040,00	-1.960,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	14.996.000,00	14.996.000,00	-4.000,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Sarmi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	537.000.000,00	536.950.000,00	208.471.000,00	-328.529.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	337.000.000,00	336.950.000,00	168.471.000,00	-168.529.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	511.010.000,00	482.750.140,00	395.203.191,00	-115.806.809,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	49.998.000,00	49.998.000,00	-2.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	-7.900.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	431.010.000,00	410.662.140,00	323.115.191,00	-107.894.809,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.000.000,00	54.997.498,00	34.977.498,00	-20.022.502,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	54.997.498,00	34.977.498,00	-20.022.502,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	-				-	-	**1.100.000.000,00**	**1.099.999.844,00**	**1.099.999.844,00**	**-1.100.000.000,00**							**0,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.100.000.000,00	1.099.999.844,00	1.099.999.844,00	-156,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				50 Orang	50 Orang	1.100.000.000,00	1.099.999.844,00	1.099.999.844,00	-156,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	-				-	-	**1.352.899.934,00**	**1.345.219.979,00**	**1.296.135.135,00**	**-1.352.899.934,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	1.352.899.934,00	1.345.219.979,00	1.296.135.135,00	-56.764.799,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	1.102.899.934,00	1.095.220.005,00	1.090.195.005,00	-12.704.929,00	Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	0 Orang	250.000.000,00	249.999.974,00	205.940.130,00	-44.059.870,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	-				-	-	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**393.060.000,00**	**-750.000.000,00**							**0,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	393.060.000,00	-356.940.000,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	750.000.000,00	750.000.000,00	393.060.000,00	-356.940.000,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	-				-	-	**50.000.000,00**	**49.998.282,00**	**34.188.141,00**	**-50.000.000,00**							**0,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	50.000.000,00	49.998.282,00	34.188.141,00	-15.811.859,00			-	- -	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	49.998.282,00	34.188.141,00	-15.811.859,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH								**1.082.832.566.409,00**	**1.079.930.720.650,00**	**1.019.974.359.971,00**	**-62.858.206.438,00**							**437.474.972.521,00**	

BAB 6
Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam tabel berikut.

Tabel 6.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sarmi Tahun 2025

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sarmi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	63,94	64,20	64,47	64,73	65,00	65,00
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	40,00	44,27	48,99	54,22	60,00	60,00
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,83	9,53	10,29	11,11	12,00	12,00
Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	Orang	2,00	2,30	2,65	3,04	3,50	3,50
Angka Harapan Hidup	Tahun	66,46	66,84	67,23	67,61	68,00	68,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,27	66,8	69,4	72,2	75,0	75
Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	30,00	33,20	36,74	40,66	45,00	45,00
Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Event	N/A	1	1	1	1	4
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	82,35	82,76	83,17	83,58	84,00	84,00
Predikat Kota Layak Anak	Predikat	N/A	Inisiasi	Pratama	Pratama	Madya	Madya
Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks	138,83	135,24	131,73	128,32	125,00	125
Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	9,73	12,32	15,60	19,75	25,00	25
Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	30,00	34,09	38,73	44,01	50,00	50,00
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persen	89,82	91,09	92,37	93,68	95,00	95,00
Persentase penduduk yang memiliki sanitasi layak	Persen	75,16	76,34	77,54	78,76	80,00	80,00
Rasio rumah layak huni	Persen	70,00	71,22	72,46	73,72	75,00	75,00
Persentase kawasan kumuh	Ha	1,16	1,12	1,08	1,04	1,00	1,00

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/Unit	0,08854	0,08950	0,09047	0,09145	0,09244	0,09244
Cakupan layanan armada angkutan umum antar kabupaten yang aktif	Per 1000 penduduk	3,61	3,92	4,25	4,61	5,00	5,00
Arus pergerakan penumpang angkutan udara	Orang	N/A	250	361	520	750	750
Arus pergerakan bongkar muat barang angkutan udara	Kg	N/A	500	721	1040	1500	1500
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	87,40	87,80	88,60	88,82	89,04	89,04
Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	77,00	78,00	80,00	81,80	83,64	83,64
Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,01	90,02	90,03	90,12	90,21	90,21
Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00
Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
Ketersediaan TPA yang terkelola secara baik	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggapdarurat bencana (SPM)	Persen	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,38	4,79	5,23	5,72	6,25	6,25
Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah	Persen	19,45	20,06	20,69	21,33	22,00	22,00
Kontribusi sektor peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	1,17	1,41	1,71	2,07	2,50	2,50
Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomian wilayah	Persen	48,96	50,40	51,89	53,42	55,00	55,00
Nilai realisasi invetasi tahunan(PMA/PMDN)	Rp. Miliar	29,3	30,63	32,02	33,48	35,00	35,00

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,26	4,57	3,97	3,45	3,00	3,00
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	8,78	10,04	11,48	13,12	15,00	15,00
Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB	persen	1,88	2,02	2,17	2,33	2,50	2,50
Persentase UMKM dan IKM aktif	persen	31,00	34,03	37,35	41,00	45,00	45,00
Persentase koperasi aktif	persen	25,00	31,12	38,73	48,21	60,00	60,00
Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah	Persen	8,32	8,71	9,12	9,55	10,00	10,00
Persentase peningkatan wisatawan (WNA/WNI)	Persen	1,25	1,49	1,77	2,10	2,50	2,50
Peningkatan nilai PAD	Persen	1,5	1,61	1,73	1,86	2,00	2,00
Indeks ketahanan pangan	Indeks	44,68	45,01	45,34	45,67	46,00	46,00
Skor PPH	Skor	65	66,22	67,45	68,72	70,00	70,00
Indek Desa Membangun	Indeks	0,4974	0,5030	0,5086	0,5143	0,5200	0,5200
Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	45,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00
Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	80,20	80,89	81,59	82,29	83,00	83,00
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
Persentase etnis/suku/agama/ ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa dan politik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keluarga Sejahtera I	Persen	72,36	73,01	73,67	74,33	75,00	75,00
Persentase layanan rehabilitasi sosial	Persen	45,00	46,20	47,43	48,70	50,00	50,00
Persentase layanan pemberdayaan sosial	Persen	60,00	61,21	62,45	63,71	65,00	65

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sarmi 2023-2026

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,38	4,79	5,23	5,72	6,25	6,25
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	63,94	64,20	64,47	64,73	65,00	65,00
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,8	9,5	10,3	11,1	12,0	12
Angka Harapan Hidup	Tahun	66,5	66,8	67,2	67,6	68,0	68,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,27	66,8	69,4	72,2	75,0	75
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,26	4,57	3,97	3,45	3,00	3,00
Persentase Keluarga Sejahtera I	Persen	72,36	73,01	73,67	74,33	75,00	75,00
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	82,35	82,76	83,17	83,58	84,00	84,00
Indeks ketahanan pangan	Indeks	44,68	45,01	45,34	45,67	46,00	46,00
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	8,78	10,04	11,48	13,12	15,00	15,00
Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomianwilayah	Persen	19,45	20,06	20,69	21,33	22,00	22,00
Kontribusi sektor peternakan dalam perekonomian wilayah	Persen	1,17	1,41	1,71	2,07	2,50	2,50
Kontribusi sektor perikanan dalam perekonomianwilayah	Persen	48,96	50,40	51,89	53,42	55,00	55,00
Kontribusi Industri pengolahanterhadap PDRB	persen	1,88	2,02	2,17	2,33	2,50	2,50
Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomianwilayah	Persen	8,32	8,71	9,12	9,55	10,00	10,00
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Peningkatan nilai PAD	Persen	1,5	1,61	1,73	1,86	2,00	2,00
Persentase pemuda dalam pembangunan	Persen	30	33,2	36,7	40,7	45,0	45
Prestasi olahraga pada event kabupaten, provinsi dan nasional	Event	N/A	1	1	1	1	4

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
ASPEK DAYASAING DAERAH							
Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	80,20	80,89	81,59	82,29	83,00	83,00
Nilai realisasi invetasi tahunan (PMA/PMDN)	Rp. Miliar	29,3	30,63	32,02	33,48	35,00	35,00
Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks	138,83	135,24	131,73	128,32	125,00	125
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	75	80	85	90	95	95
ASPEK PELAYANANUMUM							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
Persentase capaian SPM pendidikan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penduduk yang berusia >15Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	93,84	94,78	95,25	95,73	96,21	96,21
Angka partisipasi sekolah Usia 5-6	Persen	60,61	63,68	65,27	66,90	68,57	68,57
Angka partisipasi kasar SD	Persen	108,03	109,11	109,66	110,20	110,76	110,76
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	92,07	92,99	93,46	93,92	94,39	94,39
Angka partisipasi sekolah (APS) 07-12	Persen	93,90	94,84	95,32	95,79	96,27	96,27
Angka partisipasi kasar SMP	Persen	101,79	102,81	103,32	103,84	104,36	104,36
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	77,46	78,23	78,62	79,02	79,41	79,41
Angka partisipasi sekolah (APS) 13-15	Persen	92,25	93,17	93,64	94,10	94,57	94,57
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7–24 (laki-laki dan perempuan)	Persen	69,05	72,55	74,36	76,22	78,13	78,13

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase sekolah yang menerapkan mata pelajaran muatan lokal berbasis budaya	Persen	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
Rasio guru terhadap murid pendidikan PAUD	per satuan murid	11,55	12,73	13,37	14,04	14,74	14,74
Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	per satuan murid	13,94	15,37	16,14	16,95	17,79	17,79
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pertama	per satuan murid	13,59	14,99	15,74	16,52	17,35	17,35
Persentase Guru yang telah Disertifikasi	Persen	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00
Persentase Tenaga Pendidikan dengan Jenjang Pendidikan S 1	Persen	75,00	76,92	78,90	80,92	83,00	83,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 10.000 penduduk	10,62	11,15	11,43	11,72	12,01	12,01
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	33,03	39,24	42,77	46,62	50,82	50,82
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 kelahiran hidup	14,36	9,89	8,21	6,81	5,66	5,66
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100,000 kelahiran hidup	825,75	464,48	348,36	261,27	195,95	195,95
Cakupan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dan gizi	Persen	40,00	45,16	50,99	57,57	65,00	65,00
Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ARV rutin	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	2,50	2,20	1,94	1,70	1,50	1,50
Prevalensi balita sangatkurus dan kurus (Stunting)	Persen	0,28	0,24	0,22	0,20	0,19	0,19
Cakupan Penyakit Menular endemik	Persen	5,00	3,98	3,16	2,51	2,00	2,00
Rasio posyandu per satuan balita	Persen	14,59	16,24	17,13	18,07	19,07	19,07
Cakupan Posyandu aktif	Persen	93,68	96,52	97,96	99,43	100,00	100,00
Persentase distrik dengan 1 (satu) puskesmas yang terakreditasi	Persen	31,65	35,23	37,16	39,21	41,37	41,37
Cakupan imunisasi dasar lengkap(IDL)	Persen	33,96	39,98	43,38	47,06	51,06	51,06
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100 ribu penduduk	12,00	9,64	7,75	6,22	5,00	5,00
Kejadian Malaria Per 1000 Orang	Per 1000 penduduk	120,00	108,43	97,98	88,53	80,00	80,00
Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	66,73	78,55	85,23	92,47	100,00	100,00
Cakupana bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	94,60	97,46	98,92	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan balita sesauai standar	Persen	17,85	21,40	23,43	25,66	28,10	28,10
Cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (Kasus AFP [Acute Flaccid Paralysis])	Kasus	2,51	3,95	4,96	6,23	7,81	7,81
Cakupan Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat & vaksin	Kasus	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Penemuan Penderita TB (CDR)	Persen	30,00	34,09	38,73	44,01	50,00	50,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase jumlah rumah tanggayang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	69,02	71,11	72,17	73,26	74,35	74,35
Persentase Rumah Tanggayang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	Persen	35,00	38,64	42,66	47,10	52,00	52,00
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	5,00	6,58	8,66	11,40	15,00	15,00
Cakupan jalan permukiman dalam kondisi baik	Persen	25,00	28,12	31,62	35,57	40,00	40,00
Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	38,10	44,85	48,67	52,80	57,29	57,29
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	14,78	17,72	19,41	21,25	23,27	23,27
Pesentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persen	45,00	48,36	51,96	55,84	60,00	60,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga	Persen	19,72	26,54	30,78	35,71	41,42	41,42
Luas kawasan permukimankumuh	Ha	1,50	1,14	0,87	0,66	0,50	0,50
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	60,00	64,47	69,28	74,45	80,00	80,00
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (listrik PLN dan Non PLN)	Persen	97,71	98,69	99,18	99,68	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	35,48	41,00	44,07	47,38	50,93	50,93

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase Perkara yang Diterima dan Diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	45,00	50,26	56,12	62,68	70,00	70,00
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis)yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persen	30,00	33,20	36,74	40,66	45,00	45,00
Persentase keluarga miskin yang memperolehlayanan JaminanSosial	Persen	30,00	34,42	39,50	45,32	52,00	52,00
Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah (RTKD)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	Persen	9,68	11,18	12,02	12,92	13,89	13,89
Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	77,14	79,47	80,66	81,87	83,10	83,10
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri)Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase Perusahaan yanglayak (PP/PKB, terdaftarpeserta BPJS LKS yang menerapkan tata kelola kerja Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Ketenagakerjaan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Persen	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Persen	N/A	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
Persentase Perempuan memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan	Persen	44,62	46,88	48,05	49,25	50,49	50,49
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 tahun ke atas yang Melek huruf	Persen	94,02	94,96	95,44	95,91	96,39	96,39
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	33,44	34,45	34,97	35,49	36,02	36,02
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7–24 perempuan	Persen	71,72	73,89	75,00	76,12	77,26	77,26
Angka KDRT	Per 1.000 rumah tangga	25,00	19,88	15,81	12,57	10,00	10,00
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
Persentase ketersediaan pangan	Persen	84,24	86,79	88,09	89,41	90,75	90,75
Indeks capaian pola pangan harapan ketersediaan	Indeks	N/A	10,00	12,57	15,81	19,88	25,00
Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan	dokumen	N/A	1	1	1	1	4
Cakupan penanganan kampung rawan dan rentan pangan	Persen	25,00	28,12	31,62	35,57	40,00	40,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
Cakupan fasilitasi dan koordinasi permasalahan ganti rugi dan santunan tanah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase perencanaan pamanfaatan tanah	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
Presentase jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Persen	75,00	80,59	86,60	93,06	100,00	100,00
Tersedianyadokumen KLHS RPJMD yang berkualitas	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase kenaikan Nilai IKLH	Persen	1,25	1,41	1,58	1,78	2,00	2,00
Tersedianya dokumen RPPLH yang berkualitas	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase persetujuan teknis pengelolaanlimbah B3 yang diberikan	Persen	75,00	80,59	86,60	93,06	100,00	100,00
Tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	25,00	39,06	48,83	61,04	76,29	76,29
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	80,00	84,59	89,44	94,57	100,00	100,00
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

ASPEK/FOKUS/BIDANG PEMBANGUNAN	URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
Penetapan hak MHA		Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup		Persen	80,00	84,59	89,44	94,57	100,00	100,00
Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah sampah yang tertangani		Persen	36,93	45,50	50,51	56,07	62,23	62,23
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		Persen	30,00	32,24	34,64	37,22	40,00	40,00
Tersedianya data dan informasi penanganan sampah yang rutin dan berkualitas		Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Tingkat perekaman KTP elektronik		Persen	98,20	98,59	98,79	98,98	99,18	99,18
Persentase anak usia 0-17tahun yang memiliki KIA		Persen	8,90	20,01	30,02	45,03	67,55	67,55
Persentase penduduk usia >17 tahun yang memiliki NIK		Persen	94,66	95,61	96,09	96,57	97,05	97,05
Persentase Penduduk Berumur Kelahiran	0-17Tahun yang Memiliki Akta	Persen	86,56	88,74	89,85	90,97	92,11	92,11
Persentase Penduduk Berumur Kelahiran	0-4Tahun yang Memiliki Akta	Persen	66,81	68,49	69,35	70,21	71,09	71,09
Rasio pasangan berakte nikah		Pasangan nikah	65,00	68,46	72,11	75,95	80,00	80,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Cakupan OPDyang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	45,00	47,32	49,75	52,31	55,00	55,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Persentase peningkatan status menjadi desa mandiri	Persen	8,05	12,64	14,94	17,24	19,54	19,54
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase kinerja kelembagaanmasyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA							
Ketersediaan kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Laju pertumbuhan penduduk	persen	2,50	2,56	2,60	2,63	2,66	2,66
Persentase Umur Perkawinan Pertama <19tahun	Persen	19,63	17,16	16,05	15,00	14,03	14,03
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	Persen	24,50	27,78	29,59	31,51	33,56	33,56
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	37,52	31,41	28,74	26,30	24,06	24,06
Cakupan pesertaKB aktif	Orang	1500,00	762,20	387,30	196,80	100,00	100,00
Ratio Akseptor KB	Persen	3200	3745	4382	5127	6000	6000
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah/sedang menggunakan KB	Persen	70,00	74,54	79,37	84,52	90,00	90,00
Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	Persen	85,00	88,52	92,20	96,02	100,00	100,00
Keluarga Pra Sejahtera	KK	1227	1258	1274	1290	1306	1305,79

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Keluarga Sejahtera I	KK	2395	2455	2485	2517	2548	2548,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km/unit	7100,89	7172,08	7207,94	7243,98	7280,20	7280,20
Persentase kendaraan yang lolos Uji KIR	Persen	85,00	88,52	92,20	96,02	100,00	100,00
Peningkatan fasilitas LLAJ	Persen	2,22	2,49	2,79	3,12	3,50	3,50
Arus penumpang angkutan laut	Orang	3000	3250	3500	3750	4000	4000
Arus bongkar muat barang angkutan laut	Ton	900	967	1039	1117	1200	1200
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Persentase Pelayanan Informasi Publik	Persen	2,22	2,49	2,79	3,12	3,50	3,50
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan TeleponSeluler/Nirkabel	Persen	73,37	77,08	79,01	80,99	83,01	83,01
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet	Persen	48,56	54,05	57,02	60,16	63,47	63,47
Persentase kampung/kelurahan yang dapat menerima akses internet	Persen	63,06	72,07	76,58	81,08	85,59	85,59
Jumlah Menara BTS (Base TransceiverStation) yang terpelihara	Titik	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Indeks tata kelola SPBE	Predikat	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DANMENENGAH							
Persentase koperasi yang teregistrasi	Persen	60,00	64,47	69,28	74,45	80,00	80,00
Persentase koperasi aktif	Persen	70,00	73,48	77,14	80,97	85,00	85,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase SDMKoperasi yang mendapatkan pelatihan	Persen	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan	Persen	20,00	25,15	31,62	39,76	50,00	50,00
Persentase usaha Mikro yang menjadi wira usaha	Persen	30,00	34,09	38,73	44,01	50,00	50,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMANMODAL							
Persentase peningkatan investasi	Persen	1,15	1,37	1,63	1,93	2,30	2,30
Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. Miliar	1.200,00	1.508,92	1.897,37	2.385,81	3.000,00	3.000,00
Perumusan Kebijakan mengenaiPeraturan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rp. Miliar	N/A	247,14	310,76	390,76	491,35	491,35
Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	Persen	30,00	33,20	36,74	40,66	45,00	45,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	40,00	44,27	48,99	54,22	60,00	60,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan	Level	I	I	II	II	II	II
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Jumlah cagar budaya yang dikelolasecara terpadu	Jumlah	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Persentase Komunitas/ sanggar kesenian yang difasilitasi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	50,00	54,39	59,16	64,35	70,00	70,00
Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	25,30	30,29	36,27	43,43	52,00	52,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
Tingkat ketersediaan arsip sebagaibahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	60,00	63,44	67,08	70,93	75,00	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	16238	17061	17487	17924	18372	18372
Cakupan bina kelompoknelayan tangkap	Persen	80,00	82,39	84,85	87,39	90,00	90,00
Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	338	373	392	411	432	432
Cakupan bina kelompoknelayan budi daya	Kelompok nelayan	60,00	64,47	69,28	74,45	80,00	80,00
Konsumsi ikan	kg per kapita	46,30	48,12	50,00	51,96	54,00	54,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	Persen	1,10	1,32	1,57	1,88	2,25	2,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya	Persen	33,55	38,77	41,68	44,81	48,17	48,17
Kunjungan wisata (WNA/WNI)	jumlah	N/A	1000	1500	2000	2500	2500,00
Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik	hari	2,5	2,5	2,8	2,8	3,0	3,0
Prsentase Destinasi Pariwisata yang dikelola dengan baik	Persen	60,00	62,36	64,81	67,35	70,00	70,00
Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya	Persen	30,00	37,08	45,83	56,64	70,00	70,00
Jumlah potensi objek wisata	lokasi	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Persentase pelaku pariwisata yang terbina	Persen	80,00	84,59	89,44	94,57	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
Tingkat produktivitas pertanian	Ton/Ha	9,48	9,96	10,21	10,47	10,73	10,73
Produksi daging unggas	Ton	22,66	23,81	24,41	25,02	25,64	25,64
Produksi dagingternak besar	Ton	35,35	37,14	38,06	39,02	39,99	39,99
Produksi telur ayam	Ton	41,37	43,46	44,55	45,66	46,80	46,80
Persentase sarana pertanian yang tertangani	Persen	30,00	34,59	39,87	45,97	53,00	53,00
Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulanganbencana pertanian kabupaten/ kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase peningkatan kelas kelompoktani per tahun	Persen	1,47	1,70	1,97	2,29	2,65	2,65
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Margin perdagangan barang kebutuhan pokok	Persen	65,00	68,03	71,20	74,52	78,00	78,00
Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase alat-alatukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkandalam RPIP (IKK Outcome)	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan dan fasilitasi sarana prasarana IKM	Ada/Tidak Ada	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
SEKRETARIAT DAERAH							
Nilai LPPD	Level						

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00
Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,14	66,93	70,61	74,50	78,59	78,59
Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEKRETARIAT DPRD							
Persentase pemenuhan pelayanan masa reses Anggota DPRD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pembahasan dokumen penganggarantepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
PERENCANAAN							
Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase konsistensiprogramRPJMD kedalam RKPD	Persen	90,00	91,22	92,47	93,72	95,00	95,00
Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD	Persen	90,00	92,40	94,87	97,40	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	90,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00
Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,14	66,93	70,61	74,50	78,59	78,59
Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SEKRETARIAT DPRD							
Persentase pemenuhan pelayanan masa reses Anggota DPRD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pembahasan dokumen penganggarantepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
PERENCANAAN							
Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase konsistensiprogramRPJMD kedalam RKPD	Persen	90,00	91,22	92,47	93,72	95,00	95,00
Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD	Persen	90,00	92,40	94,87	97,40	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Persentase hasil musyawarah rencana pembangunan dan konsultasi publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan elemen data pembangunan yang terpenuhi dalam SIPD	Persen	90,00	92,40	94,87	97,40	100,00	100,00
Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas(RPJMD dan RENSTRA-PD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase dokumen perencanaan jangka pendek yang berkualitas(RKPD dan RENJA-PD)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keterisian Jabatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	70,00	73,48	77,14	80,97	85,00	85,00
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase ASN berpendidikan Pendidikan Tinggi	Persen	63,40	66,28	67,77	69,30	70,86	70,86
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
INSPEKTORAT DAERAH							
Maturitas Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)	level	2	2	2	3	3	3
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	2	2	2	3	3	3
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran daerahyang direviu(RPJMD, RENSTRA, RENJA-RKPD, LAKIP, LPPD, DPA, RKA, LKPD)	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNANDAERAH	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK	Persen	70,51	75,53	78,18	80,91	83,75	83,75
Persentase capaian kepatuhan pelaporan LHKPN	Persen	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00
UNSUR KEWILAYAHAN							
KECAMATAN							
Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat distrik	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	Predikat	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat distrik	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat distrik	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat distrik	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Umum	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tingkat distrik	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat Kinerja PenyelenggaraanPemerintahan Umum	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Kampung dan Kelurahan	Predikat	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG PEMBANGUNANDAERAH	URUSAN/ INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja				Kondisi Akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Persentaseetnis/ suku / agama/ ormas dan LSM yang memahami pendidikan politik		Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Persentaseetnis/ suku/ agama/ ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan bangsa		Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Persentase konflik sosial yang diselesaikan		Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB 7
Pentup

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakankegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sarmi tahun 2025 yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak, selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025.

Sarmi, Agustus 2025

BUPATI SARMI

DOMINGGUS CATUE, S.KM.,M.KES